



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DIREKTORAT PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN** ○ ○

2024





DIKEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T.	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	15/01/2025	
2.	Diperiksa	Susiani, A.Md LLAJ, S.T., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	16/01/2025	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	16/01/2025	
4.	Disetujui	Rudy Arya Iskandar, S.T., M.Sc.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	16/01/2025	



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.Stat	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	15/01 2025	
2.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	16/01 2025	
3.	Diperiksa	Hariyanto, ST	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	16/01 2025	
4.	Disetujui	Windi Susilawati, ST, MT	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	16/01 2025	



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penelaah Teknis Kebijakan, Seksi Integrasi Moda	15/01 2025	
2.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	16/01 2025	
3.	Diperiksa	Jekky Hendri, S,Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	16/01 2025	
4.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	16/01 2025	



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penelaah Teknis Kebijakan, Kelompok Pengawasan dan Evaluasi	15/01 2025	
2.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	16/01 2025	
3.	Diperiksa	Fitroh, S.ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	16/01 2025	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	16/01 2025	



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	15/01 2025	
2.	Diperiksa	Yulie Wulandari, SE	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	16/01 2025	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	20/1 25	

KATA PENGANTAR

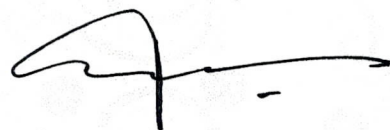
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 17 Januari 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Toni Tauladan, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

KATA PENGANTAR

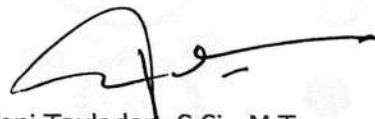
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 17 Januari 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Toni Tauladan, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023, terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2024, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari **9 (sembilan)** IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat **9 (sembilan)** IKK dengan **status hijau** dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,64** (target tahun 2024 sebesar 0,64), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **108** lokasi (target tahun 2024 sebesar 108 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
3. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **13** lokasi (target tahun 2024 sebesar 13 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **96,34%** (target tahun 2024 sebesar 96,34) dengan Capaian Kinerja sebesar **100,00%**;
5. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **62,27%** (target tahun 2024 sebesar 62,27%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
6. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **82,44%** (target tahun 2024 sebesar 82,44%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
7. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **23,94%** (target tahun 2024 sebesar 23,94%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**.
8. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **91** (target tahun 2024 sebesar 91), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
9. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **74** (target tahun 2024 sebesar 74), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar **100,00%** dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar **100,00%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana

dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I. 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

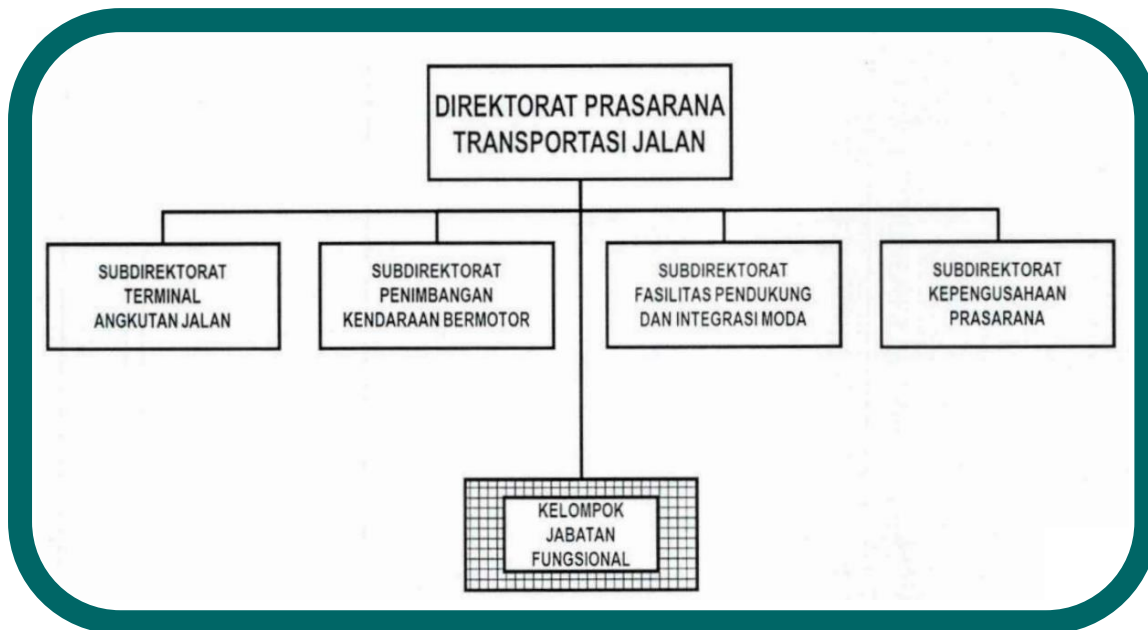
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana;

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan



I. 3 Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi Tahun 2024 diklasifikasikan menurut sub unit kerja sebanyak 91 orang pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	JUMLAH
1.	Kelompok Tata Usaha	10	-	-	9	19
2.	Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan	13	-	1	3	17
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	14	-	1	5	20
4.	Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	16	-	-	4	20
5.	Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana	10	-	1	4	15
Jumlah		63	0	3	25	91

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

I. 4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - i Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - ii Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - iii Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - i Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen).
 - ii Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat dengan DIPA Awal Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada T.A. 2024 sebesar Rp99.957.401.000,- dan DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) T.A. 2024 sebesar Rp 98.803.755.000,-.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah:

- a) Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
- b) Pengoperasian Terminal Penumpang;
- c) ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
- d) Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB;

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 adalah:

- a) Rencana Strategis;
- b) Perjanjian Kinerja;
- c) Indikator Kinerja Program;
- d) Pengukuran Kinerja;
- e) Evaluasi Kinerja

I. 5 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I. 3. Sumber Daya Manusia
- I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I. 5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024

II.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

III.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

III. 2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7. Benchmarking Nasional/ Internasional

III. 2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7. Benchmarking Nasional/ Internasional

III. 2.1.3 IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7. Benchmarking Nasional/ Internasional

III.2.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

III. 2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7. Benchmarking Nasional/ Internasional

III. 2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- a.5.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7.Benchmarking Nasional/ Internasional

III. 2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

- a.1.Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3.Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4.Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7.Benchmarking Nasional/ Internasional

III.2.3. SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

III. 2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1.Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3.Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4.Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7.Benchmarking Nasional/ Internasional

III.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

III. 2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1.Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3.Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4.Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7.Benchmarking Nasional/ Internasional

III.2.5. SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
III. 2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat
Prasarana Transportasi Jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi
II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024
- a.7. Benchmarking Nasional/ Internasional

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

III. 3.1.1 Pagu Anggaran

- a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

III. 3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2024

- a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
- a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
- a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
- a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

III. 3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2024

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

III. 3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

III. 3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

III. 3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

III. 3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III. 3.2.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

III. 3.2.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

III.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV. 1. Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

IV. 2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
4. Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
5. Rencana Aksi Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
6. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
7. Revisi II Rencana Aksi Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024
9. Lain – lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

II. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan target indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Program Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat bersinergi dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.58	0.61	0.67	0.67	0.70
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	104	104	111	111	114
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	4	9	15	20	25
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.57	53.60	53.65	53.70	53.75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	70.35	71.03	74.15	78.60	83.38
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50.0	35.0	30.0	25.0	20.0
WA Program Dukungan Manajemen										
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	85	86	87	88	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	70	71	72	73	74

II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan capaian kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,70
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	114
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	25
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	83,38
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	20,0
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

II. 2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Januari 2024 sebesar Rp. 99.957.401.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24,0
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan**Anggaran**

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pelayanan transportasi darat | Rp38.406.000.000,00 |
| 2. Penunjang teknis transportasi darat | Rp38.674.313.000,00 |
| 3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp22.877.088.000,00 |

II.2.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Revisi ke 08 DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 21 Juni 2024 sebesar Rp. 98.883.755.00,-.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas Pelayanan Transportasi Darat dengan pagu awal sebesar Rp38.406.000.000,00 pada revisi ke 08 DIPA menjadi sebesar Rp 37.828.186.000,00 dan Penunjang Teknis Transportasi Darat dengan pagu awal sebesar Rp38.674.313.000,00 pada revisi ke 08 DIPA menjadi sebesar Rp38.178.481.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	24,0
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan**Anggaran**

1. Pelayanan transportasi darat	Rp 37.828.186.000,00
2. Penunjang teknis transportasi darat	Rp 38.178.481.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 22.877.088.000,00

II.2.2 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada prinsipnya sama seperti Perjanjian Kinerja. Hanya saja pada dokumen Revisi II Perjanjian Kinerja, terdapat perubahan yang harus dilaksanakan dalam sisa Tahun 2024 ini. Sehubungan dengan adanya Revisi ke-14 DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2024 tanggal 19 November 2024 dan perubahan salah satu pimpinan unit kerja maka perlu ditetapkan Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp76.006.667.000,00 dan program Dukungan Manajemen masih dengan pagu sebesar Rp.22.797.088.000,00.

Sama seperti dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen Revisi II Perjanjian Kinerja juga merupakan suatu dasar untuk penilaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk menggantikan dokumen Perjanjian Kinerja ketika terdapat perubahan pimpinan ataupun perubahan anggaran. Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel II. 5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	108
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	96,34
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	62,27
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	82,44
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	23,94
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	91
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan

Anggaran

1. Pelayanan transportasi darat	Rp 37.205.205.000,00
2. Penunjang teknis transportasi darat	Rp 38.801.464.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 22.797.088.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

III. 2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dimasa mendatang.

• Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:


$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi://

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja digunakan Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi *E-Performance*, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUA N	TARGE T	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						96,53%			96,53%			99,10%			100,00%
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64	0,64	0,64	100,00%	0,64	0,64	100,00%	0,64	0,64	100,00%	0,64	0,64	100,00%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111	111	108	97,30%	111	108	97,30%	111	108	97,30%	108	108	100,00%
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13	13	12	92,31%	13	12	92,31%	13	13	100,00%	13	13	100,00%
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						110,27%			110,73%			110,50%			100,00%
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,5	81,5	95,6	117,30%	81,5	96,72	118,67%	81,5	96,17	118,00%	96,34	96,34	100,00%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75	53,75	60,56	112,67%	53,75	60,56	112,67%	53,75	60,56	112,67%	62,27	62,27	100,00%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75	81,75	82,44	100,84%	81,75	82,44	100,84%	81,75	82,44	100,84%	82,44	82,44	100,00%
SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						101,40%			102,08%			101,21%			100,00%
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	24	23,75	101,40%	24	23,5	102,08%	24	23,71	101,21%	23,94	23,94	100,00%
SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						95,51%			97,75%			97,75%			100,00%
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	89	85	95,51%	89	87	97,75%	89	87	97,75%	91	91	100,00%
SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						97,81%			98,26%			98,26%			100,00%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	74	72,38	97,81%	74	72,71	98,26%	74	72,71	98,26%	74	74	100,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100,30%			101,07%			101,36%			100,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						101,68%			102,21%			102,89%			100,00%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						5			5			6			9
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						4			4			3			0

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Jika dilihat lebih detail, pada Tahun 2024, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 9 (sembilan) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) dan 0 (nol) status merah dengan kondisi kurang dari 100% (0%≤IKP<100%).

Selama Tahun 2024, terdiri 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya terdapat 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

III.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

• Uraian Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi.

Tabel III. 2 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi							
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,64				
		Target		0,64	0,64	0,64	0,64
		Realisasi		0,64	0,64	0,64	0,64
		Capaian		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	108				
		Target		111	111	111	108
		Realisasi		108	108	108	108
		Capaian		97,30%	97,30%	97,30%	100%
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	lokasi	13				
		Target		13	13	13	13
		Realisasi		12	12	13	13
		Capaian		92,31%	92,31%	100,00%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.
2. IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 3. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

III.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi Jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 3 Capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan				Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	0,64	0,64	0,64	0,64	
Realisasi	0,64	0,64	0,64	0,64	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan.

Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi.

Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte.

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}}$$

Keterangan:

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk dilayani prasarana transportasi jalan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

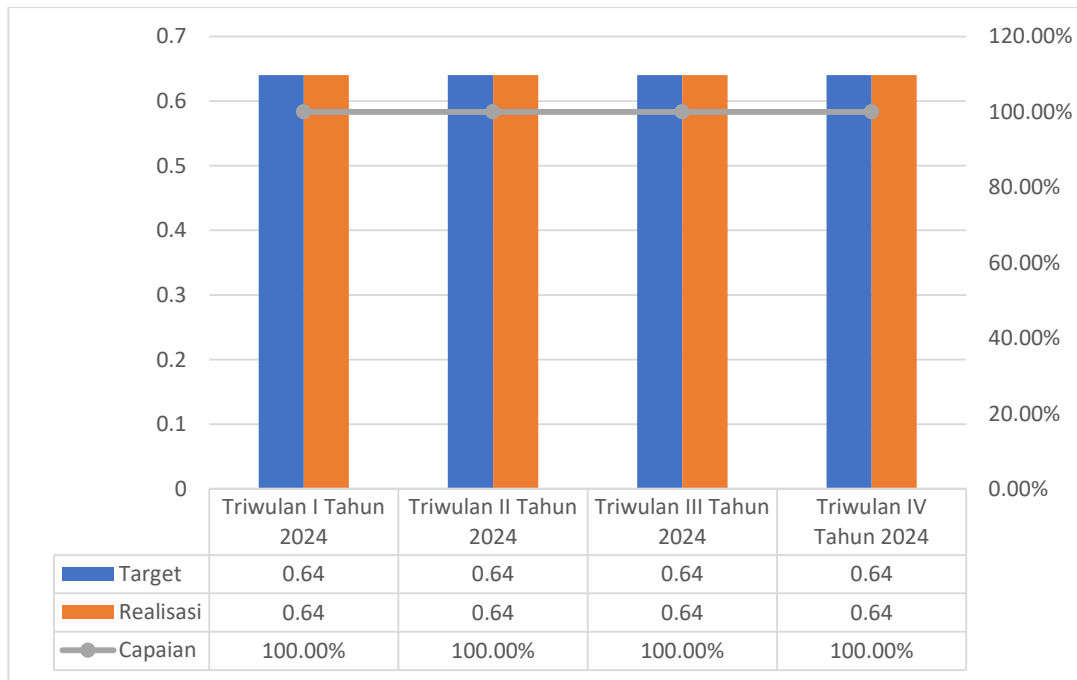
42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;

17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan pada tahun 2024 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2024 sebesar 0,64 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1.** Grafik Capaian IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.



Gambar III. 1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Rasio Kawasan Strategis Nasional Yang Terlayani Simpul Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional.

a) Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia dan KM 100 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) terminal.

Dari 127 Terminal Penumpang Tipe A tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Kawasan (Lampiran 9) dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sisanya 72 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

b) Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua.

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)
3. Aruk di Kalimantan Barat;
4. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
5. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
6. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
7. Wini di Nusa Tenggara Timur;

Dari 7 Terminal Barang untuk Umum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan tersebut di atas terdapat 1 (satu) Terminal Barang untuk Umum yang telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak 1 (satu) Kawasan (Lampiran 9) dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sisanya sebanyak 6 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional dan/atau belum beroperasi.

c) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

Terdapat penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan tahun 2024 sebanyak 13 lokasi dan sudah terealisasi sebanyak 13 lokasi sebagai berikut:

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru;
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar;
13. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Lesung.

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,67 dengan target 47 KSN terlayani oleh simpul Prasarana Transportasi Jalan disesuaikan dengan kegiatan pada DIPA TA 2024 menjadi 0,62 dengan target 43 KSN terlayani simpul Prasarana Transportasi Jalan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan setelah disesuaikan dengan realisasi capaian kinerja dimana terdapat 43 kawasan yang terlayani oleh simpul prasarana transportasi jalan sehingga pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah dilakukan revisi target menjadi 0,64 karena belum ada penambahan simpul lokasi baru pada Kawasan Strategis Nasional.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan terhadap kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Tahun 2024 yaitu:

1. Dari 127 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana diubah dengan KM 100 Tahun 2024 terdapat 55 (lima puluh lima) Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Kawasan (Lampiran 9) dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sisanya 72 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

2. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung Tahun 2024 sebanyak 13 lokasi dan telah terealisasi sebanyak 13 (tiga belas) lokasi, yaitu Mandalika, Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Denpasar dan Tanjung Lesung. Penambahan realisasi ada pada akhir tahun 2024, yaitu adanya penambahan pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Lesung. Sehingga dari 13 (tiga belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah terealisasi sebanyak 13 (tiga belas) lokasi yang berada di 5 Kawasan Strategis Nasional;
3. Adanya Kegiatan Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan dan Survey dan Monitoring Simpul-Simpul Transportasi di KSPN;

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:

1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi Tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum.
2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service.
3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum yaitu:

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai pada tahun 2024 yaitu :

1. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan event MotoGP dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Penentuan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
4. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.

● **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Penumpang Tipe A** antara lain:

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A.
2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan.
3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Barang Umum** antara:

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat backlog kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda** antara lain:

1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan Jumlah KSN Prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN})}{\text{yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}} \\ &= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}} \\ \text{Capaian Rasio Konektivitas} &= \frac{44 \text{ wilayah (irisan simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,64 \end{aligned}$$

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Tahun 2023 terhadap target Revisi II PK Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,64}{0,64} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW IV	Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		Realisasi TW IV	
			Keuangan (Rp)	Pagu (%)	Keuangan (Rp)	Pagu (%)	Keuangan (Rp)	Pagu (%)	Keuangan (Rp)	Pagu (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi										
IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan 1. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan;	Rp865.307.000,00	Rp387.505.000	Rp270.854.096,00	31,30%	Rp442.515.529,00	45,94%	Rp805.840.040	74,22%	Rp374.124.470	96,55%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pengawasan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

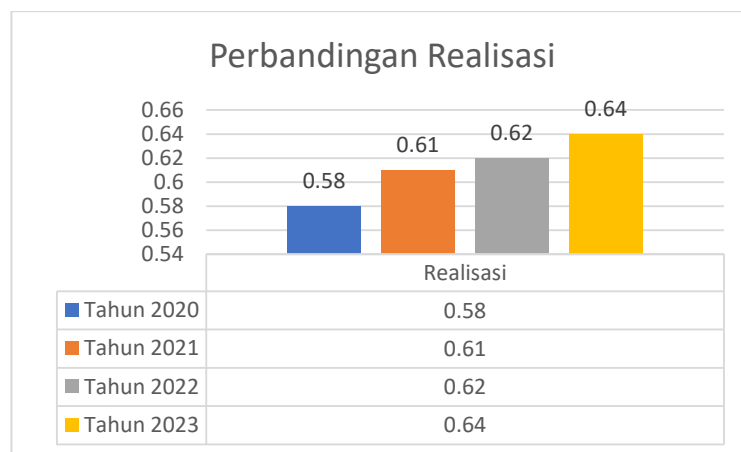
Realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2024 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 0,64 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 sebesar 0,62 maka capaian kinerja mencapai 103,23%. Pada tahun 2022 capaian kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan sebesar 0,62 dengan target 0,61 maka capaian kinerja mencapai 101,64%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 0,61 dengan target 0,61 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 0,58 dengan target 0,58 maka capaian kinerja mencapai 100% Sehingga realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,02 dari tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 0,03 dari tahun 2021 serta kenaikan sebesar 0,06 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

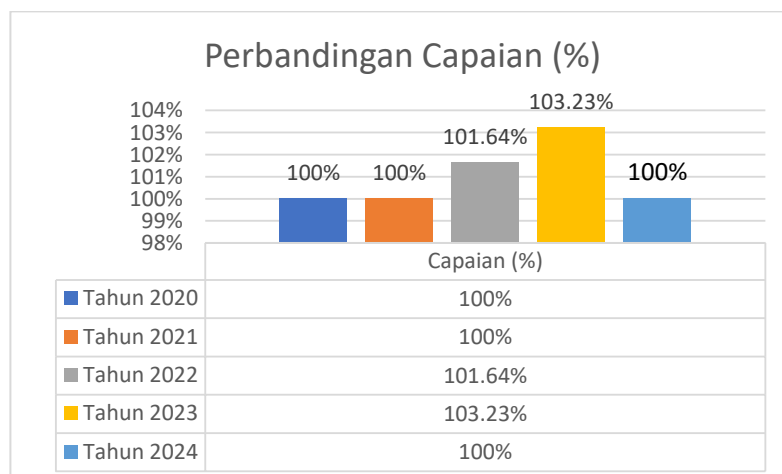
SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	0,58	0,58	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	0,61	0,61	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	0,61	0,62	101,64%	Naik
4	2023	IKK 1	0,62	0,64	103,23%	Naik
5	2024	IKK 1	0,64	0,64	100%	Tetap



Gambar III. 2 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020



Gambar III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

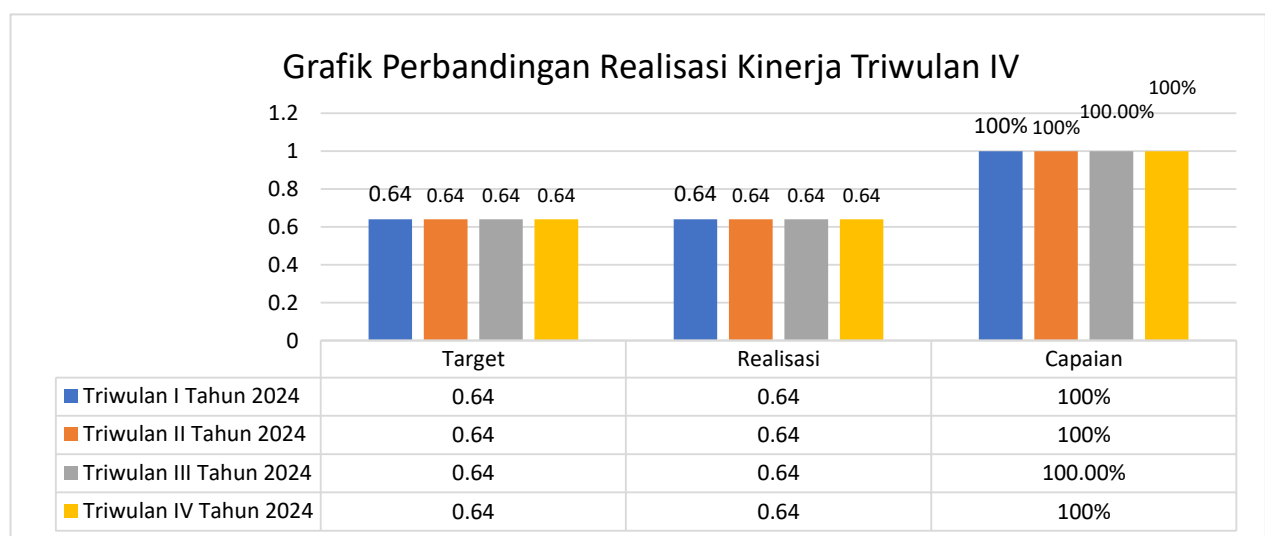


Gambar III. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

Capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan pada tahun 2024 merupakan komitmen terhadap ketersediaan simpul prasarana transportasi jalan antara lain Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Barang Umum, dan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Nasional. Sehingga capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2024 adalah 100,00% atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 103,23% karena target meningkat dari 0,62 menjadi 0,64 dengan realisasi yaitu 0,64 pada IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2024 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 0,64 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.2**.



Gambar III.5 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Rasio Kawasan Strategis Nasional yang terlayani Simpul Prasarana Transportasi Jalan)

a.7. Benchmark Nasional

Benchmark untuk Rasio Kawasan Strategis Nasional yang terlayani Terminal Penumpang Tipe A menggunakan data dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024, terdapat 49 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)/Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang telah terhubung dengan jaringan jalur Kereta Api pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 104 lokasi PKN/PKW/KSN maka capaiannya sebesar 47,12%. Untuk Terminal Penumpang Tipe A, jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang sudah terlayani

sebanyak 41 KSN dari total 69 KSN yang direncanakan untuk dilayani, sehingga rasio capaiannya sebesar 59,42%.

Benchmark nasional untuk Persentase Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda menggunakan data dari BPTJ pada tahun 2024. Di BPTJ, penyediaan halte untuk melayani operasional angkutan perkotaan Bis Kita Trans Pakuan. Sama seperti Halte di wilayah KSPN yang disediakan untuk melayani angkutan umum yang ada disekitar wilayah tersebut. Terdapat 67 fasilitas pendukung dan integrasi moda berupa halte permanen, portable dan bus stop yang berlokasi di wilayah operasional Trans Pakuan. Sebagai perbandingan, jumlah halte di wilayah KSPN yang telah disediakan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berjumlah 24 yang tersebar di 2 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

III.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 6 Capaian Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					
IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi					Satuan: Lokasi
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	111	111	111	108	
Realisasi	108	108	108	108	
Capaian	97,30%	97,30%	97,30%	100%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan aset lahan serta bangunannya telah menjadi milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ & = \text{Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang Beroperasi} + \text{Jumlah Terminal Barang Umum yang beroperasi} \end{aligned}$$

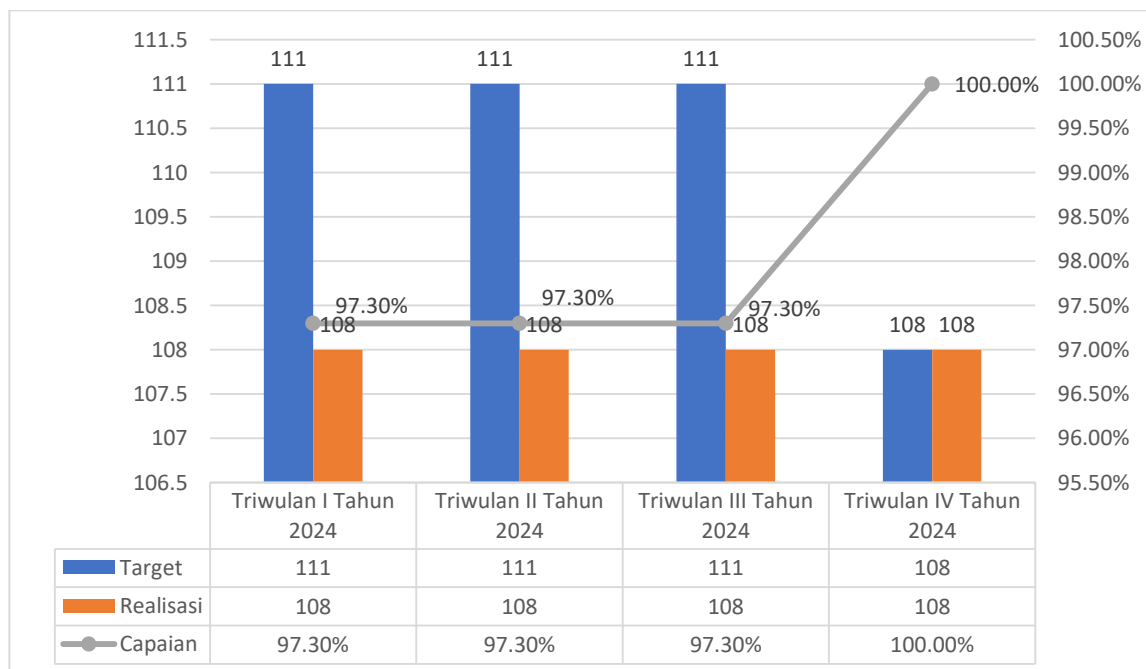
Keterangan :

* TTA = Terminal Tipe A

TB = Terminal Barang

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2024 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2024 sebesar 108 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3**. Grafik Capaian IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.



Gambar III. 6 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia dan KM 100 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) terminal dengan rincian eksisting sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

1. 113 (seratus tiga belas) Terminal Penumpang Tipe A telah serah terima operasional yang menjadi kewenangan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - a. 108 Terminal Penumpang Tipe A telah beroperasi
 - b. 6 Terminal Penumpang Tipe A belum beroperasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dua (2) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan dan revitalisasi yaitu:
 - a). Terminal Demak (Jawa Tengah);
 - b). Terminal Air Sebakul (Bengkulu).
- 2) Satu (1) Terminal Penumpang Tipe A belum dibangun (Terminal Singkawang, Kalimantan Barat);
- 3) Satu (1) Terminal Penumpang Tipe A kondisi bangunannya kurang terawat dan sedang dilakukan studi KPBU untuk pemanfaatan aset terminal tanpa menghilangkan fungsi pelayanan terminal (Terminal Betan Subing, Provinsi Lampung);
- 4) Satu (1) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala mekanisme serah-terima aset dengan Pemerintah Daerah (Terminal Bangkalan, Jawa Timur).
2. Empat (4) Terminal Penumpang Tipe A menjadi kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan telah beroperasi (Terminal Pondok Cabe, Terminal Poris Plawad, Terminal Baranangsiang, Terminal Jatijajar);
3. Dua (2) Terminal Penumpang Tipe A menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan telah beroperasi (Terminal Kalideres dan Terminal Kampung Rambutan);
4. Delapan (8) Terminal Penumpang Tipe A belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota serta Perusahaan Daerah (Terminal Padang Bulan, Terminal Gerbangsari, Terminal Induk Bekasi, Terminal Kalijaya Cikarang, Terminal Cicaheum, Terminal Sri Tanjung, Terminal Osowilangun, Terminal Daya).

Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua;

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)
3. Aruk di Kalimantan Barat;
4. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
5. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
6. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
7. Wini di Nusa Tenggara Timur;

Rincian dari 7 (tujuh) Terminal Barang Untuk Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Untuk Umum yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020, dengan kondisi tahun 2021 sudah ada operasional internal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan tetapi belum ada pelayanan terhadap kendaraan barang baik kendaraan barang domestik maupun kendaraan barang internasional. Adapun kendala/masalah yang masih dihadapi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong adalah sebagai berikut:
 - a) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, agar bisa ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS), harus ada badan usaha pengelola TPS. Proses penetapan pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) masih terkendala sertifikat lahan yang belum selesai diproses.
 - b) Proses sertifikat lahan di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sanggau dilakukan dalam beberapa tahap, saat ini telah selesai tahap 1 dengan terbitnya sertifikat a.n. Kementerian Perhubungan seluas 30.820 m² yang belum mencakup kelesuruhan dari tanah yang dimohonkan. Tahap 2 akan dilakukan pendaftaran hak atas tanah setelah hasil sidang sengketa keluar dan diketahui titik batasnya.
 - c) Dalam rangka persiapan operasional TBI sedang diajukan beberapa permohonan antara lain permohonan ulang Penetapan Kawasan Pabean kepada Menteri Keuangan, permohonan spesifikasi teknis alat pemindai barang untuk keperluan operasional ekspor-impor dan permohonan persetujuan sewa BMN kepada Kepala KPKNL Pontianak.
 - d) Beberapa kendala yang dihadapi terkait operasional antara lain belum lengkapnya fasilitas penunjang, SDM dan kompetensi personil, belum adanya pengaturan sirkulasi lalu lintas angkutan barang, belum terbangunnya jalur khusus (dedicated lane) menuju perbatasan dan belum tersusunnya SOP angkutan barang lintas batas negara.
2. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Untuk Umum yang baru selesai proses pengadaan lahan untuk pembangunan jalur khusus (dedicated lane) pada Tahun Anggaran 2024 yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain di Nusa Tenggara Timur.
3. Terdapat 3 (tiga) Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai proses pembangunannya dan masih dalam proses persiapan pengoperasian yaitu:
 - a. Terminal Barang Internasional (TBI) Skouw di Papua;
 - b. Terminal Barang Internasional (TBI) Nanga Badau di Kalimantan Barat;
 - c. Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk di Kalimantan Barat.
4. Terdapat 2 (dua) Terminal Barang Untuk Umum yang masih dalam proses pembangunan lanjutan, yaitu:
 - a. Terminal Barang Internasional (TBI) Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
 - b. Terminal Barang Internasional (TBI) Wini di Nusa Tenggara Timur.

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2024 yang semula sebanyak 111 lokasi, berubah menjadi 108 lokasi karena pada awal Tahun 2024 belum ada penambahan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang baru yang beroperasi.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan terhadap kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Tahun 2024 yaitu:

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:

1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi Tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 menjadi 107 Terminal untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum.
2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service.
3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum yaitu:

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/*demand* yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi *Immigration, Customs, Quarantine and Security* (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

- **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Penumpang Tipe A** antara lain:

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A.
2. Terdapat *backlog* kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan.

3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Barang Umum** antara lain (3 point):

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat *backlog* kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi merupakan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga: *Jumlah Terminal Penumpang Tipe A + Jumlah Terminal Barang Umum yang beroperasi (sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)*

$$= 107 + 1$$

$$= 108 \text{ lokasi}$$

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Tahun 2024 terhadap target Revisi II PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{108}{108} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang adalah sebagai berikut:

Tabel III. 7 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi										
IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Rp500.000.000,00	Rp1.144.874.000	Rp0,00	0%	Rp0,00	0%	Rp0,00	0%	Rp649.445.730	56,73%
1. Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan;										
2. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan.										

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

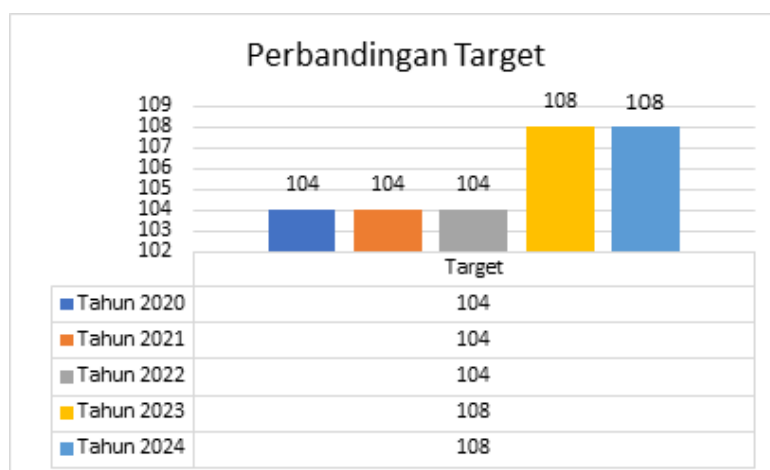
1. Melakukan percepatan pengawasan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

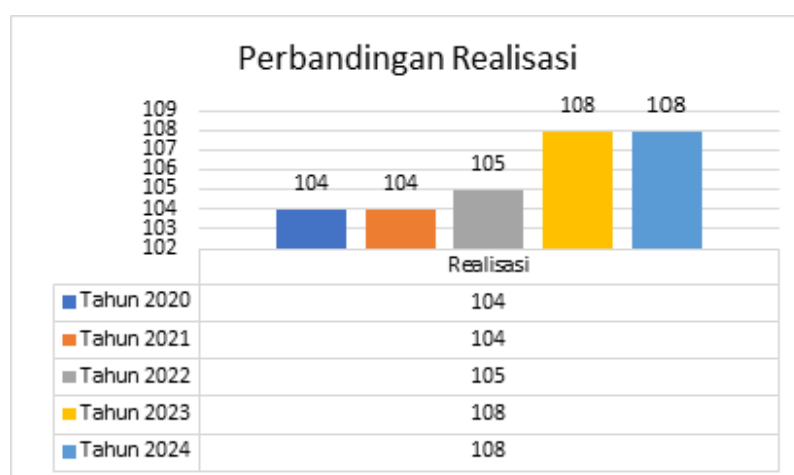
Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2024 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 108 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2023 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun benchmark sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi sebesar 105 lokasi dengan target 104 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,96%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 104 dengan target 104 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 104 dengan target 104 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3 dari tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 4 dari tahun 2021 dan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2020 dan 2021

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 2	104	104	100%	Tetap
2	2021	IKK 2	104	104	100%	Tetap
3	2022	IKK 2	104	105	100,96%	Naik
4	2023	IKK 2	108	108	100%	Tetap
5	2024	IKK 2	108	108	100%	Tetap



Gambar III. 7 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020



Gambar III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

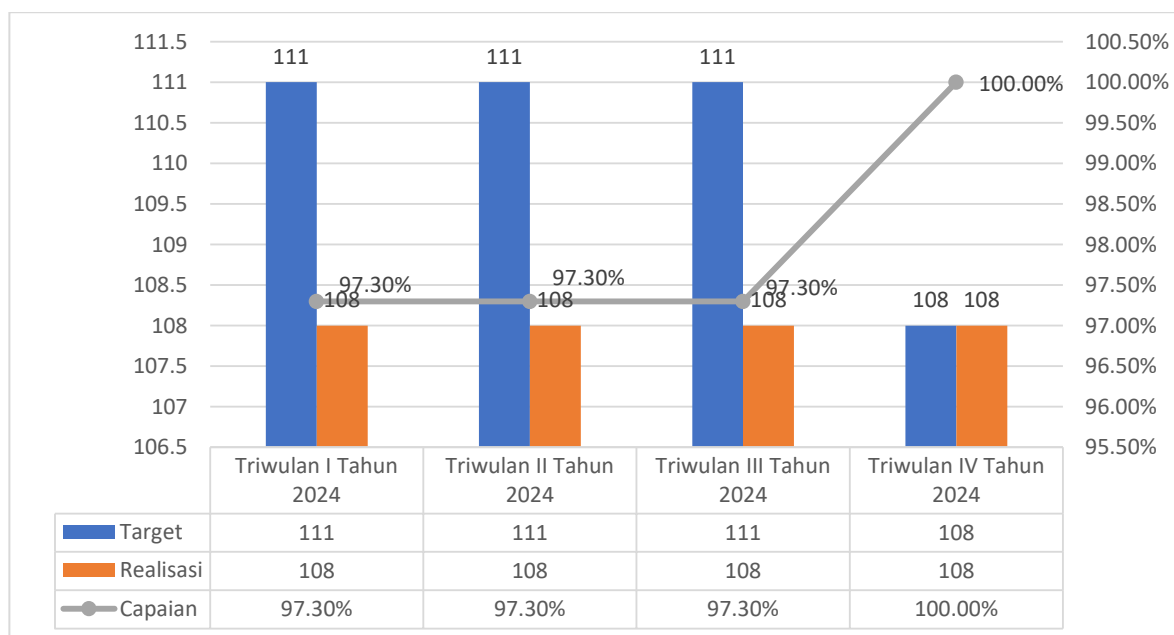


Gambar III. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Capaian Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2024 merupakan komitmen terhadap pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang Umum yang sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga realisasi Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2024 adalah 108 lokasi atau capaian kinerjanya turun yaitu 100%, dibanding dengan capaian pada tahun 2023 adalah 108 lokasi atau capaian kinerjanya tetap yaitu 100%. Dibanding dengan capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 100,96% dimana target pada Tahun 2023 naik dari 105 lokasi menjadi 108 lokasi.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2024 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 108 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.4**.



Gambar III.10 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi)

a.7. Benchmark Internasional

Benchmark Internasional untuk Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi menggunakan data dari negara India. Di India, Terminal Tipe A atau terminal yang melayani trayek antar provinsi (negara bagian dan union territories) disebut sebagai Inter-State Bus Terminal (ISBT). Sama seperti Terminal Tipe A di Indonesia, ISBT juga melayani trayek dalam provinsi (negara bagian). Terdapat 62 ISBT yang berlokasi di 18 negara bagian dari total 28 negara bagian dan 8 union territories (36 daerah setingkat provinsi). Sebagai perbandingan,

jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berjumlah 107 yang berlokasi di 28 dari total 38 provinsi di Indonesia.

III.2.2.3 IKK 3 *Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda*

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 9 Capaian Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda				Satuan: Lokasi
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	13	13	13	13	
Realisasi	12	12	13	13	
Capaian	92,31%	92,31%	100,00%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;

29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Mamasena;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

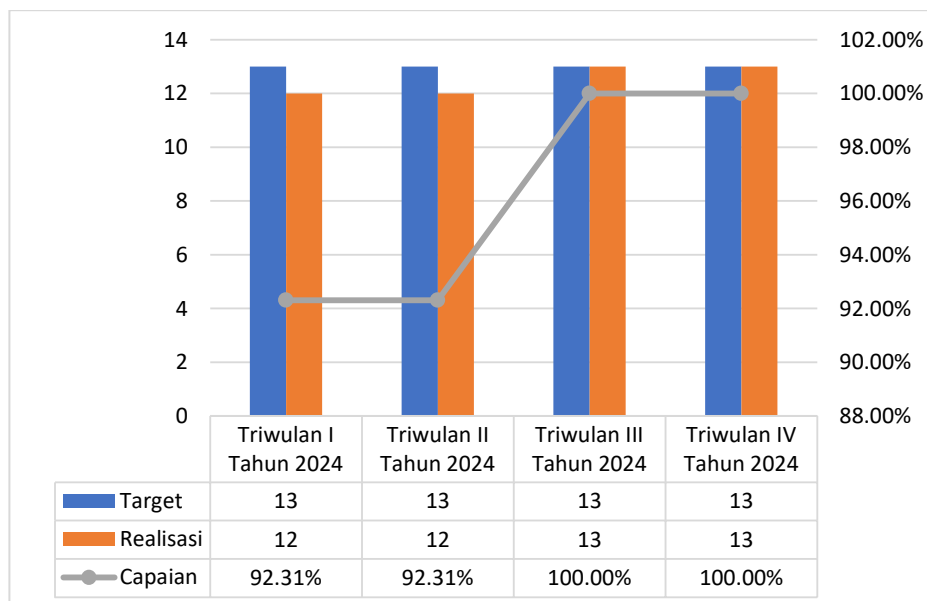
Untuk menghitung IKK Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda} \\ = \text{Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda yang sudah terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th ke n}$$

Berdasarkan nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada Lampiran I Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, terdapat kesalahan/ ketidaksesuaian penulisan nomenklatur dimana indikator Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda memiliki satuan lokasi.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 sebesar 13 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 13 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5**. Grafik Capaian IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.



Gambar III. 11 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada Tahun 2024 yang semula sebanyak 20 lokasi, berubah menjadi 13 lokasi karena sesuai dengan DIPA TA 2024, belum ada penambahan terkait penyediaan fasilitas pendukung & integrasi moda.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan tahun 2024 ada sebanyak 13 lokasi.

Penyediaan fasilitas pendukung sudah terealisasi di 13 (tiga belas) lokasi, antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru;
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar.
13. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Lesung.

Berdasarkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 13 (tiga belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung, terdapat 13 (tiga belas) lokasi.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai pada tahun 2024 yaitu :

1. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan event MotoGP dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung Tahun 2024 sebanyak 13 lokasi, dapat terealisasi sebanyak 13 (tiga belas) lokasi, yaitu Mandalika, Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Denpasar dan Tanjung Lesung. Penambahan realisasi ada pada akhir tahun 2022, yaitu adanya penambahan pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo. Sehingga dari 13 (tiga belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah terealisasi sebanyak 13 (tiga belas) lokasi yang berada di 8 Kawasan Strategis Nasional;
4. Penentuan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
5. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda** antara lain:

1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda merupakan Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang telah terbangun di wilayah kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung IKK Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sehingga: } \text{Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung \& Integrasi Moda} = \frac{\text{Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th 2023}}{13 \text{ lokasi}}$$

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2024 terhadap target Revisi II PK Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{13}{13} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 10 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi										
IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Rp432.896.000,00	Rp672.512.000	Rp178.734.217,00	41,29%	Rp205.765.199,00	47,53%	Rp230.767.193,00	53,31%	Rp652.395.408	97,01%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

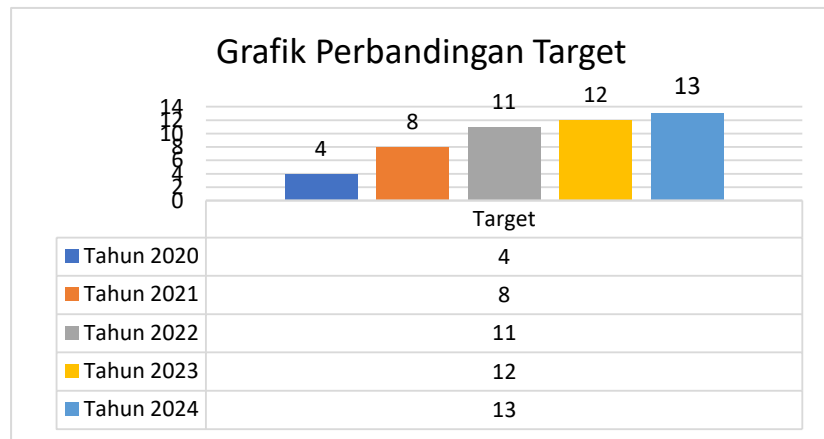
1. Melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada lokasi yang sudah menjadi target pembangunan pada renstra;
2. Meningkatkan kegiatan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

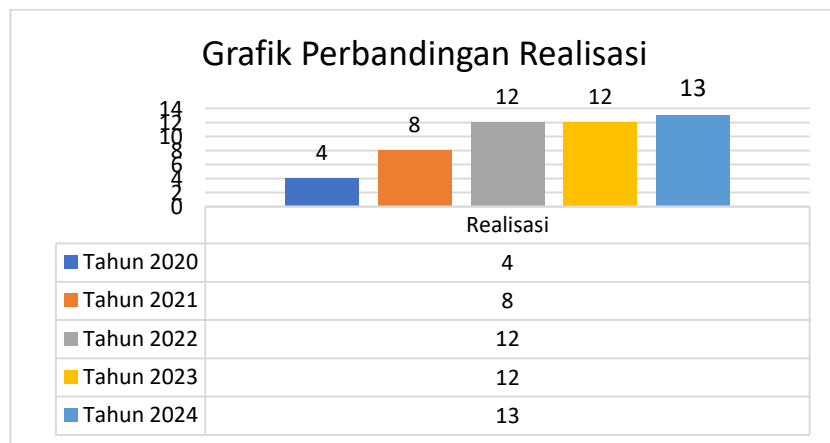
Realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2024 sebesar 13 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 13 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2023 sebesar 12 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 12 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sebesar 12 dengan target 11 maka capaian kinerja mencapai 109,09%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 8 dengan target 8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 4 dengan target 4 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2023 tetap apabila dibandingkan dengan tahun 2022, namun mengalami kenaikan sebesar 4 dari tahun 2021 serta mengalami kenaikan sebesar 8 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

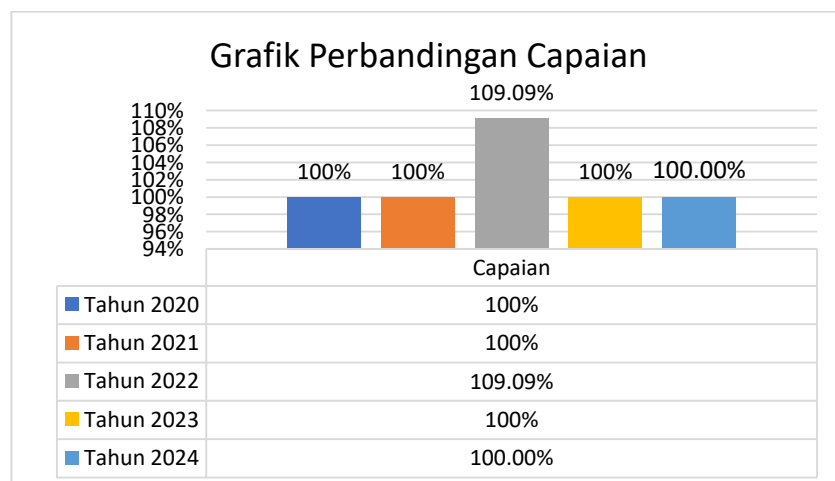
SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 3	4	4	100,00%	Tetap
2	2021	IKK 3	8	8	100,00%	Tetap
3	2022	IKK 3	11	12	109,09%	Naik
4	2023	IKK 3	12	12	100,00%	Tetap
5	2024	IKK 3	13	13	100,00%	Tetap



Gambar III. 12 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020



Gambar III. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

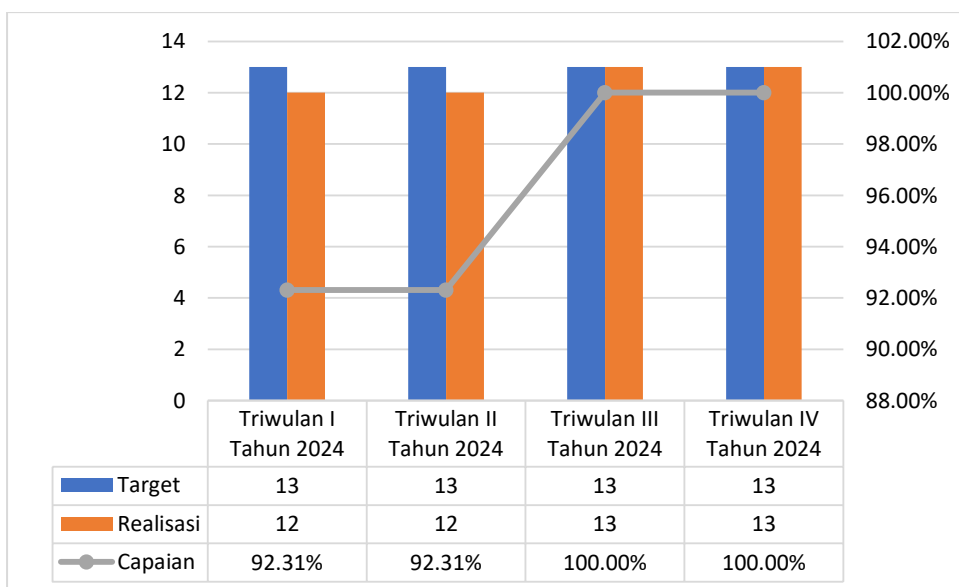


Gambar III. 14 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Capaian Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga realisasi Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2024 adalah 13 atau capaian kinerjanya tetap sebesar 100%. Sehingga realisasi Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2023 adalah 12 atau capaian kinerjanya turun sebesar 100% dari capaian pada tahun 2022, dan capaian tetap dibanding dengan capaian pada tahun 2021 dan 2020 yaitu sebesar 100%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2024 sebesar 13 lokasi jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 13 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5**.



Gambar III.15 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2024)

a.7. Benchmark Nasional

Benchmark nasional untuk Persentase Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda menggunakan data dari BPTJ pada tahun 2024. Di BPTJ, penyediaan halte untuk melayani operasional angkutan perkotaan Bis Kita Trans Pakuan. Sama seperti Halte di wilayah KSPN yang disediakan untuk melayani angkutan umum yang ada disekitar wilayah tersebut. Terdapat 67 fasilitas pendukung dan integrasi moda berupa halte permanen, portable dan bus stop yang berlokasi di wilayah operasional Trans Pakuan. Sebagai perbandingan, jumlah halte di wilayah KSPN yang telah disediakan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berjumlah 24 yang tersebar di 2 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

III.2.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

• Uraian Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

Tabel III. 13 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat							
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,5				
		Target		81,50	81,50	81,50	96,34
		Realisasi		95,6	96,72	96,34	96,34
		Capaian		117,30%	118,67%	118,21%	100%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75				
		Target		53,75	53,75	53,75	62,27
		Realisasi		60,56	60,6	60,56	62,27
		Capaian		112,67%	112,74%	112,67%	100%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75				
		Target		81,75	81,75	81,75	82,44
		Realisasi		82,44	82,44	82,44	82,44
		Capaian		100,84%	100,84%	100,84%	100%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.
2. IKK 2. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A
3. IKK 3. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

III.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 14 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A				Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	81,50	81,50	81,50	96,34	
Realisasi	95,60	96,72	96,17	96,34	
Capaian	117,30%	118,67%	118,21%	100%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi *Case Management System* IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah keewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui *barcode* ataupun *link* survey yang berbeda-beda setiap terminalnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai capaian kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh publik dimana nilai capaian / Indeks Kepuasan dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Survei yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi darat adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik transportasi darat, melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal TipeA.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Tipe A menggunakan Proses perumusan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

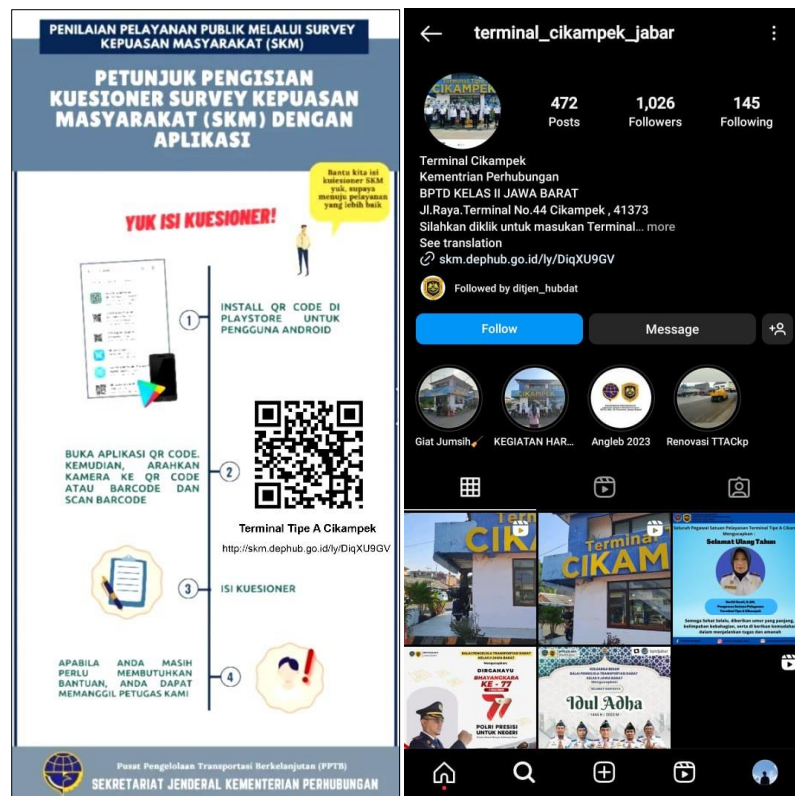
1. Aspek Penilaian

Penilaian publik atas penyelenggaraan transportasi darat melalui aplikasi 3A IPK-IKM atau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat diakses melalui www.skm.dephub.go.id. Unsur penilaian SKM meliputi:

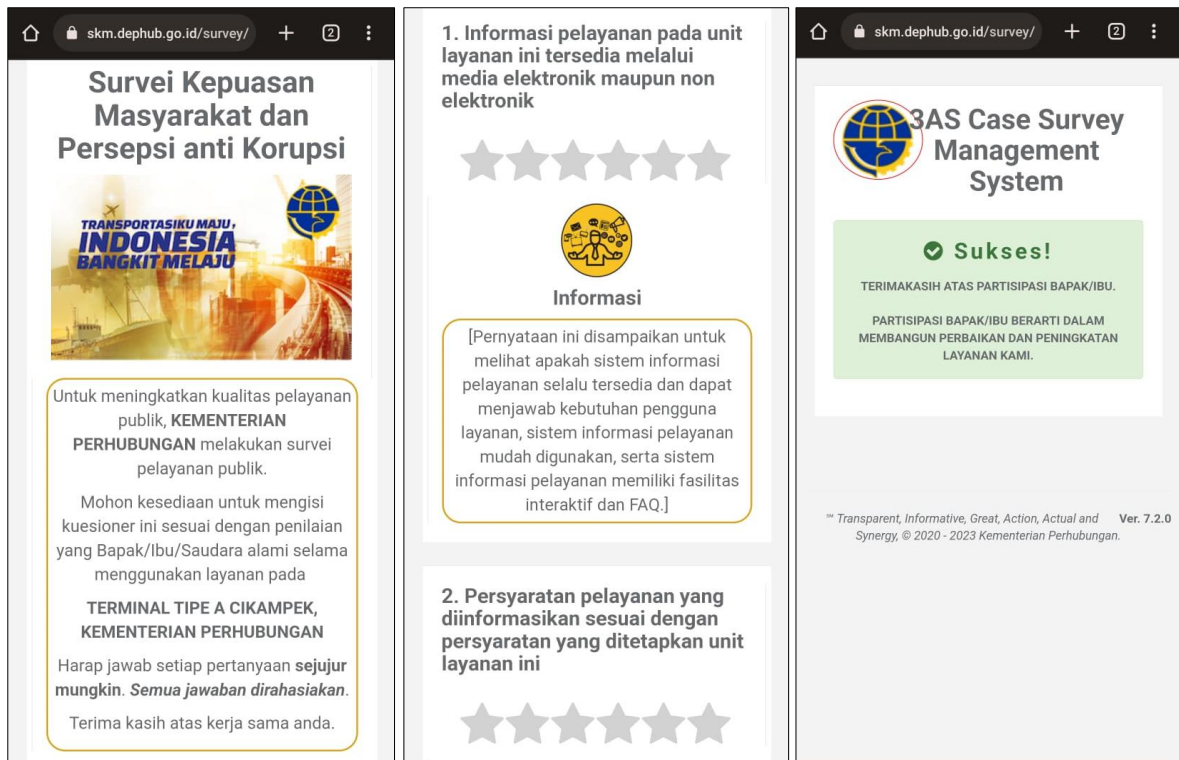
- 1) Persyaratan, Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 4) Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 5) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

- 6) Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 7) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- 8) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- 9) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 10) Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-*display* melalui poster dan/atau banner ataupun melalui *link* yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal.



Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan *rating* dari 1 sampai 6, dengan *rating* 6 berarti paling memuaskan dan *rating* 1 paling tidak memuaskan.



Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar sebagai admin.

The image shows the login page for the 3AS Case Survey Management System. The page includes fields for Username, Password, and Captcha, along with a 'Masuk' button and links for 'Lupa Password?' and 'Registrasi Akun'.

2. Pembobotan Nilai

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan sebagai berikut:

Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan;
2. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel III.15 Nilai Resepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Keterangan Tabel : Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

3. Parameter

Pada tahun 2023 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan aplikasi 3A IPK-IKM dengan rumus hitung dan unsurnya sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Aplikasi 3A ditujukan untuk melakukan survei cepat penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan asumsi penentuan target yang merujuk pada target sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 menggunakan asumsi dari pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan;
2. Pada tahun 2023 menggunakan asumsi telah dilaksanakan reviu dokumen Standar Pelayanan dan Penerapan SPBE;
3. Pada tahun 2023 menggunakan asumsi pelaksanaan implementasi Road Map TIK untuk pelayanan; dan
4. Pada tahun 2024 menggunakan asumsi dari optimalisasi pelayanan pada penerapan SPBE.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Layanan dan dilakukan oleh Para Pengguna Layanan.

4. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan** atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\{\lambda^2 . N . P . Q\}}{\{d^2(N - 1) + \lambda^2 . P . Q\}}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

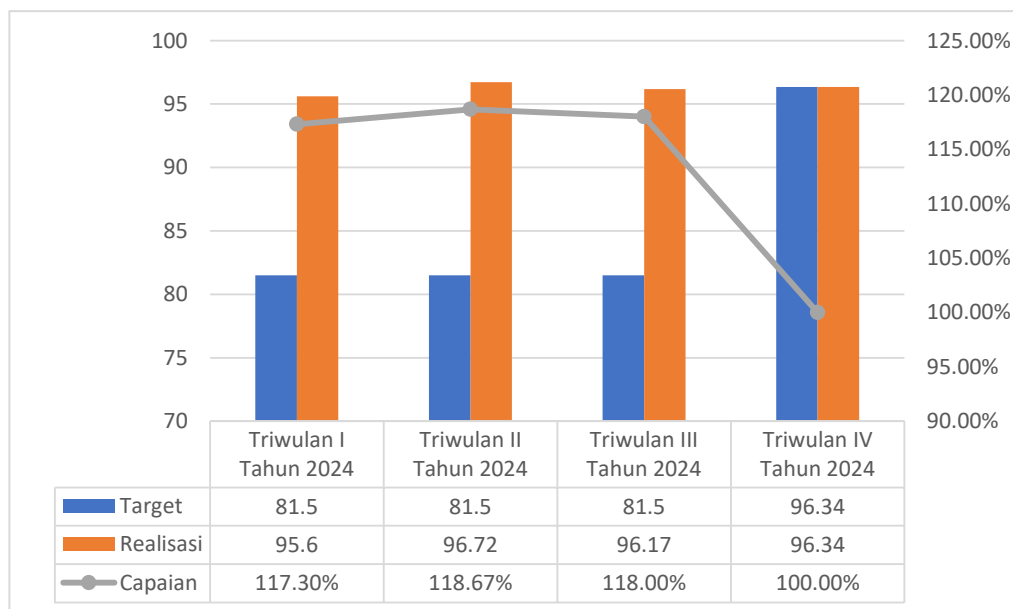
N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A pada Tahun 2024 sebesar 96,34% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2024 sebesar 96,34% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.6**. Grafik Capaian IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.



Gambar III. 16 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area peningkatan pelayanan publik tahun 2024, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan survey pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Satuan Pelayanan Terminal Tipe A dengan menggunakan Aplikasi. Survey tersebut dilaksanakan untuk mengukur Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penggunajasa / stakeholders pada unit layanan Ditjen Perhubungan Darat yang mengacu pada kepada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe A memiliki target pada tahun 2024 sebesar 81,50 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

Pada Tahun 2024 pelaksanaan SKM masih menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi 3A IPK-IKM dan masih berfokus pada pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dimaksud kepada petugas layanan dan target Survei itu sendiri yaitu seluruh pengguna layanan. sehingga masih banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi pemahaman petugas pelaksana layanan maupun dari sisi pemahaman pengguna jasa yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Terminal Tipe A Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 sudah mencapai 96,34.

Perolehan capaian nilai 96,34 merupakan hasil konversi dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM terhadap range nilai yang terdapat pada Aplikasi 3A IPK-IKM, tabel range dimaksud sebagai berikut:

Capaian Nilai 96,34 diperoleh dari :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 96,34

$$\frac{\text{Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terminal a+ Nilai IKM Terminal.....n}}{\text{Jumlah Terminal yang melakukan survey pada bulan ke-n}}$$

$$\frac{6455,10}{67} = 96,34\%$$

Capaian 96,34 bila disesuaikan pada tabel range akan diperoleh predikat kinerja unit pelayanan pada tingkat Sangat baik.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana;
2. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;
3. Meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Terminal Tipe A tahun 2024 menjadi 96,34;
4. Tersedianya Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

Dalam mencapai kinerja pelayanan Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, yang selama tahun 2024 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan pada unit pelayanan publik sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis maupun administratif yang dianggap belum memudahkan para pengguna layanan;
2. Prosedur yang dianggap tidak mudah untuk diikuti oleh pengguna layanan;
3. Layanan pengaduan yang masih belum tersedia;
4. Masih terdapat banyak satuan pelaksana yang belum melakukan survey IKM, sehingga hasil rekapitulasi yang diperoleh tidak maksimal.
5. Masih didapati pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik salah satunya yaitu belum mendapatkan informasi secara lengkap terkait prosedur layanan serta petugas pelaksana belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman secara lengkap terkait prosedur layanan serta penerapan pelaksanaan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2023 yang diisi oleh koresponden pada satuan pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi, melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh hasil rekapitulasi rata-rata nilai IKM pada tahun 2024 sebesar 96,34%.

Sehingga:

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 96,34%

$$IKK_n = \frac{\sum IKM_{T1} + IKM_{T2} + \dots + IKM_{Tn}}{n}$$

$$IKK_n = \frac{\text{Nilai IKM Terminal 1} + \text{Nilai IKM Terminal 2} + \text{Nilai IKM Terminal} \dots n}{\text{Jumlah Terminal yang melakukan survey pada bulan ke-}n}$$

$$\frac{6455,10}{67} = 96,34\%$$

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada tahun 2024 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{96,34}{96,34} \times 100\% = 100\%$$

Dengan adanya penyesuaian peningkatan target awal yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa target dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A adalah melalui Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A dengan anggaran senilai Rp0,00 dengan realisasi hingga akhir Tahun 2024 senilai Rp0,00 dikarenakan untuk IKK Indeks Kepuasan Masyarakat masih belum dianggarkan, karena untuk kegiatannya yaitu melakukan rekapitulasi hasil survey kinerja pelayanan melalui Aplikasi 3A IPK-IKM.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A agar secara rutin melakukan survey IKM dengan melakukan survey koresponden melalui Aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah disediakan dengan cara mengisi kuesioner melalui link dan scan QRcode yang telah disediakan;
2. Seluruh satpel Terminal Tipe A dapat melakukan survey koresponden secara rutin sehingga dapat mengetahui kondisi secara keseluruhan hasil dari survey IKM tersebut;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;
4. Berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) saat ada kendala terkait aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 96,34 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 96,34 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2023 sebesar 94,61 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 81,00 maka

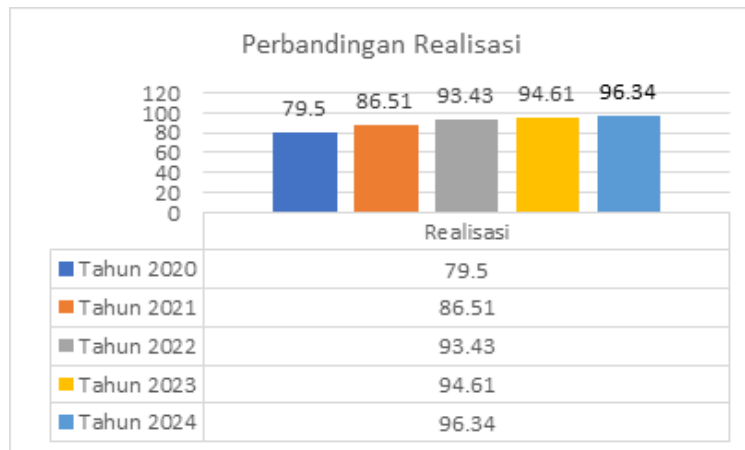
capaian kinerja mencapai 116,80% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A sebesar 93,43 dengan target 80,50 maka capaian kinerja mencapai 116,06%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A sebesar 86,51 dengan target 80,00 maka capaian kinerja mencapai 108,14%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 79,50 dengan target 79,50 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,18 dari tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 8,1 dari tahun 2021, serta sebesar 15,11 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

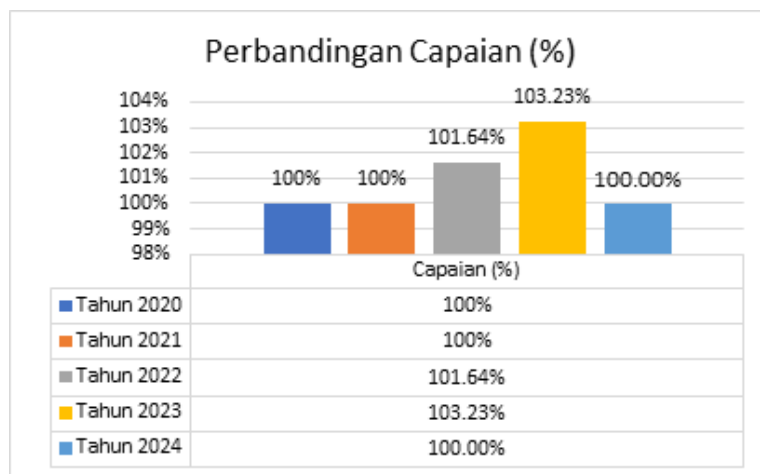
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	79,50	79,50	100,00%	Naik
2	2021	IKK 1	80,00	86,51	108,14%	Naik
3	2022	IKK 1	80,50	93,43	116,06%	Naik
4	2023	IKK 1	81,00	94,61	116,80%	Naik
5	2024	IKK 1	96,34	96,34	100,00	Tetap



Gambar III.17 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020



Gambar III. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020



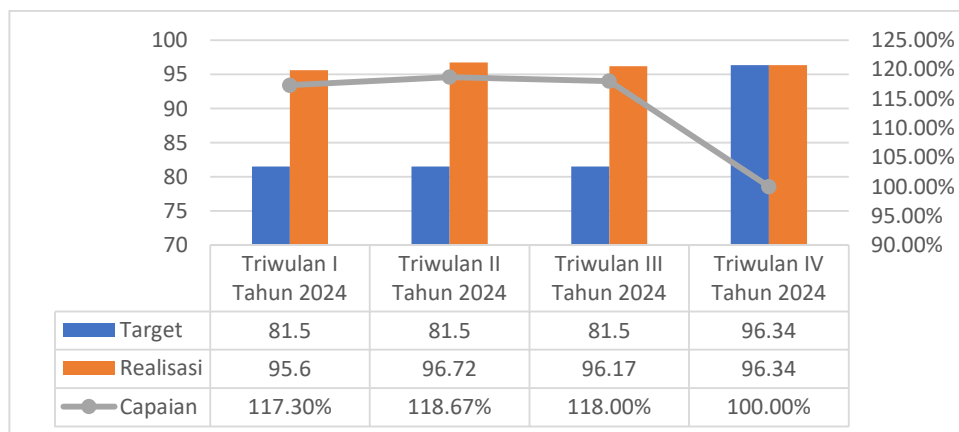
Gambar III. 19 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024 adalah 96,34 atau capaian kinerjanya tetap sebesar 100,00%. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2023 adalah 94,61 atau capaian kinerjanya naik sebesar 116,80%, dibanding dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 116,06%, tahun 2021 sebesar 108,14% dan 2020 yaitu sebesar 100%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 96,34 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana

Transportasi Jalan 2024 sebesar 96,34 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7**.



Gambar III.20 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024)

a.7. Benchmark Internasional

Benchmark Internasional untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A menggunakan data dari negara Inggris (England). Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna bus tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Transport Focus dengan judul *Your Bus Journey* pada tanggal 25 Maret 2025 dimana suvey dilakukan terhadap 48.000 perjalanan, secara keseluruhan tingkat kepuasan pengguna bus di Inggris mencapai 83%, naik dibanding tahun 2023 yaitu 80%. Salah satu aspek penilaian yaitu kepuasan terhadap halte atau terminal mencapai tingkat kepuasan 79%, naik dibanding tahun 2023 sebesar 76%.

Sedangkan untuk level nasional dapat dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di empat lokasi Terminal Tipe A yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dimana pada tahun 2024 nilai IKM untuk keempat terminal tersebut mencapai 93,978%.

III.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 17 Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A				Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	53,75	53,75	53,75	62,27	
Realisasi	60,56	60,56	60,56	62,27	
Capaian	112,67%	112,67%	112,67%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya.

Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal

1. Pelayanan Keselamatan;
2. Pelayanan Keamanan;
3. Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
4. Pelayanan Kenyamanan;
5. Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan;
6. Pelayanan Kesenjajaran.

Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara *online* dengan menyebar kuisioner *google form* ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

The image shows a WhatsApp chat interface on the left and a Google Form on the right. The chat is titled 'Koordinasi Terminal Tipe A d...' and contains several messages from 'TAJ Bu Fitriyani' and other contacts. The Google Form is titled 'Kesesuaian Terminal Penumpang Tipe A terhadap SPM Perhubungan Tahun 2023' and is a survey form for the suitability of Type A passenger terminals against SPM standards for the year 2023. The form includes fields for email, terminal name, and a dropdown menu for terminal type.

WhatsApp Chat:

- TAJ Bu Fitriyani: terima kasih ya temen2 sdh lakukan pginputan d tos...sesuai arahan pimpinan tetap konsisten ya u mginput d TOS..
- Siap buk
- TAJ Bu Fitriyani: Selamat siang senior2 korszpel mohon izin dpt melakukan pgisian form spm terminal yg km share ini...km melakukan update data kembali km banyak terminal yg sdh mgalami prubahan pd saspras yg ada dterminal...mohon kiranya data yg d isi sesuai real diapangan ya...mnta tolg ya senior
- TAJ Bu Fitriyani: Selamat siang senior2 korszpel mohon izin dpt melakukan pgisian form spm terminal yg km share ini...km melakukan update data kembali km bany..
- Siap ibu
- TAJ Bu Fitriyani: Yg isi cukup satu org aja ya..jangan sampe datanya dobel ya temen2..

Google Form:

Kesesuaian Terminal Penumpang Tipe A terhadap SPM Perhubungan Tahun 2023

Formulir kesesuaian SPM terminal yang akan digunakan sebagai database terminal.

Isi formulir berdasarkan PM 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan terminal penumpang tipe A.

Silahkan diisi sesuai dengan realisasi di lapangan.

alhafiqmuhammad@gmail.com [Switch account](#)

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Only the email you enter is part of your response.

* Indicates required question

Email *

Your email

Nama Terminal Penumpang Tipe A *

Choose

Nama *

Your answer

Pengisian kuisisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun *google drive* yang digunakan untuk membuat form kuesioner.

Data SPM Terminal Tipe A Tahun 2023 (Responses)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Timestamp	Score	Nama Terminal Penumpang Nama	Tanggal Survey	Lajur pejalan kaki yang n	Foto	Fasilitas keselamatan jal	Foto	Jalur Evakuasi	Foto	Alat Pemadam Ki	
2	1/19/2024 10:35:12	0 / 100	Terminal Air Sebakul	Edi azhari	1/19/2024	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	
3	1/19/2024 13:18:38	47 / 100	Terminal Alam Barajo	Rahmad, S.H (Wassatp	1/19/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
4	1/22/2024 15:30:49	98 / 100	Terminal Alang-Alang Lei alang		1/1/1999	Tersedia	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
5	1/19/2024 9:55:37	88 / 100	Terminal Amplas	FEBRIAN TRI VALENTIA	1/19/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tersedia	
6	1/19/2024 14:46:34	45 / 100	Terminal Anak Air	Terminal Tipe A Anak Air	1/19/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
7	1/22/2024 19:16:24	38 / 100	Terminal Arjasa	Maria Margareta	1/22/2024	Tidak Tersedia	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
8	1/22/2024 14:18:47	41 / 100	Terminal Arya Wirajaya	Handoko Imran Hanafi S.	1/22/2024	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
9	1/19/2024 13:56:45	42 / 100	Terminal Bangsa Bangut	SUNARDI, S.E	1/19/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	
10	1/23/2024 19:55:11	67 / 100	Terminal Bangkinang	TERMINAL TIPE A BANI	1/23/2024	Tidak Tersedia	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
11	1/19/2024 16:26:28	47 / 100	Terminal Bangko	RUDYANTO	1/19/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
12	1/23/2024 10:23:38	69 / 100	Terminal Banyuwangi	BUDI HARJO	1/22/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
13	1/20/2024 9:22:48	73 / 100	Terminal Baranangsiang	Muhammad Musyaddad S	1/20/2024	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
14	1/19/2024 12:20:14	33 / 100	Terminal Bareth Solok	IRWAN, SE	1/19/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
15	1/19/2024 14:47:05	52 / 100	Terminal Batoh	HERIYANTO, BA	1/19/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
16	1/22/2024 14:31:34	58 / 100	Terminal Batu Ampar	Sulis setawan	1/22/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	
17	1/19/2024 10:15:43	30 / 100	Terminal Batu Kuning	Ardinata, SE	1/19/2024	Tidak Tersedia	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	
18	1/19/2024 10:47:03	48 / 100	Terminal Bayan	IMRON, SH	1/19/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
19	1/29/2024 13:16:53	28 / 100	Terminal Betan Subing	TERMINAL TIPE A BETI	1/29/2024	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	
20	1/19/2024 11:28:50	44 / 100	Terminal Betung	Yudhi	1/19/2024	Tidak Tersedia	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	
21	1/19/2024 14:00:15	89 / 100	Terminal Bimoku	Deviana Natalia Sengko	1/19/2024	Tidak Tersedia	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
22	1/19/2024 10:39:15	25 / 100	Terminal Bobot Sari	SUROSO, S.Sos	1/19/2024	Tidak Tersedia	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	
23	1/22/2024 19:32:37	28 / 100	Terminal Bolaang Monge	ADMIN TERMINAL TIPE	1/22/2024	Tidak Tersedia	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
24	1/23/2024 7:56:21	60 / 100	Terminal Borko	KADEK BERLIAN ADI PI	1/23/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia	
25	1/23/2024 17:00:51	82 / 100	Terminal Bontol	UMMAH NUR	1/23/2024	Tersedia	https://drive.google.com/	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	
+ = Form Responses 1 Copy of Form Responses 1 Sheet1 Sheet2												

Tabel III.18 Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Matriks Penilaian (SPMT _n) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})		
1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.	2

	Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	
5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol)	2

	apabila tidak teratur.	
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang	2

	tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal		100

Sehingga :

SPM TTA

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

Note:

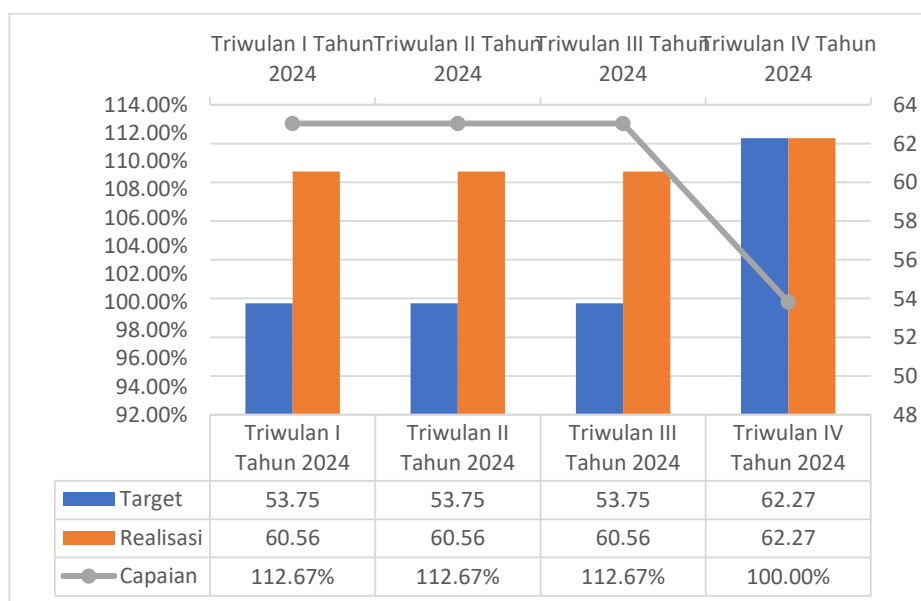
*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A sebesar 62,27% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2024 sebesar 62,27% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.8**. Grafik Capaian IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A.



Gambar III. 21 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dan Balai Pengelola Transportasi Darat telah melakukan revitalisasi terhadap Terminal Penumpang Tipe A sehingga mengakibatkan persentase SPM Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkat karena adanya penambahan dan perbaikan fasilitas umum dan penunjang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sebagai berikut:

Tabel III.19 Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Matriks Penilaian (SPM _{Tn}) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})		
1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai).	2

	Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2

8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1

12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPE PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal		100

• Narasi Kronologi Target

Target SPM di Terminal Penumpang Tipe A Tahun 2024 sebesar 53,75% dikarenakan Terminal Penumpang Tipe A pada mulanya merupakan Terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga kondisi Terminal berbeda-beda tergantung kemampuan daerah dalam mengelola dan merawat Terminalnya. Proses serah terima Terminal dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) dilaksanakan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, sehingga kondisi awal Terminal yang diterima oleh Kementerian Perhubungan pada Tahun 2019 yaitu 53,54% sesuai dengan realisasi capaian SPM Terminal yang ada dilapangan pada saat itu yang merupakan rata-rata nilai SPM dari Terminal yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Seluruh Indonesia yang menjadi data dasar/baseline dikarenakan target SPM yaitu pemerataan untuk Terminal di seluruh Indonesia supaya target bersifat realitis.

Dikarenakan jumlah Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia berjumlah cukup banyak (lebih dari 100 Terminal) sehingga dalam meningkatkan jumlah rata-rata SPM 1% saja membutuhkan usaha yang tidak mudah. Target Tahun 2024 adalah 53,75% jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yaitu sebesar 53,70% mengalami kenaikan 0,05% dikarenakan pada Tahun 2024 Terminal yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 111 Terminal sehingga untuk mencapai peningkatan rata-rata SPM di seluruh Indonesia sebesar 0,05% tersebut dibutuhkan beberapa Terminal untuk dilakukan rehabilitasi dalam 1 Tahun Anggaran untuk mencapai target tersebut.

Realisasi SPM Tahun 2024 adalah 62,27% dibandingkan Tahun 2023 dengan nilai 59,02% terdapat peningkatan sebesar 1,54%. Nilai persentase peningkatan tersebut terjadi dikarenakan terdapat kegiatan rehabilitasi/peningkatan Terminal Tahun Anggaran 2022 berjumlah 19 Terminal (Terminal Batoh, Terminal Lhokseumawe, Terminal Amplas, Terminal Tanjung Pinggir, Terminal Alang-Alang Lebar, Terminal Pakupatan, Terminal Banjar, Terminal Tingkir, Terminal Tegal, Terminal Bobotsari, Terminal Kebumen, Terminal Blitar, Terminal Tamanan, Terminal Kertonegoro, Terminal Samarinda Seberang, Terminal Puuwatu, Terminal Induk Lumpue, Terminal Isimu, Terminal Bolang Mongondow) dengan anggaran sebesar 12,86 Triliun. Dapat disimpulkan bahwa target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 0,05% sudah cukup menantang, dikarenakan kegiatan rehabilitasi/peningkatan terminal membutuhkan anggaran yang besar.

Terminal yang direhabilitasi atau ditingkatkan tidak dapat memenuhi SPM 100% dikarenakan anggaran yang disetujui bukanlah sesuai kebutuhan capaian SPM 100% terminal, akan tetapi target minimal operasi Terminal sehingga masih ada beberapa item fasilitas SPM yang masih belum dapat dipenuhi.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 62,27 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata;
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal melalui kegiatan *Excellent Service*;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, yang selama tahun 2024 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan sebagai berikut:

1. Terdapat backlog kegiatan, yang semula terencana menjadi tidak terlaksana;
2. Adanya kerusakan pada fasilitas fisik terminal karena kurang maksimalnya perawatan terminal;
3. Masih terdapat kekurangan SDM pada beberapa terminal.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 62,27% dengan target kinerja sebesar 62,27%.

Sehingga:

SPM TTA

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

$$realisasi = \frac{6663}{107} \times 100\% = 62,27 \% \dots \dots \dots \textbf{Lampiran 12}$$

Note:

*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

• **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{62,27}{62,27} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 adalah melalui :

Tabel III. 20 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat										
IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu: 1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan	Rp38.860.346.000	Rp37.564.004.000	Rp2. 129.113.367	5,48%	Rp7.200.749.197	18,83%	Rp19.451.944.300	50.96%	Rp34.071.795.689	90,70%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat										
Sistem Angkutan Umum Massal.										

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat.
2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

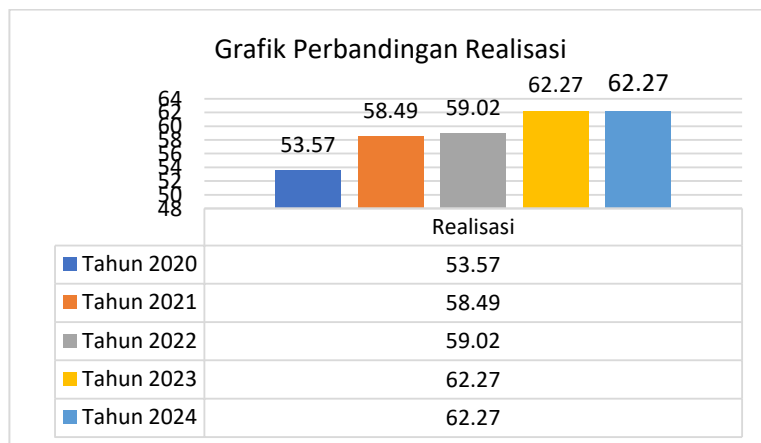
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 62,27% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 62,27% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 sebesar 60,56% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 53,7% maka capaian kinerja mencapai 112,77% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2022 sebesar 59,02% dengan target 53,65% maka capaian kinerja mencapai 110,01%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 58,49% dengan target 53,60% maka capaian kinerja mencapai 109,12%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 53,57% dengan target 53,57% maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 6,99% dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

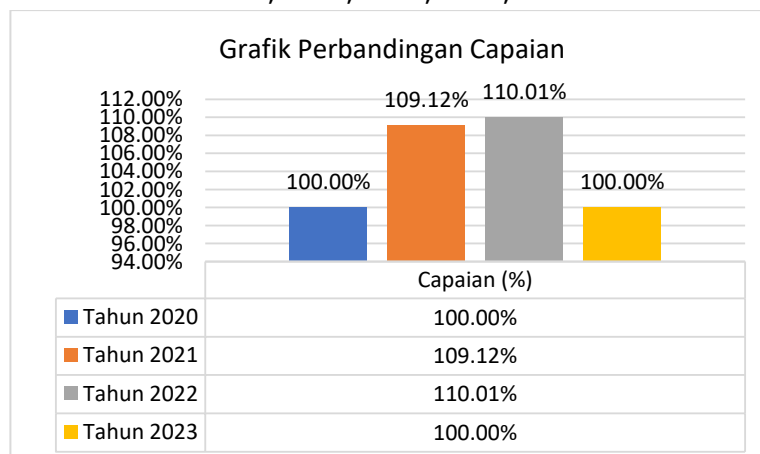
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 2	53,57	53,57	100,00%	Naik
2	2021	IKK 2	53,60	58,49	109,12%	Naik
3	2022	IKK 2	53,65	59,02	110,01%	Naik
4	2023	IKK 2	53,7	60,56	112,77%	Naik
5	2024	IKK 2	62,27	62,27	100,00%	Tetap



Gambar III.22 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020



Gambar III.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

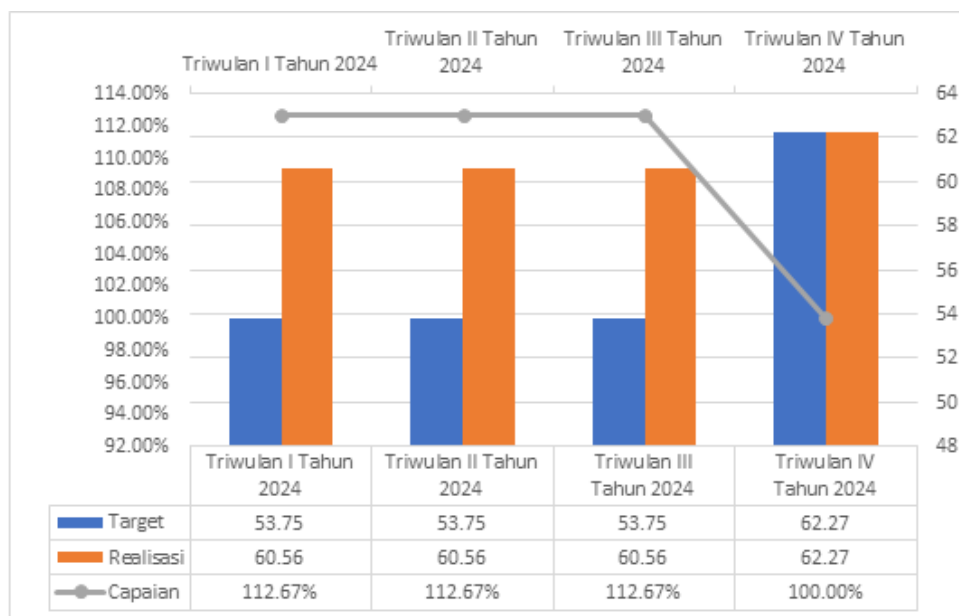


Gambar III.24 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 merupakan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 adalah 62,27% atau capaian kinerjanya tetap sebesar 100,00%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 adalah 60,56% atau capaian kinerjanya naik sebesar 112,77% dibanding dengan Tahun 2022 sebesar 110,01%, capaian pada tahun 2021 sebesar 109,12% dan 2020 yaitu sebesar 100%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 62,27 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 62,27 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.9**.



Gambar III.25 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024)

a.7. Benchmark Nasional

Benchmark untuk Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A menggunakan data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTJ Tahun 2024, persentase pemenuhan SPM Terminal Tipe A mencapai 78% dari target 83% sehingga capaian kinerja mencapai 93,98%. Sebagai perbandingan, Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 mencapai 62,27%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar (capaian 100%).

III.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 22 Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A				Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	81,75	81,75	81,75	82,44	
Realisasi	82,44	82,44	82,44	82,44	
Capaian	100,84%	100,84%	100,84%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi :

1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%;
2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%;
3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%.

Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui <https://siasati.dephub.go.id/> .

Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal

Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.

Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online Sytem adalah perbandingan jumlah terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Jumlah terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System didapatkan dari data produksi yang di-input oleh petugas pencatat data kedatangan dan keberangkatan (*checker*) di masing-masing satuan pelayanan terminal tipe A yang beroperasi. Apabila data produksi tersebut telah masuk ke sistem SIASATI dan/atau TOS maka terminal tersebut telah dihitung melaporkan data produksi.

Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate adalah perbandingan jumlah terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV adalah perbandingan jumlah terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

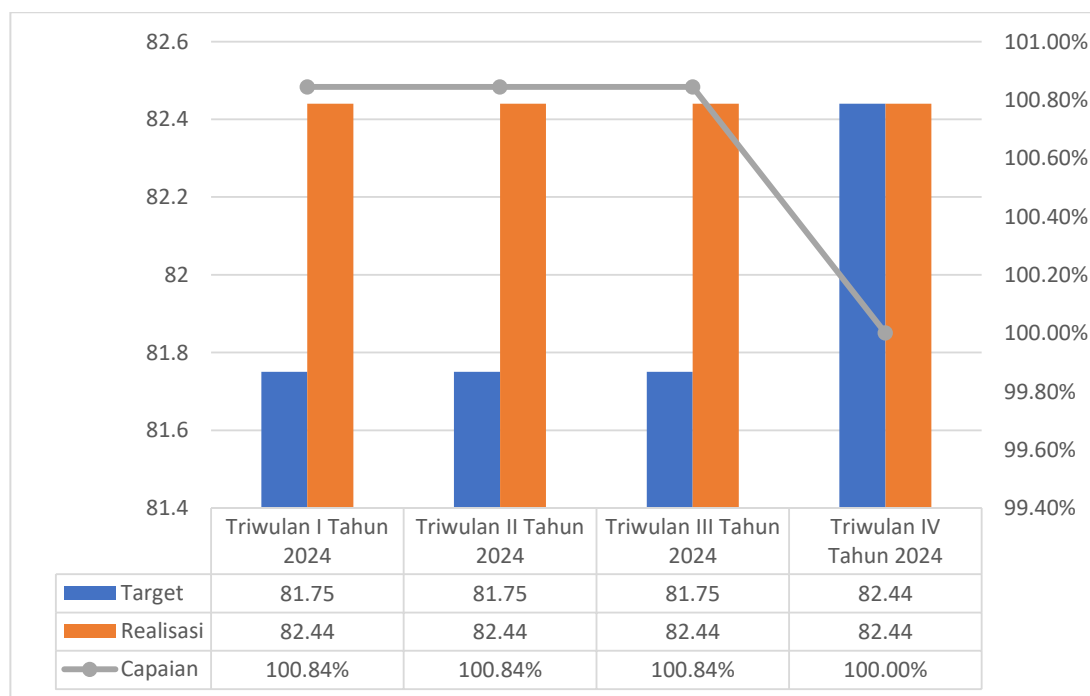
Pembobotan masing-masing data didasarkan pada rencana digitalisasi Terminal Penumpang Tipe A yang pada tahap awal akan lebih banyak berfokus pada pelaporan data produksi secara online melalui sistem yang telah dikembangkan yaitu SIASATI dan/atau Terminal Online System. Sedangkan untuk pemasangan mesin check in tiket dan passenger gate serta pemasangan vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV akan lebih banyak dilakukan pada digitalisasi tahap selanjutnya.

Untuk menghitung IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Penerapan\ Smart\ Terminal = \left[\frac{Jumlah\ TTA\ Yang\ Melaporkan\ Operasional\ Secara\ Online}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 74\% \right] + \left[\frac{Jumlah\ terminal\ dipasang\ mesin\ check\ in\ tiket\ dan\ passenger\ gate}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{Jumlah\ terminal\ dipasang\ vehicle\ gate,\ digital\ information,\ cctv}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 17,6\% \right]$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A sebesar 82,44% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2024 sebesar 82,44% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A).



Gambar III. 26 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan:

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9151 TAHUN 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3171 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Tahun 2024 memiliki target 82,44 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi :

1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A;
2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS);
3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor yang dapat menghambat dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi:

1. Adanya backlog kegiatan, yang semula terencana dalam Renstra tetapi menjadi tidak terlaksana;
2. Belum meratanya penerapan smart terminal pada Terminal Tipe A;
3. Masih kurangnya jumlah SDM yang mampu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait Smart Terminal maupun Terminal Online System (TOS).

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berikut adalah perhitungan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2023 :

$$\begin{aligned}
 \% \text{Penerapan Smart Terminal} &= \left[\frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \\
 &\quad \left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] \\
 &+ \\
 &\quad \left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right] \\
 &= \left[\frac{117}{107} \times 74\% \right] + \left[\frac{9}{107} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{5}{107} \times 17,6\% \right] \\
 &= 82,44\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Penerapan Smart Terminal dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Persentase dari Jumlah Terminal Tipe A Yang Melaporkan Operasional Secara Online dengan bobot 74%
2. Persentase dari Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate dengan bobot 8,4%
3. Persentase dari Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information dan CCTV dengan bobot 17,6%

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2024 terhadap target Revisi II PK Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{Capaian} = \frac{82,44}{82,44} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 23 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat										
IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Bimtek Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	Rp507.638.000	Rp594.931.000	Rp 193.505.740	38,12%	Rp 200.345.740	39,47%	Rp 254.205.700	42.70%	Rp594.930.700	100,00%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

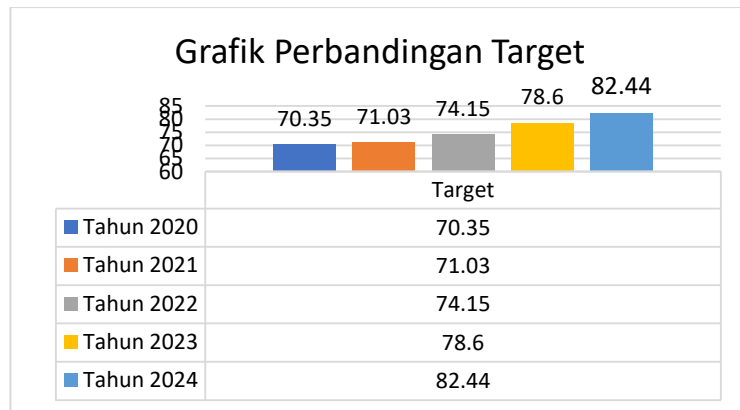
1. Melakukan mengoptimalkan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

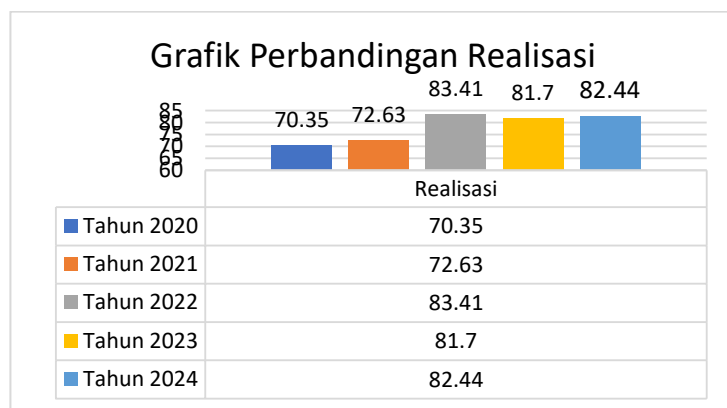
Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 82,44% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 82,44% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 81,75% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 78,60% maka capaian kinerja mencapai 104,01% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 83,41% dengan target 74,15% maka capaian kinerja mencapai 112,49%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 72,63% dengan target 71,03% maka capaian kinerja mencapai 102,25%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 70,35 dengan target 70,35 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,71 dari tahun 2022 namun mengalami kenaikan sebesar 9,07 dari tahun 2021 serta mengalami kenaikan 11,35 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

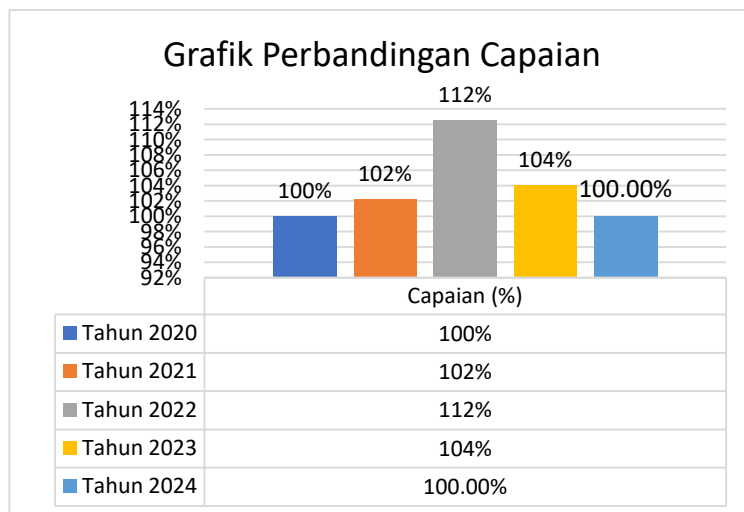
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 3	70,35	70,35	100,00%	Naik
2	2021	IKK 3	71,03	72,63	102,25%	Naik
3	2022	IKK 3	74,15	83,41	112,49%	Naik
4	2023	IKK 3	78,60	81,75	104,01%	Tetap
5	2024	IKK 3	82,44	82,44	100,00	Tetap



Gambar III. 27 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020



Gambar III. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

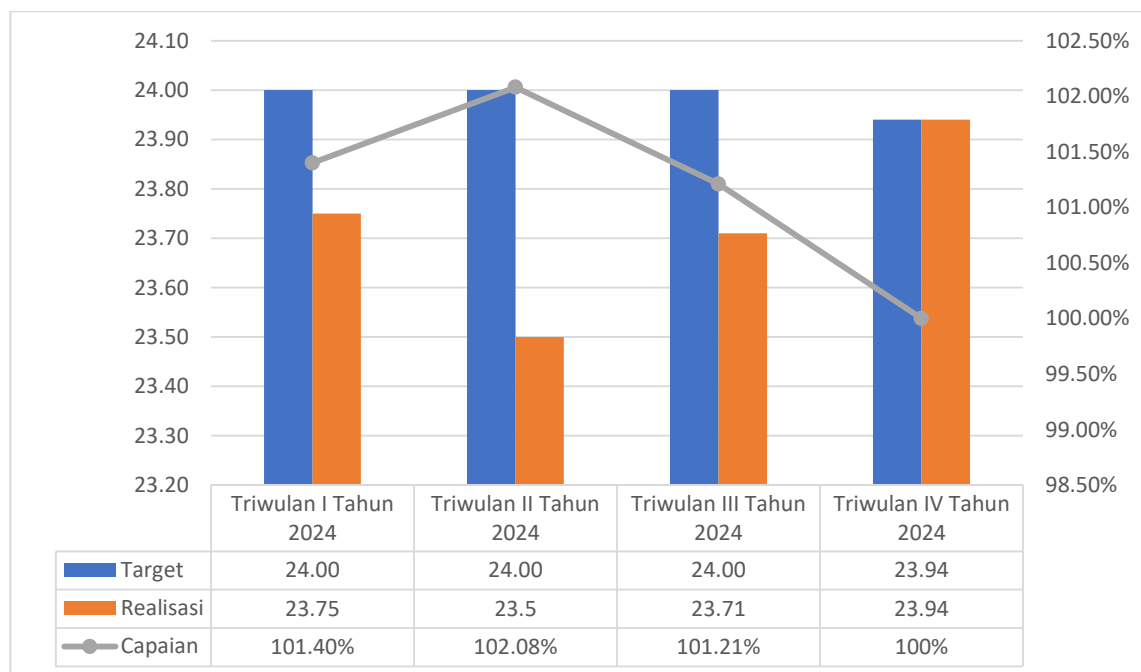


Gambar III. 29 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Penerapan SMART Terminal Tipe A yang sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga realisasi Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 adalah 82,44% atau capaian kinerjanya turun menjadi sebesar 100,00%. Realisasi Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2023 adalah 81,75% atau capaian kinerjanya turun menjadi sebesar 104,01%, dibanding dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 112,49%, tahun 2021 yaitu sebesar 102,25% dan tahun 2020 sebesar 100,00%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada tahun 2024 sebesar 82,44% jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 82,44% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.11**.



Gambar III.30 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada tahun 2024)

a.7. Benchmark Internasional

Benchmark untuk Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe A menggunakan data dari negara Korea Selatan. Korea Selatan telah menerapkan teknologi *Intelligent Transport System* (ITS) dan konsep *Smart Mobility*. Untuk mendukung konsep tersebut, Korea Selatan menjalankan beberapa program di antaranya *On Demand e-Bus Service* dan *Integrated Mobility Service*. *On Demand e-Bus Service* merupakan layanan reservasi bus via internet dan *smartphone* mulai dari proses pembayaran tiket hingga *boarding* secara *realtime*. *Integrated*

Mobility Service merupakan layanan reservasi dan pembayaran tiket terintegrasi dari berbagai layanan transportasi diantaranya taksi, *Bus Rapid Transit* (BRT), parkir, rental mobil, angkutan antar kota, angkutan dalam kota, kereta api dan pesawat. Pada tahun 2019, 97% pembayaran tiket Bus di Kota Seoul sudah dilakukan secara *online* sehingga presentase pembayaran tiket secara *offline* di terminal dan halte sudah sangat sedikit.

Sebagai perbandingan, Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 82,44% didapat dari pembobotan 3 parameter yaitu jumlah terminal yang melaporkan data produksi di SIASATI (bobot 74%), jumlah pengadaan mesin *check in* tiket (bobot 8,4%) dan jumlah penerapan Terminal *Online System* (bobot 17,6%). Terkait layanan *e-ticketing*, hingga tahun 2023 sebanyak 8 Terminal Tipe A (7,77%) sudah memiliki mesin *check in* tiket sehingga mayoritas pembayaran dan *boarding* masih dilakukan secara *offline*. Untuk jumlah terminal yang melaporkan data produksi di SIASATI sudah mencapai 114 Terminal Tipe A (110,68%) sedangkan jumlah penerapan *Terminal Online System* (penerapan *hardware*) sebanyak 5 Terminal Tipe A (4,85%).

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bekerjasama dengan Pemerintah Korea Selatan khususnya *Ministry of Land Infrastructure and Transport* (MOLIT) mengadakan kegiatan Modernisasi Terminal dengan salah satu bagian kegiatannya yaitu melakukan *benchmarking* melalui kunjungan lapangan di Korea Selatan antara lain Bandara Incheon, Stasiun Seoul, Terminal Daejeon, Terminal Sinsegae, Siheung Haneul Rest Area (Transfer Center), dan Jamsil Transfer Center.

III.2.3. SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- **Uraian Kegiatan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Tabel III. 25 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat							
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	23,94				
		Target		24	24	24	23,94
		Realisasi		23,75	23,50	23,71	23,94
		Capaian		101,40%	102,08	101,21%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

III.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 26 Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat				Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	24	24	24	23,94	
Realisasi	23,75	23,50	23,71	23,94	
Capaian	101,40%	102,08%	101,21%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

- tata cara pemuatan barang;
- dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- dokumen Angkutan Barang;
- kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

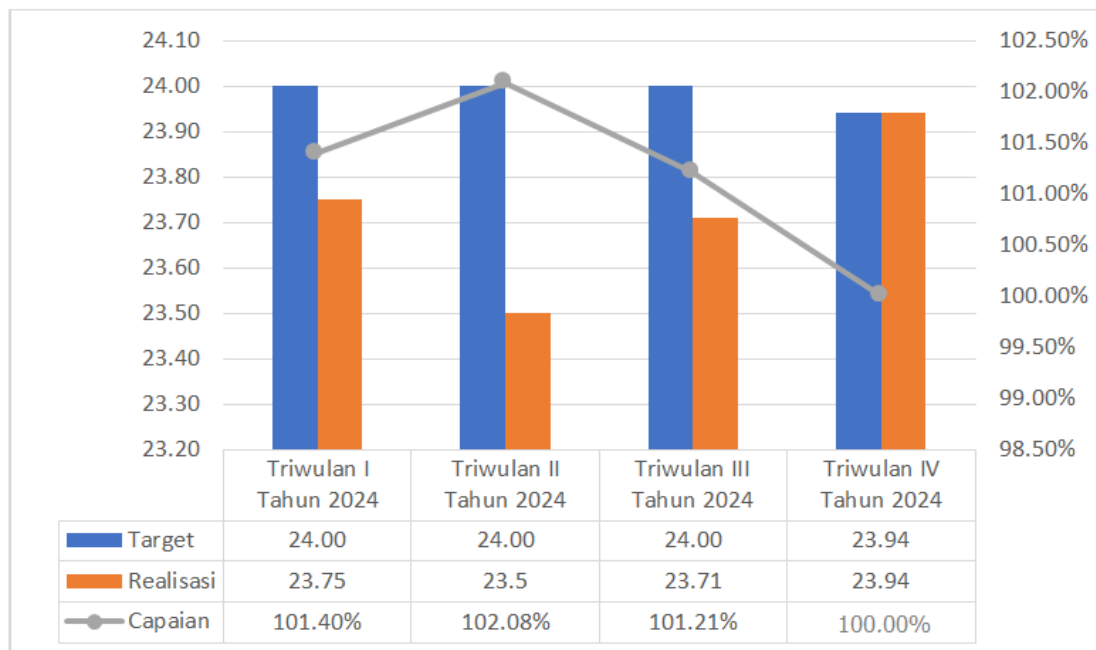
Untuk menghitung IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2024 sebesar 23,94% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2024 sebesar 23,94% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada

Gambar III.12. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2024).



Gambar III.31 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

- tata cara pemuatan barang;
- dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- dokumen Angkutan Barang;
- kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pada Tahun 2024, sebanyak 82 UPPKB yang beroperasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 567 Tahun 2022 tentang Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa dasar hukum yang mendukung indikator kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB, meliputi:

- Peraturan Direktur Jenderal Nomor SK. 736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP.4084/AJ.005/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor

3. Peraturan Direktur Jenderal Nomor SK.5370/KP.108/DRJD/2017 tentang Kompetensi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 memiliki target 24% yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024. Kemudian pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilakukan revisi target sesuai dengan realisasi akhir Tahun 2024 menjadi 23,94%.

- **Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

Berikut adalah beberapa factor keberhasilan yang dapat mendukung dalam pencapaian target pada Indi kator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM);
2. Membuat outlook UPPKB;
3. Membuat Pedoman Teknis WIM;
4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB;
5. Melakukan Pemeliharaan JTO;
6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;
7. Pengadaan WIM di UPPKB;
8. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.

- **Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang menjadi penyebab kegagalan tercapainya IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat:

1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB;
3. Adanya gejolak di lingkungan masyarakat terhadap penindakan di UPPKB;
4. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024, diperoleh realisasi sebesar 23,94% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target Revisi II PK Tahun 2024.

Sehingga :

$$\begin{aligned} IKK &= \frac{\text{Jumlah kendaraan berang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\% \\ &= \frac{38.770}{161.976} \times 100\% = 23,94\% \end{aligned}$$

*semakin rendah persentase pelanggaran, semakin baik, semakin tinggi persentase pelanggaran, semakin buruk.

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{23,94 - (23,94 - 23,94)}{23,94} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 adalah

Tabel III. 27 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat										
IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB	Rp15.455.892.000	Rp16.778.159.000	Rp343.811.441	2,22 %	Rp3.440.839.052	21,97 %	Rp9.123.306.606	58.15 %	Rp16.747.470.241	99,82 %

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat										
dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat (Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel, Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Kulwaru, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Losarang, Pemeliharaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel); 7. Penyusunan Assessment Kelayakan UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2024; 8. Standar Pelayanan Minimum UPPKB; 9. Pedoman Teknis Pemasangan dan Konfigurasi Jembatan Timbang Online; 10. Evaluasi dan Pengembangan Alat pada Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;										

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Mewujudkan Indonesia bebas ODOL dengan cara melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem jembatan timbang online, pengembangan integrasi JTO dengan sistem weight in motion dan sistem ETLE milik Kepolisian;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan UPPKB terkait dengan pelanggaran ODOL;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

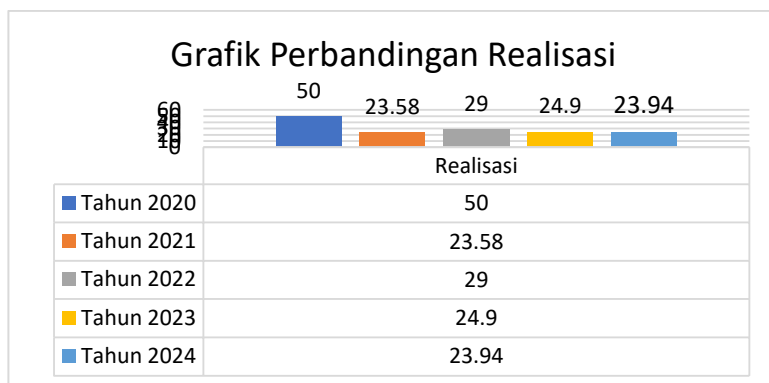
Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 23,94% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 23,94% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 sebesar 24,9% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 25,0% maka capaian kinerja mencapai 100,40% sedangkan pada realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2022 sebesar 29% dengan target 30% maka capaian kinerja mencapai 103,33%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 23,58 dengan target 35,0 maka capaian kinerja mencapai 132,63%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 50,0 dengan target 50,0 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,1 dari tahun 2022 dan penurunan sebesar 25,1 dari tahun 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 1,32 dari tahun 2021. Pada kondisi ini apabila realisasi mengalami penurunan maka realisasi tersebut semakin baik, artinya tingkat pelanggaran semakin berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

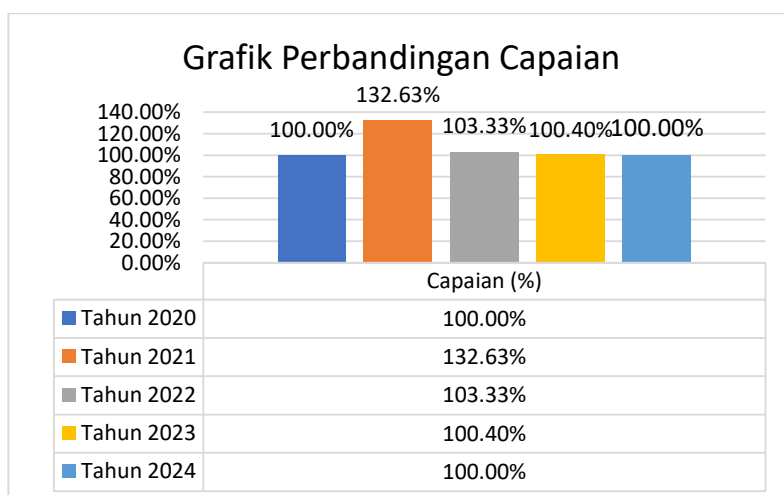
SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	50,0	50,0	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	35,0	23,58	132,63%	Naik
3	2022	IKK 1	30,0	29	103,33%	Tetap
4	2023	IKK 1	25,0	24,9	100,40%	Tetap
5	2024	IKK 1	23,94	23,94	100,00%	Tetap



Gambar III.32 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020



Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

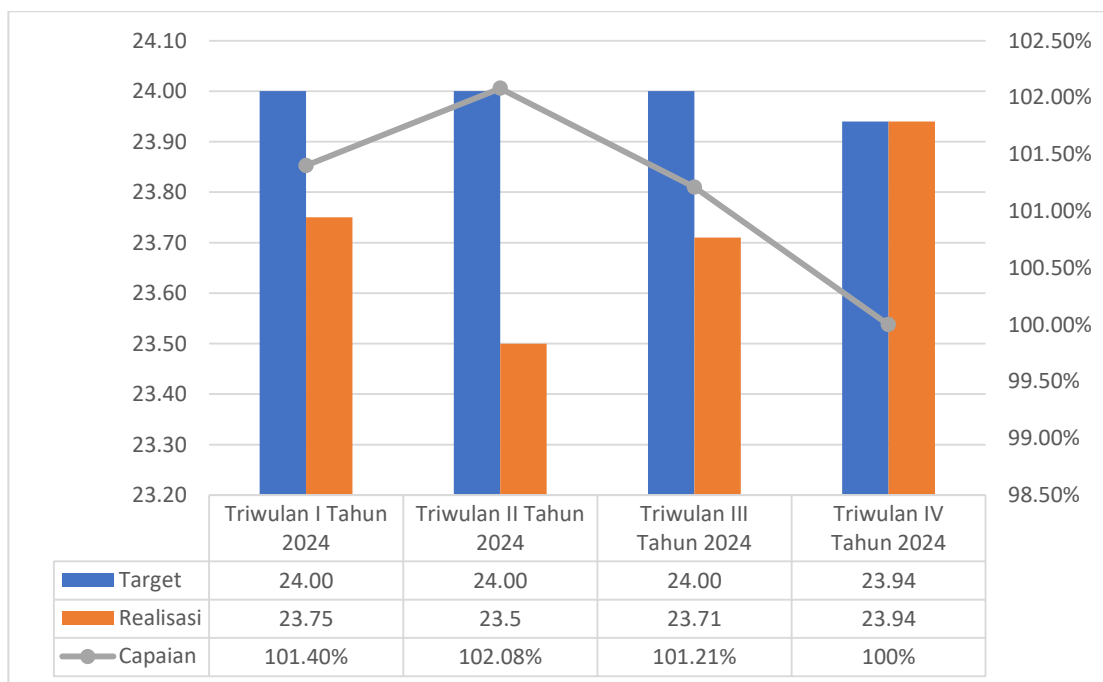


Gambar III.34 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 merupakan komitmen terhadap penurunan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024. Sehingga realisasi Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 adalah 23,94% atau capaian kinerjanya tetap menjadi sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 adalah 24,9% atau capaian kinerjanya tetap menjadi sebesar 100,40%, dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 103,33%, tahun 2021 sebesar 132,63% dan tahun 2020 sebesar 100,40%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 23,94% jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 23,94% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.13**.



Gambar III.35 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024)

a.7. Benchmark Nasional

Benchmark Internasional untuk Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan data dari negara Thailand. Berdasarkan data dari *Trrafic Weight Control by Thailand on APEC Vietnam 2017*, pada tahun 2015 dari 10.588 kendaraan angkutan barang yang diperiksa, 195 kendaraan diantaranya terindikasi kelebihan muatan atau sekitar 1,84%. Persentase pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang yang signifikan

terjadi karena regulasi penindakan pelanggaran ODOL di Thailand terbilang sangat tegas, dan dilakukan dari hulu ke hilir. Pada tahun 2024, Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara umum mencapai 23,94%. Perlu digarisbawahi bahwa data persentase pelanggaran pada UPPKB tersebut menunjukkan rata-rata seluruh jenis pelanggaran yang tercatat di UPPKB seluruh Indonesia yang didalamnya mencakup pelanggaran kelebihan muatan, dimensi, dokumen kendaraan, tata cara muat, persyaratan teknis, maupun kelas jalan.

Pada UPPKB telah dilaksanakan Sistem Manajemen Mutu yaitu Upaya yang sistematis melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan / pengendalian serta tindak lanjut terhadap semua unsur organisasi baik internal maupun eksternal terhadap Mutu Produk / Jasa dan Kepuasan Pelanggan. Sehingga dengan adanya Sistem Manajemen Mutu tersebut diharapkan mampu merubah paradigma berupa adanya perbaikan sarana – prasarana, Peningkatan Kompetensi SDM, dan adanya Sertifikasi ISO 9001:2015.

Dampak positif Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satuan Pelayanan UPPKB menerapkan Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 meliputi:

1. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Telah memiliki tools untuk menilai kinerja UPPKB
2. Manajemen Puncak (Kepala BPTD) dan Stakeholder (Ditjen Hubdat) dapat memberikan arahan dan target pengawasan sesuai dengan analisa data produktivitas yang didapatkan dari Penilaian Produktivitas menggunakan Pendekatan SMM (Komunikasi Top Down) terlaksana);
3. Terjaminya kesamaan prosedur pelaksanaan dan keluaran pekerjaan di UPPKB;
4. Sebagai basis dokumentasi awal dalam rangka penyiapan ZI, WBK & WBBM;
5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan telah dilakukan sehingga Organisasi dapat melakukan pemantauan sesuai dengan persepsi pelanggan;
6. Dengan adanya SOP Rencana Kerja Operasional di UPPKB, proses penyusunan dokumen kebutuhan anggaran dapat mencakup kebutuhan di UPPKB (Komunikasi Bottom Up sudah terlaksana);
7. BPTD & UPPKB sudah mulai menerapkan Pengendalian risiko dengan penyusunan dokumen identifikasi risiko;
8. Pemastian pelaksanaan perbaikan secara terus menerus atas sistem kerja baik di BPTD maupun UPPKB menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Mutu;

Sedangkan untuk Target kerjasama Sistem Manajemen Mutu di UPPKB ini yaitu :

1. Peningkatan Kinerja BPTD dan UPPKB;
2. Perubahan Mindset UPPKB;
3. SDM Profesional UPPKB;
4. Penggunaan Teknologi Sistem INF;
5. Pendataan yang baik;
6. Tidak ada pungutan liar;
7. Sertifikasi ISO 9001:2015 pada UPPKB;
8. Bebas ODOL 2023

Hasil Pelaksanaan Pendampingan yang telah dilakukan Penilaian Oleh Tenaga Ahli Konsultan Manajemen untuk dapat dilaksanakan Sertifikasi di UPPKB. Persyaratan Sertifikasi tersebut diawali dengan adanya sosialisasi (awareness) ISO 9001 dengan Implementasi selama 3 bulan

menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait UPPKB, kemudian dilakukan audit internal oleh BPTD dan Satpel UPPKB melalui Rapat Tinjauan Manajemen dimana Platform UPPKB telah di kalibrasi. Kemudian untuk penilaian kesesuaian badan sertifikasi dilakukan oleh Audit Eksternal yaitu TUV Rheinland Certified. Berikut adalah daftar UPPKB yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015:

Tabel III.29 Daftar UPPKB yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015

BPTD	UPPKB
Wilayah II Sumatra Utara	1. Dolok Estate Limapuluh 2. Mambang Muda
Wilayah III Sumatra Barat	3. Lubuk Selasih 4. Sungai Langsat 5. Air Haji
Wilayah IV Riau dan Kepri	6. Muara Lembu
Wilayah V Jambi	7. Jambi Merlung 8. Pelawan – Sarolangon 9. Muara Tembesi
Wilayah IX Jawa Barat	10. Balonggandu 11. Losarang*
Wilayah X Jawa Tengah	12. Kulwaru 13. Tanjung 14. Kalitirto
Wilayah XI Jawa Timur	15. Rejoso 16. Trosobo
Wilayah XIII NTT	17. Nun Baun Sabu
Wilayah XIV Kalimantan Barat	18. Siantan
Wilayah XVIII Sulawesi Utara	19. Sabilambo
Wilayah XIX Sulawesi Selatan & Barat	20. Pallangga 21. Somba Opu 22. Maccopa 23. Pakku
Wilayah XXI Gorontalo	24. Molotabu
BPTD Wilayah - VI Bengkulu & Lampung	25. Way Urang
BPTD Wilayah - VIII Banten	26. Cikande
BPTD Wilayah - XI Jawa Timur	27. Singosari
BPTD Wilayah - XXII Sulawesi Utara	28. Bitung
BPTD Wilayah - XXIII Maluku	29. Passo

III.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Uraian Kegiatan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;

Tabel III. 30 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat							
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	91				
		Target		89	89	89	91
		Realisasi		85	87	87	91
		Capaian		95,51%	97,75%	97,75%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

III.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 31 Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	89	89	89	91	
Realisasi	85	87	87	91	
Capaian	95,51%	97,75%	97,75%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target Ditjen Perhubungan Darat. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

Tabel III. 32 Perhitungan Nilai Bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

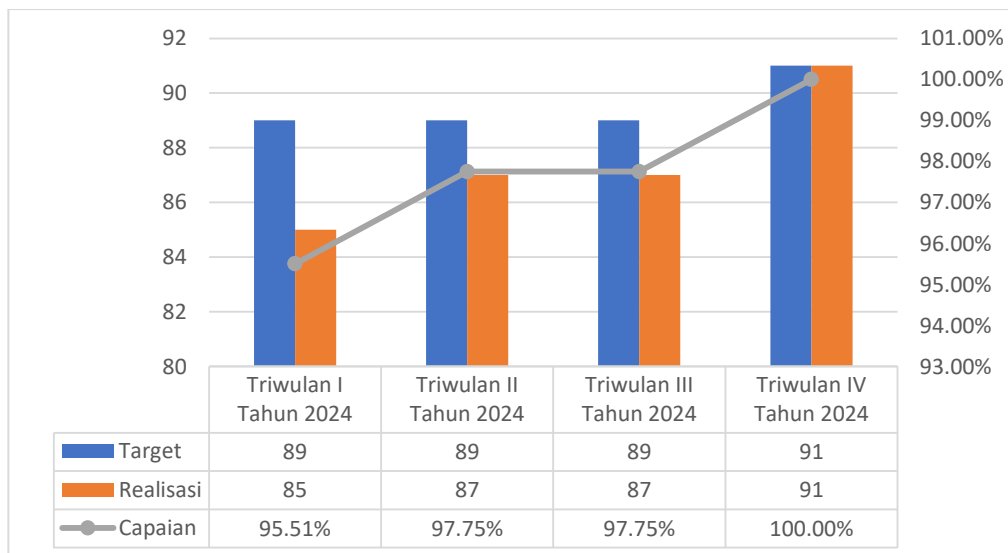
NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
I	SAKIP	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	5

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	5
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	5
B	Indeks Profesionalisme ASN		35%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
	2	Kompetensi	14	14
	3	Kinerja	11	11
	4	Disiplin	1,5	1,5
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan		30%	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	8
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	4
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 91 jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2024 sebesar 91 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.14**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023)



Gambar III.36 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

a) Aspek Perencanaan;

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

b) Aspek Kepegawaian (SDM);

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

c) Aspek Keuangan;

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

- **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024. Terdapat peningkatan target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana pada target awal sesuai Renstra 2020-2024 sebesar 89 diubah menjadi 91 sesuai dengan realisasi akhir tahun 2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan telah diselesaikan secara tepat waktu;

2. Daya serap anggaran satuan kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sudah mencapai 93,93%;
3. Pengelolaan dalam melakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara telah mencapai 100%
4. Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) tahun 2021 dan 2022 sudah tuntas 100%;

• **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

1. Pelaksanaan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 belum mencapai 100%;
3. Masih terdapat Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) yang belum tuntas, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. terdapat total 16 temuan (tahun 2022 s.d 2024);
 - b. terdapat 6 temuan dengan status TL tuntas (37,50%);
 - c. terdapat 10 temuan dengan status TL masih dalam proses (62,50%)

• **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024, diperoleh realisasi sebesar 91 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 telah sesuai dengan target revisi II PK Tahun 2024.

Sehingga :

Tabel III.33 Keberhasilan Capaian Indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
	I SAKIP	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	5
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	5
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	5
B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
2	Kompetensi	14	14
3	Kinerja	11	11
4	Disiplin	1,5	1,5
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	8
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	10
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	4
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
			91

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

• Narasi Capaian Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 terhadap target revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{91}{91} \times 100\% = 100\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 adalah

Tabel III. 34 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat										
IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan	Rp37.044.234.000	Rp35.732.324.000	Rp3.791.789.016	10,24%	Rp9.053.169.524	24,97%	Rp19.760.645.714	54.25%	Rp34.806.409.250	97,41%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat										
Kendaraan Bermotor; Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; Monitoring dan Indentifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan; Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan;										

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat										
. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; . Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; . Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; . Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; . Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; . Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. . Penyusunan Peraturan										

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat										
Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha										

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat										
(KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025;										

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat										
Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM.										

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan teknis agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan sesuai dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis serta dapat mendukung tercapainya program kegiatan sesuai dengan DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2024.
2. Meningkatkan kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen/BPK) untuk poin Tindak Lanjut yang belum tuntas.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

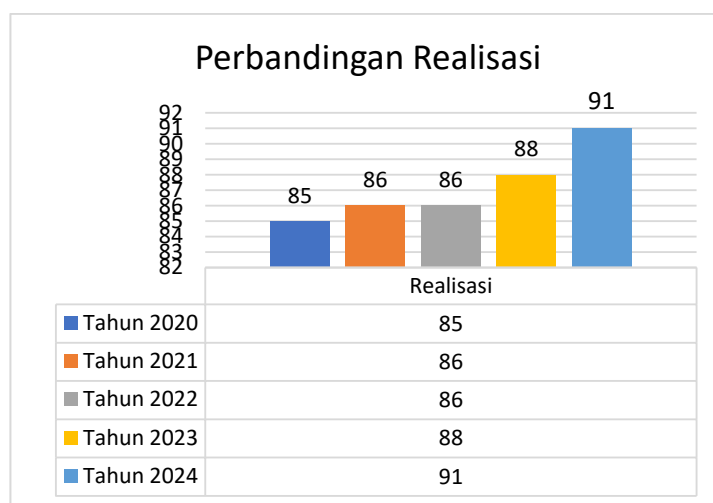
Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 91 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 91 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 sebesar 88 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2022 sebesar 86 dengan target 86 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2021 sebesar 86 dengan target 86 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 85 dengan target 85 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2 dari tahun 2022 dan 2021 serta mengalami kenaikan sebesar 3 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	85	85	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	86	86	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	86	86	100%	Tetap
4	2023	IKK 1	88	88	100%	Tetap
5	2024	IKK 1	91	91	100%	Tetap



Gambar III.37 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020



Gambar III.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

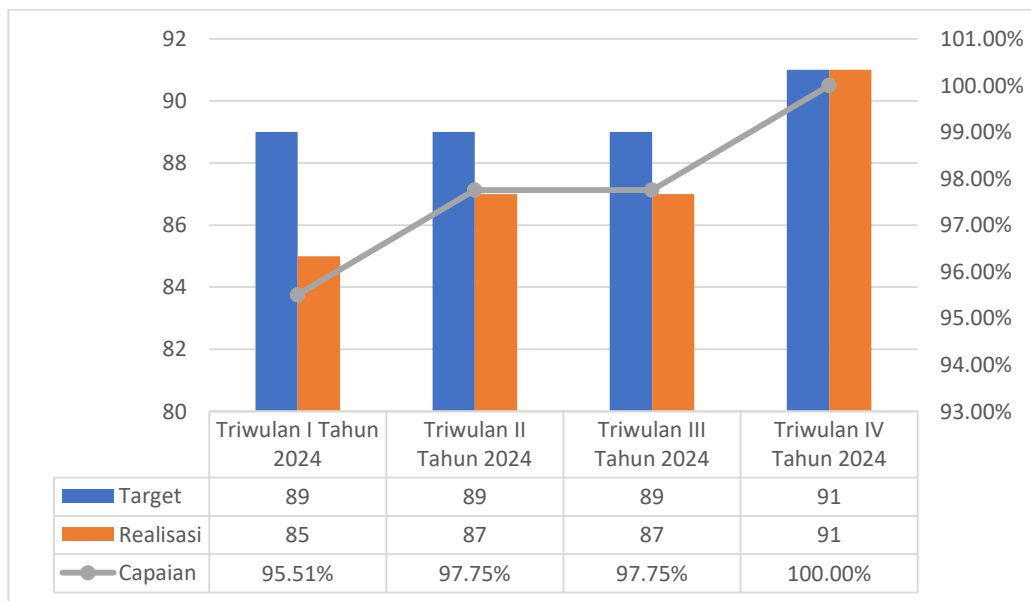


Gambar III.39 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat. Sehingga realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 adalah 91 dengan capaian kinerja sebesar 100% atau capaian kinerjanya sama dengan tahun 2023, 2022, 2021, 2020 yaitu sebesar 100%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 91 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 91 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.15**.



Gambar III.40 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024)

III.2.5. SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

• Uraian Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Tabel III. 36 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel							
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74				
		Target		74	74	74	74
		Realisasi		72,38	72,71	72,71	74
		Capaian		97,81%	98,26%	98,26%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

III.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 37 Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan				Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2024
Target	74	74	74	74	
Realisasi	72,38	72,71	72,71	74	
Capaian	97,81%	98,26%	98,26%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan, ketatausahaan, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan.
2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Sumber Data pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui hasil kuesioner sebagai berikut:

1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Terhadap Kinerja Layanan Perkantoran yang ditujukan kepada setiap Pegawai yang bertempat di Kantor Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
2. Hasil kuesioner assessment (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Cara Menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel III.38 Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8	
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV diukur melalui kuesioner terlampir

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA :

JABATAN :

NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran, dengan indikator: 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi.

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisioner berikut :

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA :

JABATAN :

NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan layanan Perkantoran, dengan indikator, 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi.

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{98}{91} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$x = \frac{54}{91} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

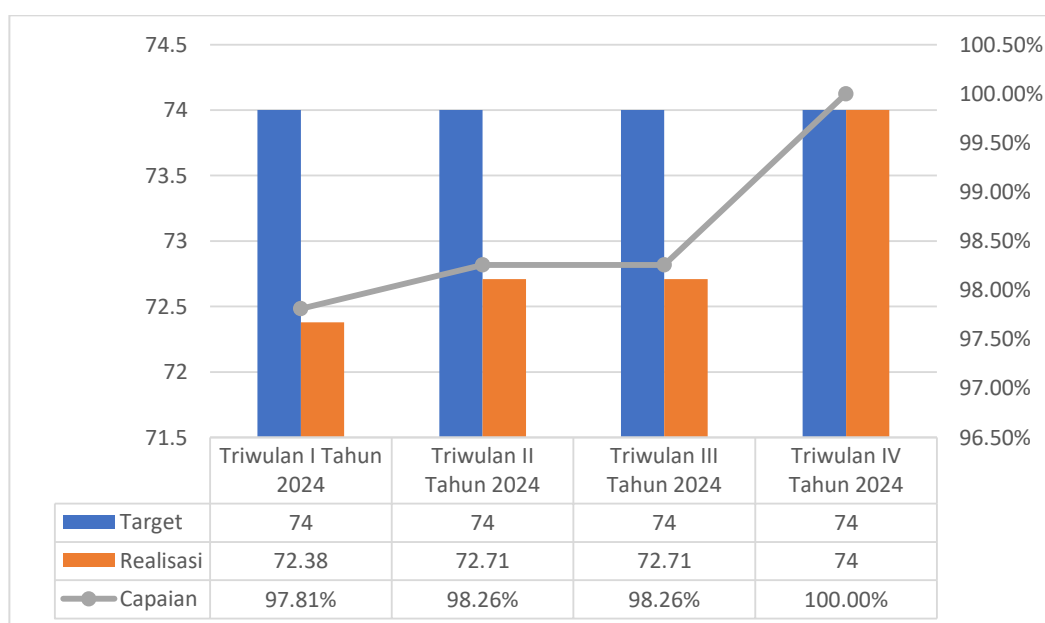
$$x = \frac{2,284}{5} \times 100\%$$

Note:

- *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security
- **) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- **) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.16**. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024.



Gambar III.17 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat PrasaranaTransportasi Jalan merupakan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan memperhitungkan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Kegiatan yang termasuk dalam Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, yaitu kegiatan layanan perkantoran dan pengadaan belanja modal lainnya.

- **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan survey tingkat kepuasan baik kepada pejabat, maupun staf terkait layanan perkantoran;
2. Meningkatkan ketersediaan pc/laptop dengan menyesuaikan jumlah pegawai;
3. Meningkatkan kecepatan internet (unduh) di kantor.
4. Meningkatkan kesadaran antar pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023:

1. Ketersediaan PC/laptop masih belum sesuai dengan jumlah pegawai;
2. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet;
3. Diperlukan kesadaran pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan oleh unit kerja.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024, diperoleh realisasi sebesar 74 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 telah sesuai dengan target revisi II PK Tahun 2024.

Sehingga :

Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	HASIL PERHITUNGAN	NILAI	BULAN											
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10%	70,0	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	7,00
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	77,5	6,20	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	6,20	6,20
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	80,0	5,60	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	5,60	5,60
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	71,6	17,91	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,88	17,91
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%														
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	107,69	21,54	22,09	21,35	21,35	21,35	21,78	21,78	21,54	21,54	21,78	21,78	21,78	21,54
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	59,34	8,90	9,42	9,10	9,10	9,10	9,00	9,00	8,90	8,90	9,00	9,00	9,00	8,90
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	45,68	6,85	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,85
TOTAL NILAI				74,00	73,44	72,38	72,38	72,38	72,71	72,71	72,37	72,37	72,71	72,71	75,38	74,00

Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV

1. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II = $70 \times 10\%$ (bobot) = **7**
 2. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III = $77,5 \times 8\%$ (bobot) = **6,20**
 3. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV = $80 \times 7\%$ (bobot) = **5,60**
- Tingkat Kepuasan Staf = $71,6 \times 25\%$ = **17,91**

Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{98}{91} \times 100\%$$

$$X = 107,69 \times 20\% \text{ (bobot)} = \mathbf{21,54}$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$x = \frac{54}{91} \times 100\%$$

$$X = 59,34 \times 15\% \text{ (bobot)} = \mathbf{8,90}$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2,284}{5} \times 100\%$$

$$X = 45,68 \times 15\% \text{ (bobot)} = \mathbf{6,85}$$

$$\text{Totak Nilai} = \mathbf{7,00 + 6,20 + 5,60 + 17,91 + 21,54 + 8,90 + 6,85 = 74}$$

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 terhadap target revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{74}{74} \times 100\% = 100\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 adalah :

Tabel III. 39 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen										
SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel										
IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Layanan Perkantoran	Rp6.291.088.000	Rp5.929.446.000	Rp1.786.084.402	28,39%	Rp2.742.912.353	43,04%	Rp3.568.212.313	59.08%	Rp4.911.905.778	82,84%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

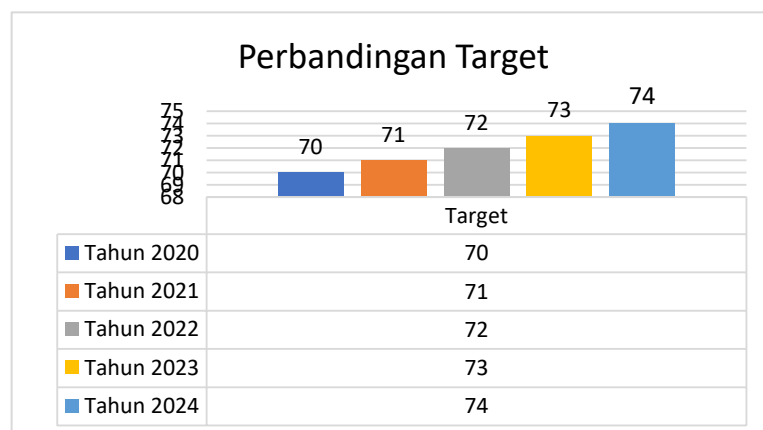
1. Melakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran;
2. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana yang ada.
3. Meningkatkan pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

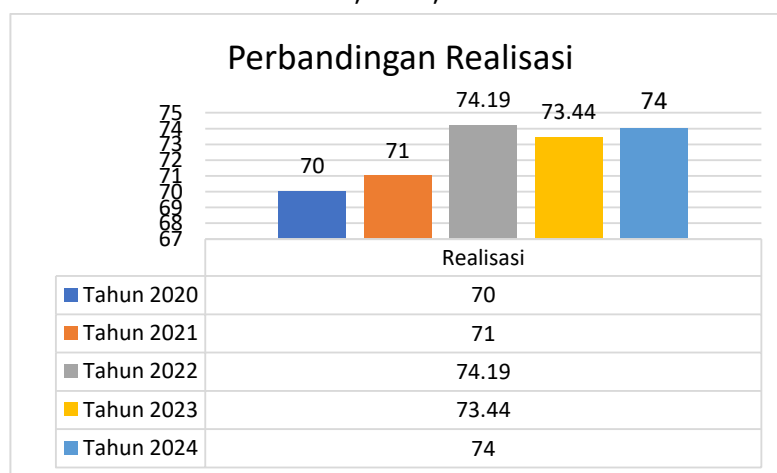
Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 sebesar 73,44 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 73 maka capaian kinerja mencapai 100,60% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 74,19 dengan target 73 maka capaian kinerja mencapai 103,04%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 71 dengan target 71 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 70 dengan target 70 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,75 dari tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 2,44 dari tahun 2021 serta kenaikan sebesar 3,44 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

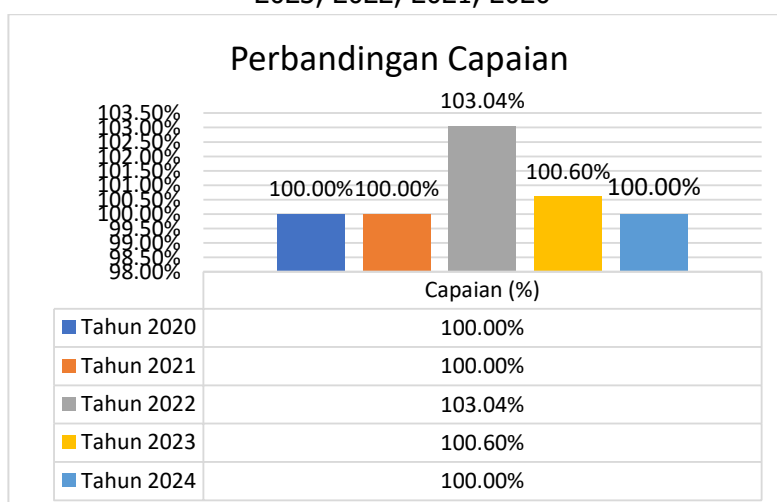
SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	70	70	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	71	71	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	72	74,19	103,04%	Naik
4	2023	IKK 1	73	73,44	100,60%	Tetap
5	2024	IKK 1	74	74	100,00%	Tetap



Gambar III.41 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020



Gambar III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

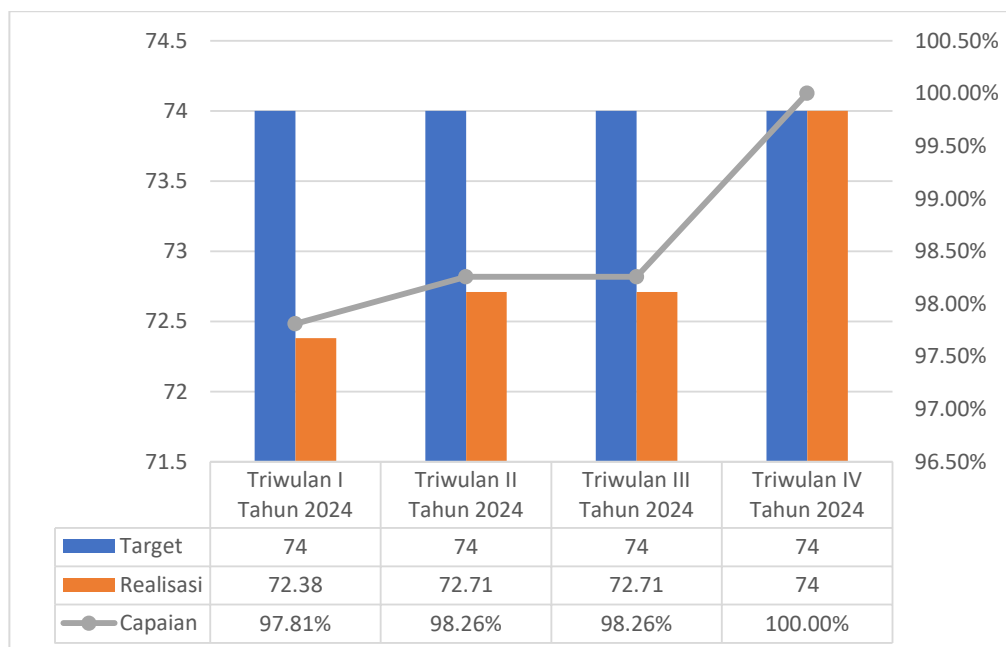


Gambar III.43 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024. Sehingga realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 adalah 74 dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 adalah 73,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,60% atau capaian kinerjanya turun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.17**.



Gambar III.44 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024)

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

III.3.1.1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

1) Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 99.957.401.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 41 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp.	99.957.401.000	100,00%
PNBP	Rp.	0	0,00%
SBSN	Rp.	-	0,00%
Total	Rp.	99.957.401.000	100%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Sumber Dana pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp98.883.755.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 42 Rincian per Sumber Dana Pagu Triwulan IV TA. 2024

RM	Rp.	98.803.755.000	100,00%
PNBP	Rp.	0	0,00%
SBSN	Rp.	0	0,00%
Total	Rp.	98.803.755.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 99.957.401.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III. 43 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	88.063.401.000	88,10%
Belanja Modal	Rp.	11.894.000.000	11,90%
Total	Rp.	99.957.401.000	100%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Jenis Belanja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) T.A. 2024 adalah sebesar **Rp 98.883.755.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 44 Rincian per Jenis Belanja Pagu Triwulan IV TA. 2024

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	84.951.156.000	85,98%
Belanja Modal	Rp.	13.852.599.000	14,02%
Total	Rp.	98.803.755.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 terdapat revisi anggaran pada Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berupa Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/17/SKJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran berupa *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjet Perhubungan Darat T.A. 2024.

III.3.1.2. Refocussing/ *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2022

Terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sesuai surat DJA sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/17/SKJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran berupa *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjet Perhubungan Darat T.A. 2024;
2. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KU.002/2/SDPTJ/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan.
3. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KU.002/48/SDPTJ/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Pada Tahun 2024 terdapat *Automatic Adjustment* yang menyebabkan adanya pengurangan pagu dari semula Rp. 99.957.401.000,00 menjadi Rp. 98.803.755.000,00 dengan total *automatic adjustment* sebesar Rp. 1.153.646.000,00.

Tabel III. 45 Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-1	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-2	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-3	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-4	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-5	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-6	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-7	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-8	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-9	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-10	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-11	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-12	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-13	98.803.755.000	-	-	98.803.755.000
REVISI KE-14	98.803.755.000	-	-	98.803.755.000

Tabel III. 46 Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	88.063.401.000	11.894.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-1	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-2	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-3	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-4	-	88.548.401.000	11.409.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-5	-	88.548.401.000	11.409.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-6	-	86.548.401.000	13.409.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-7	-	86.548.401.000	13.409.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-8	-	85.496.798.000	13.386.957.000	98.883.755.000
REVISI KE-9	-	85.496.798.000	13.386.957.000	98.883.755.000
REVISI KE-10	-	85.515.185.000	13.368.570.000	98.883.755.000
REVISI KE-11	-	85.441.436.000	13.852.599.000	99.294.035.000
REVISI KE-12	-	85.041.436.000	13.842.319.000	98.883.755.000
REVISI KE-13	-	84.961.436.000	13.842.319.000	98.803.755.000
REVISI KE-14	-	84.951.156.000	13.852.599.000	98.803.755.000

Tabel III. 47 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-				
Belanja Barang	88.063.401.000	2.566.603.000	85.496.798.000	-	85.496.798.000	- 55.362.000	85.441.436.000	- 490.280.000	84.951.156.000
Belanja Modal	11.894.000.000	- 1.492.957.000	13.386.957.000	-	13.386.957.000	465.642.000	13.852.599.000	-	13.852.599.000
TOTAL	99.957.401.000	1.073.646.000	98.883.755.000	-	98.883.755.000	410.280.000	99.294.035.000	- 490.280.000	98.803.755.000

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-				
Belanja Barang	88.548.401.000	3.051.603.000	85.496.798.000	-	85.496.798.000	- 55.362.000	85.441.436.000	- 490.280.000	84.951.156.000
· RM	88.548.401.000	- 3.051.603.000	85.496.798.000		85.496.798.000	- 55.362.000	85.441.436.000	- 490.280.000	84.951.156.000
· PNBPN									
Belanja Modal	11.409.000.000	- 1.977.957.000	13.386.957.000	-	13.386.957.000	465.642.000	13.852.599.000	-	13.852.599.000
· RM	11.409.000.000	1.977.957.000	13.386.957.000		13.386.957.000	465.642.000	13.852.599.000	-	13.852.599.000
· PNBPN									
· SBSN									
TOTAL	99.957.401.000	1.073.646.000	98.883.755.000	-	98.883.755.000	410.280.000	99.294.035.000	- 490.280.000	98.803.755.000

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi).

Tabel III. 48 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%		REALIASI	%
022.03.G A	Program Infrastruktur Konektivitas	77.080.313.000	76.006.667.000	6.185.849.678	10,71%	76.006.667.000	15.268.945.652	20,09%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.828.186.000	2.097.464.000	5,54%	37.828.186.000	7.081.575.200	18,72%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.178.481.000	4.088.385.678	10,71%	38.178.481.000	8.187.370.452	21,44%
022.03.W A	Program Dukungan Manajemen	22.877.088.000	22.877.088.000	2.143.989.402	9,37%	22.877.088.000	8.172.234.926	35,72%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	2.143.989.402	9,37%	22.877.088.000	8.172.234.926	35,72%
GRAND TOTAL		99.957.401.000	98.883.755.000	8.329.839.080	8,42%	98.883.755.000	23.441.180.578	23,71%
KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)	TRIWULAN IV	
				REALIASI	%		REALIASI	%
022.03.G A	Program Infrastruktur Konektivitas	77.080.313.000	76.006.667.000	37.925.413.492	50,03%	76.006.667.000	71.029.957.338	93,45%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.805.203.000	18.813.940.202	49,77%	37.205.203.000	34.204.942.591	91,94%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.201.464.000	19.111.473.290	50,03%	38.801.464.000	36.825.014.747	94,91%
022.03.W A	Program Dukungan Manajemen	22.877.088.000	22.877.088.000	14.040.848.993	61,38%	22.797.088.000	21.778.519.928	95,53%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	14.040.848.993	61,38%	22.797.088.000	21.778.519.928	95,53%
GRAND TOTAL		99.957.401.000	98.883.755.000	51.966.262.485	52,55%	98.803.755.000	92.808.477.266	93,93%

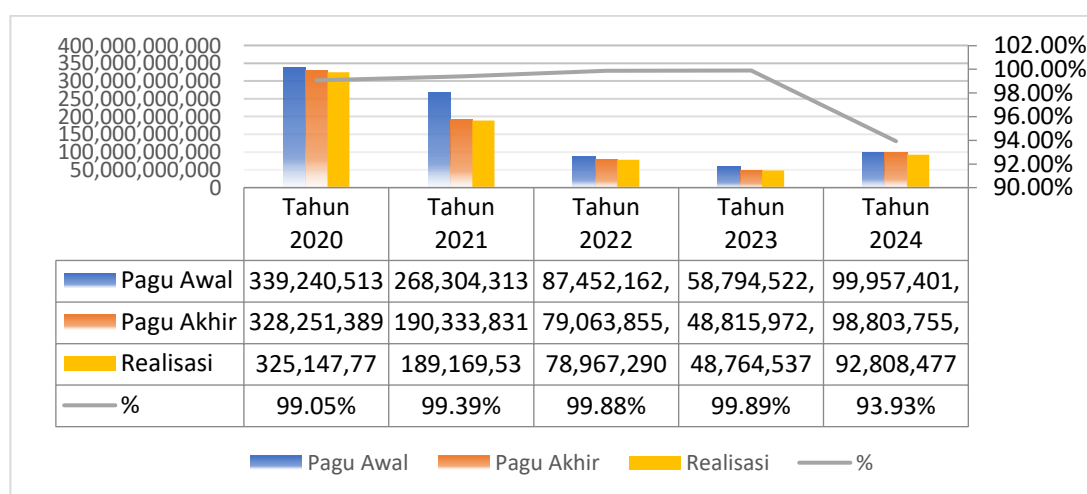
Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 49 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024
(Triwulan IV)

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	339.240.513.000	328.251.389.000	325.147.773.540	99,05%
2	2021	268.304.313.000	190.333.831.000	189.169.538.352	99,39%
3	2022	87.452.162.000	79.063.855.000	78.967.290.000	99,88%
4	2023	58.794.522.000	48.815.972.000	48.764.537.021	99,89%
5	2024	99.957.401.000	98.803.755.000	92.808.477.266	93,93%



Gambar III. 45 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran
Tahun 2020 – Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 sebesar Rp 325.147.773.540,- atau mencapai 99,05% dari pagu akhir Rp 328.251.389.000,-. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat serapan anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 189.169.538.352,- atau mencapai 99,39% dari pagu akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp 190.333.831.000,-. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat serapan anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 78.967.290.000,- atau mencapai 99,88% dari pagu akhir tahun 2022 yaitu sebesar Rp 79.063.855.000,-. Pada Tahun 2023 tingkat serapan anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 48.764.537.021,- atau mencapai 99,89% dari pagu akhir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 48.815.972.000,-. Pada Tahun 2024 tingkat serapan anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 92.808.477.266,- atau mencapai 93,93% dari pagu akhir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 98.803.755.000,-.

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III.50 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I (Jan-Mar)	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.080.313.000	76.006.667.000	6.185.849.678	10,71%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.828.186.000	2.097.464.000	5,54%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.178.481.000	4.088.385.678	10,71%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	22.877.088.000	22.877.088.000	2.143.989.402	9,37%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	2.143.989.402	9,37%
GRAND TOTAL		99.957.401.000	98.883.755.000	8.329.839.080	8,42%
KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II (Jan-Jun)	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.080.313.000	76.006.667.000	15.268.945.652	20,09%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.828.186.000	7.081.575.200	18,72%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.178.481.000	8.187.370.452	21,44%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	22.877.088.000	22.877.088.000	8.172.234.926	35,72%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	8.172.234.926	35,72%
GRAND TOTAL		99.957.401.000	98.883.755.000	23.441.180.578	23,71%
KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.080.313.000	76.006.667.000	37.925.413.492	50,03%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.805.203.000	18.813.940.202	49,77%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.201.464.000	19.111.473.290	50,03%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	22.877.088.000	22.877.088.000	14.040.848.993	61,38%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	14.040.848.993	61,38%
GRAND TOTAL		99.957.401.000	98.883.755.000	51.966.262.485	52,55%

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.080.313.000	76.006.667.000	71.029.957.338	93,45%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.205.203.000	34.204.942.591	91,94%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.801.464.000	36.825.014.747	94,91%
022.03.W A	Program Dukungan Manajemen	22.877.088.000	22.797.088.000	21.778.519.928	95,53%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.797.088.000	21.778.519.928	95,53%
GRAND TOTAL		99.957.401.000	98.803.755.000	92.808.477.266	93,93%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 sebesar Rp92.808.477.266,00 atau sebesar 93,93%%.

III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Per Jenis Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 52 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	85.496.798.000	6.612.383.120	7,73%	85.496.798.000	20.695.858.950	24,21%
3	Belanja Modal	13.386.957.000	1.717.455.960	12,83%	13.386.957.000	2.745.321.628	20,51%
TOTAL		98.883.755.000	8.329.839.080	8,42%	98.883.755.000	23.441.180.578	23,71 %

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	85.441.436.000	44.038.771.453	51,54%	84.951.156.000	78.956.146.666	92,94%
3	Belanja Modal	13.852.599.000	7.927.491.032	57,23%	13.852.599.000	13.852.330.600	100,00%
TOTAL		99.294.035.000	51.966.262.485	52,34%	98.803.755.000	92.808.477.266	93,93%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2024 dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebesar Rp 92.808.477.266,- atau sebesar 93,93%.

Tabel III. 53 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	98.883.755.000	8.329.839.080	8,42%	98.883.755.000	23.441.180.578	23,71%
2	PNBP	0	-	0,00%	-	-	-
3	SBSN	-	-	0,00%	-	-	-
TOTAL		98.883.755.000	8.329.839.080	8,42%	98.883.755.000	23.441.180.578	23,71%

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	99.294.035.000	51.966.262.485	52,34%	98.803.755.000	92.808.477.266	93,93%
2	PNBP	-	-	-	-	-	-
3	SBSN	-	-	-	-	-	-
TOTAL		99.294.035.000	51.966.262.485	52,34%	98.803.755.000	92.808.477.266	93,93%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2024 dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebesar Rp 92.808.477.266,- atau sebesar 93,93%

III.3.2.1. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 54 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA
		Rp98,803,755,000	Rp92,808,477,266	Rp5,995,277,734
				Rp-
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	Rp -	Rp -	Rp -
2	Kegiatan yang Terblokir	Rp 5,991,834,000.00	Rp -	Rp 5,991,834,000.00
3	Kontraktual	Rp73,243,581,000.00	Rp73,242,657,885.00	Rp 923,115.00
	a. Belanja Barang	Rp 59,828,456,000.00	Rp 59,827,540,285.00	Rp 915,715.00
	b. Belanja Modal	Rp 13,415,125,000.00	Rp 13,415,117,600.00	Rp 7,400.00
4	Non Kontraktual	Rp19,568,340,000.00	Rp19,565,819,381.00	Rp 2,520,619.00
	a. Belanja Barang	Rp 19,130,866,000.00	Rp 9,128,606,381.00	Rp 2,259,619.00
	b. Belanja Modal	Rp 437,474,000.00	Rp 437,213,000.00	Rp 261,000.00
5	Sisa Belanja Pegawai	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL		Rp98,803,755,000.00	Rp92,808,477,266.00	Rp5,995,277,734.00

Dari total pagu anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar **Rp98,803,755,000.00** (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu rupiah) yang dapat terealisasi sebesar **Rp92,808,477,266.00** (Sembilan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 93,93% sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah sebesar **Rp5,995,277,734.00** (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 6,07%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Kegiatan yang terblokir sebesar Rp5,991,834,000.00;
3. Sisa Kontraktual sebesar Rp923,115.00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sisa belanja modal sebesar Rp7,400.00 berasal dari sisa kontrak RM yang sudah tidak dapat di realokasi;
 - 2) Sisa belanja barang sebesar Rp915,715.00 sisa kontrak yang tidak digunakan untuk kegiatan realokasi.
4. Sisa Non Kontraktual sebesar Rp 2,520,619.00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sisa belanja modal sebesar Rp261,000.00 berasal dari sisa kegiatan pengadaan langsung yang sisa anggarannya sudah tidak dapat dimanfaatkan;
 - 2) Sisa belanja barang sebesar Rp2,259,619.00 berasal dari sisa anggaran kegiatan operasional serta kegiatan penunjang berupa layanan perkantoran.

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III. 3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 55 Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan I			Triwulan II		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	96,53%	9,10%	87,43%	96,53%	25,11%	71,42%
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	110,27%	8,10%	102,17%	110,75%	14,08%	96,67%
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	101,40%	2,13%	99,27%	102,08%	20,27%	81,81%
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	95,51%	10,20%	85,31%	97,75%	20,07%	77,68%
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	97,81%	13,95%	83,86%	98,26%	39,04%	59,22%
Total			100,30%	8,70%	91,61%	101,08%	23,71%	77,36%

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	99,10%	48,51%	50,59%	100,00%	90,43%	9,57%
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	110,50%	39,74%	70,76%	100,00%	99,15%	0,85%
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	101,21%	58,15%	43,06%	100,00%	99,82%	0,18%
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	97,75%	57,25%	40,50%	100,00%	97,41%	2,59%
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	98,26%	59,08%	39,18%	100,00%	82,84%	17,16%
Total			101,36%	52,55%	48,82%	100,00%	93,93%	6,07%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui per Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, dengan realisasi anggaran sebesar 93,93% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 6,07%.

III.3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel III. 56 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I				
		Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (Posisi Triwulan I)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	20	80%	96,53%	16,53%
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60%	110,27%	50,27%
3	SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	25	16	64%	101,40%	37,40%
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	28	93%	95,51%	2,18%
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	10	50%	97,81%	47,81%
Total		125	89	69%	100,30%	30,84%
No	Sasaran Kegiatan	Triwulan II				
		Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (Posisi Triwulan II)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	20	80%	96,53%	16,53%
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60%	110,75%	50,75%
3	SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	25	16	64%	102,08%	38,08%
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	29	97%	97,75%	1,09%
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	10	50%	98,26%	48,26%
Total		125	90	70,13%	101,08%	30,94%
No	Sasaran Kegiatan	Triwulan III				
		Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (Posisi Triwulan III)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	20	80,00%	99,10%	19,10%
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60,00%	110,50%	50,50%
3	SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	25	17	68,00%	101,21%	33,21%
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	28	93,33%	97,75%	4,42%
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	11	55,00%	98,26%	43,26%
Total		125	91	71,27%	101,36%	30,10%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebesar 100,00%, dengan Capaian Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 28,73%, dimana walaupun masih ada kekurangan Sumber Daya Manusia tetapi masih bisa mencapai target kinerja.

III.3.3.3 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024:

1. Terdapat *Automatic Adjustment* anggaran sehingga beberapa pekerjaan terjadi pengurangan anggaran, ditunda pelaksanaannya dan/atau diperpanjang waktu pelaksanaannya di tahun selanjutnya.
2. Membutuhkan koordinasi yang lebih intens dan komprehensif dengan stakeholder terkait agar kegiatan monitoring atau evaluasi menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi kinerjanya maupun realisasi anggaran.
3. Berdasarkan hasil review secara periodik, dibutuhkan adanya monitoring kinerja dan evaluasi kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.
4. Melakukan evaluasi terkait Indikator Kinerja eksisting sebagai dasar pengusulan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025-2029 sebagai upaya dalam peningkatan pengukuran dan capaian kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada periode renstra kedepan.



BAB IV

PENUTUP



IV. 1. Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024, terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2024, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 6 (enam) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 3 (tiga) status merah dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,64** (target tahun 2024 sebesar 0,64), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **108** lokasi (target tahun 2024 sebesar 108 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
3. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **13** lokasi (target tahun 2024 sebesar 13 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **96,34%** (target tahun 2024 sebesar 96,34) dengan Capaian Kinerja sebesar **100,00%**;
5. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **62,27%** (target tahun 2024 sebesar 62,27%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
6. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **82,44%** (target tahun 2024 sebesar 82,44%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
7. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **23,94%** (target tahun 2024 sebesar 23,94%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**.
8. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **91** (target tahun 2024 sebesar 91), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
9. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **74** (target tahun 2024 sebesar 74), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**.

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar 100,00% dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.

Total pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) T.A. 2024 adalah sebesar Rp 98.803.755.000 dengan realisasi anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 92.808.477.266;

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemetaan dan pemerataan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing Terminal Tipe A lewat proses penerimaan, mutasi dan promosi ASN;
 - b. Melakukan penelaahan teknis terkait penetapan lokasi Terminal Tipe A dan Terminal Barang baru berdasarkan kriteria penetapan lokasi sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan dan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A;
 - d. Mengusulkan revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A berdasarkan skala prioritas dan target minimal operasi;
 - e. Menyusun kajian teknis revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A yang belum memiliki kajian teknis pengembangan terminal;
 - f. Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi, pembangunan jalan dan penetapan pengelola agar Terminal Barang segera bisa beroperasi;
 - g. Tetap mengupayakan penyelesaian pembangunan Terminal Barang untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dengan target penyelesaian tahun 2024;
 - h. Menyusun kajian teknis penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda berdasarkan skala prioritas;
 - i. Menambahkan rincian dokumen teknis dan desain fasilitas pendukung pada etalase pembangunan fasilitas pendukung dalam E-catalog;
 - j. Melakukan koordinasi secara intensif dengan stakeholder lain terkait pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi prioritas;
 - k. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan fasilitas pendukung untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - l. Memprioritaskan lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi target capaian sesuai dengan Renstra;

- m. Monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- n. Melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka penyerapan realisasi anggaran;
- o. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- p. Memaksimalkan peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi demi tercapainya target capaian kinerja;

IV. 2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,64	0,64	0,64	100,00%	0,64	0,64	100,00%	0,64	0,64	100,00%	0,64	0,64	100,00%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	108	111	108	97,30%	111	108	97,30%	111	108	97,30%	108	108	100,00%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																			sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A. 4. Mengoptimalkan SDM yang ada pada terminal sesuai dengan kondisi ideal masing-masing terminal. 5. Melakukan optimalisasi anggaran operasional berdasarkan kondisi ideal sesuai ketersediaan jumlah SDM di lapangan.	
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	13	12	92,31%	13	12	92,31%	13	13	100,00%	13	13	100,00%	TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				oleh BPTD.	
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	96,34	81,50	95,60	117,30%	81,50	96,72	118,67%	81,50	96,72	118,00%	96,34	96,34	100,00	TERCAPAI	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan terminal melalui : 1. Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya. 2. Tersedianya aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A. 3. Perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana; 4. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	62,27	53,75	60,56	112,67%	53,75	60,56	112,67%	53,75	60,56	112,67%	62,27	62,27	100,00	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A melalui: 1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				agar standar terminal bisa merata; 2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal; 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal. 4. Melakukan evaluasi paruh waktu renstra.	
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	82,44	81,75	82,44	100,84%	81,75	82,44	100,84%	81,75	82,44	100,84%	82,44	82,44	100,00	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal meliputi: 1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A; 2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS); 3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
4	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	23,94	24	23,75	101,04%	24	23,50	102,08%	24	23,71	101,21%	23,94	23,94	100,00	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor

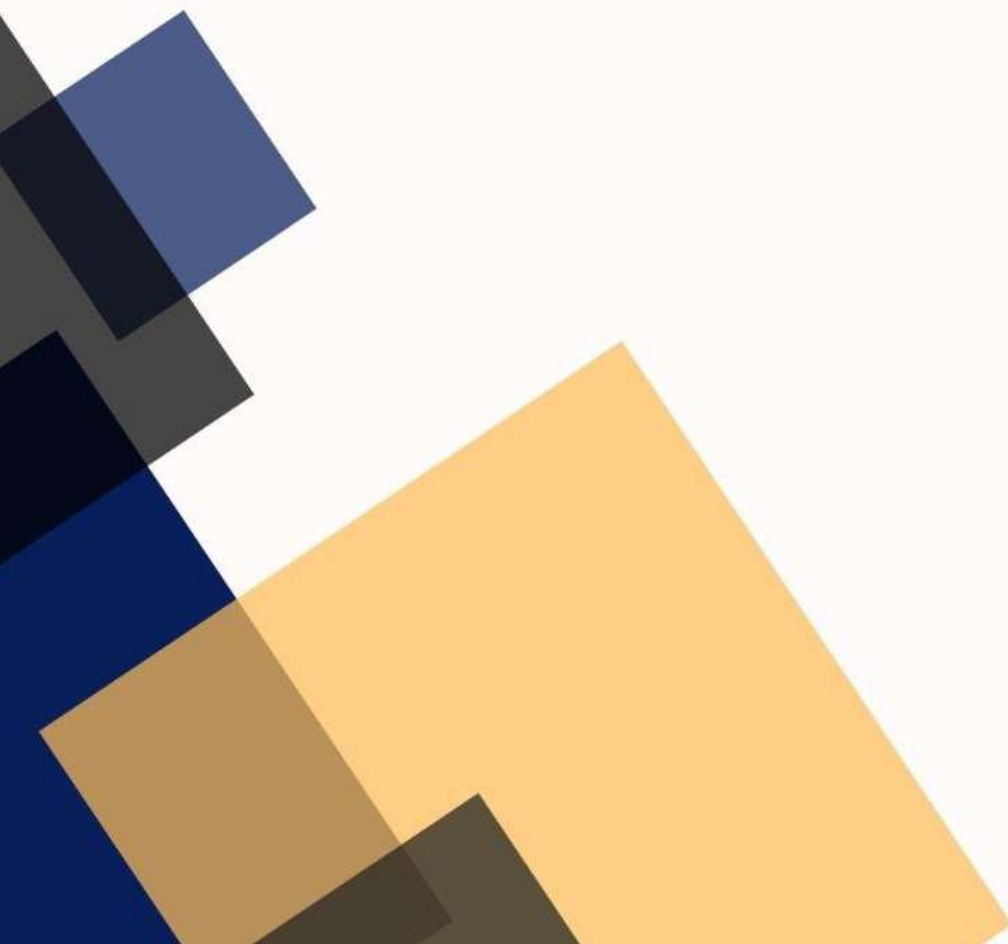
NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				WIM); 2. Sudah terdapat konsep outlook UPPKB; 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Sudah terdapat konsep Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan UPPKB untuk dapat memenuhi capaian target persentase pelanggaran; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.	
5	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	91	89	85	95,51%	89	87	97,75%	89	87	97,75%	91	91	100,00	TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan cara: 1. Pada aspek perencanaan akan melaksanakan penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan secara tepat waktu; 2. Pada aspek kepegawaian, melakukan <i>updating</i>	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				sistem kepegawaian, membuat laporan bulanan kinerja pegawai setiap bulan melalui AP2Kp, dan membuat penilaian kinerja pegawai setiap akhir tahun. 3. Pada aspek keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan rapat Kemajuan Realisasi Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang rutin dilaksanakan pada hari senin.	
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	74	72,38	97,81%	74	72,71	98,26%	74	72,37	97,80%	74	74	100,00	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, meliputi: 1. Terdapat pengadaan PC dan Printer pada Tahun Anggaran 2023; 2. Menambah kecepatan jaringan internet untuk memudahkan kegiatan layanan perkantoran.	Subbag Tata Usaha

LAMPIRAN



LAMPIRAN





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2024



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PARAF PERSETUJUAN	PIC
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,70		Subdit Terminal Angkutan Jalan
								Subdit Faspim
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	114		Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	25		Subdit Faspim
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50		Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75		Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	83,38		Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK.3	Meningkatnya keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20,0		Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	89		Subdit Terminal Angkutan Jalan,
								Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
								Subdit Faspim
								Subdit KP
								Subbag Tata Usaha
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	74		Subbag Tata Usaha

Jakarta, 1 Desember 2023

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,70
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	114
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	25
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	83,38
3	SK.3	Meningkatnya keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20,0
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	74

Jakarta, 1 Desember 2023

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

C-I-32

Surat Dari	: Direktur Prasarana Transportasi Jalan (Dispo Dirjen Hubdat)
Nomor Surat	: 3/DPTJ/I/2024
Tanggal Surat	: 2/1/24
Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	: 10/01/24
Diterima Pukul	: 11:09 WIB
No Agenda	: C-I-32

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
☒	KTU	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SEKRETARIS SATKER
☐		PARA PPK
☐		SESPRI

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☐ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☒ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☐ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- TL sesuai kebutuhan
- Koordinasi & pantau progresnya. Th

Y
w/1



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta (10110)



LEMBAR DISPOSISI

Yth. Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat		
Surat Diterima	Nomor agenda	N.12
	Diterima Tanggal	8 Januari 2024
	Pukul	09.15 WIB
	Dari	Dir Prasarana Transportasi Jalan
	Nomor surat	3/DPTJ/I/2024
	Tanggal	2 Januari 2024
	Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Diektorat Prasarana Transportasi Jalan
Diteruskan kepada Yth.		
1. ☐ SESDITJEN 2. ☐ DIR. LALULINTAS JALAN 3. ☐ DIR. ANGKUTAN JALAN 4. ☒ DIR. PRASARANA TRANSPORTASI JALAN 5. ☐ DIR. SARANA TRANSPORTASI JALAN 6. ☐ DIR. TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN 7. ☐ SPRI 8. ☐ ADC		
Isi Disposisi		
1. ☐ Tindak Lanjuti 2. ☐ Tanggapan /Saran 3. ☐ Harap Mewakili 4. ☐ Hadir Bersama Saya 5. ☐ Siapkan Bahan 6. ☐ Jadwalkan	1. ☐ Untuk Diketahui 2. ☐ Untuk Dipelajari dan Laporkan 3. ☐ Untuk Diselesaikan dan Laporkan 4. ☐ Untuk Dilaksanakan dan Laporkan 5. ☐ Untuk Dikoordinasikan 6. ☐ Untuk Diarsipkan	
Catatan :		
 Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M		



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA, 10110

Telp. (021) 3506138,
3506129, 3506145
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862178
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page: <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor 3/DPTJ/I/2024

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan
Tanggal : 2 Januari 2024

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : UM.207/84/17/DJPD/2023 tanggal 9 November 2023 perihal Undangan Persiapan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Toni Tauladan, S.Si., M.T.
NIP. 197009101997031002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

2024



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T.	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	2/24 1	
2.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, S.T., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	2/24 1	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	2/24 1	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.Stat	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	3/1 24	
2.	Diperiksa	Dluha My Praba, M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3/1 24	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3/1 24	
4.	Disetujui	Eriza Putra, S.Si, M.M.	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3/1 24	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penyusun Bahan Usaha, Seksi Pengawasan dan Evaluasi	2/1 24	
2.	Diperiksa	Diana Septi Rahayu, S.E., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	2/1 24	
3.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	2/1 24	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	2/1 24	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	2/1 24	
2.	Diperiksa	Sudarmaji, S.A.P., M.M.	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	2/1 24	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	3/1.24	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	2/1 24	
2.	Diperiksa	Jekky Hendri, S.Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	2/1 24	
3.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	2/1 24	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24,0
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan

1. Pelayanan transportasi darat
2. Penunjang teknis transportasi darat
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

Anggaran

Rp. 38.406.000.000,00
Rp. 38.674.313.000,00
Rp. 22.877.088.000,00

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 03 Januari 2024
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : 3/DPTJ/I/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sehubungan dengan adanya DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2024 tanggal 24 November 2023 dan perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024 maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp77.080.313.000,00 dan Program Dukungan Manajemen masih dengan pagu sebesar Rp22.877.088.000,00.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	Rasio	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	Lokasi	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	13	Lokasi	Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	81,50	%	Subdit TAJ
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	%	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	%	Subdit TAJ
3	SK.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24,0	%	Subdit PKB
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	Nilai	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	Nilai	Subbag Tata Usaha

Lampiran III Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
 Nomor :
 Tanggal : 03 Januari 2024

**TABEL SEMULA MENJADI
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62	0,64	0,70	0,64	Target Meningkat
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	108	114	111	Target Meningkat
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	12	25	13	Target Meningkat
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81	94,61 60,56	81.50 53,75	81,50	Target Meningkat
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.7			53,75	Target Meningkat
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78.6	81,75 24,9	83.38	81,75	Target Meningkat
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25		20,0	24,0	Target Meningkat

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	89	89	Target Meningkat
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73,44	74	74	Target Meningkat

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SK. 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan DEFINISI : IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan. Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi. Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte. Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk dilayani prasarana transportasi jalan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN.	Rasio	0,64	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan. FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi DEFINISI: Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	Lokasi	111	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun	Subdit TAJ
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda DEFINISI: Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 serta PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.	Lokasi	13	FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	1.0 Tahun	Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	SK. 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A DEFINISI: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang yang diarahkan oleh Petugas Terminal di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kerwenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui barcode ataupun link survey yang berbeda-beda setiap terminalnya. Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-display melalui poster dan/atau banner ataupun melalui link yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal. Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan rating dari 1 sampai 6, dengan rating 6 berarti paling memuaskan dan rating 1 paling tidak memuaskan. Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebagai admin.	%	81,50	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Survei Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)	1.0 Tahun	Subdit TAJ
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A DEFINISI: IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata	%	53,75	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya. Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup: (1) Pelayanan Keselamatan dengan bobot nilai 20%; (2) Pelayanan Keamanan dengan bobot nilai 6%; (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan dengan bobot nilai 18%; (4) Pelayanan Kenyamanan dengan bobot nilai 36%; (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan dengan bobot nilai 18%; (6) Pelayanan Kesetaraan dengan bobot nilai 2%. Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara online dengan menyebar kuisioner google form ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun google drive yang digunakan untuk membuat form kuesioner.			2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	1.0 Tahun 76.0 Unit	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A DEFINISI : IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah persentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi : 1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%; 2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%; 3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%. Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga persentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui https://siasati.dephub.go.id/. Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal	%	81,75	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.					
3	SK. 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DEFINISI: Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB. Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi: - tata cara pemuatan barang; - dimensi kendaraan Angkutan Barang; - tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;	%	24,0	PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR : - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 1.0 Tahun - Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 1.0 Tahun - Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 1.0 Tahun - Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan 1.0 Tahun		Subdit PKB

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				d. dokumen Angkutan Barang; e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.			dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	1.0 Paket 2.0 Lajur 1.0 Lajur 1.0 Lajur 3.0 Lajur	
4	SK. 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat DEFINISI: Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek Perencanaan; b) Aspek Kepegawaian (SDM); c) Aspek Keuangan; Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	18.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan;	1.0 Tahun	
							9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta;	1.0 Tahun	
							11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ;	1.0 Tahun	
							12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan;	1.0 Tahun	
							13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri;	1.0 Tahun	
							14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi;	1.0 Tahun	
							15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025;	1.0 Tahun	
							16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal	1.0 Tahun	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. <i>Inhouse Consultant</i> Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Kajian 1.0 Kajian 3.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Paket	
5	SK. 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan DEFINISI: 1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian	Nilai	74	TATA USAHA : Layanan Perkantoran.	1.0 Layanan	Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dukungan urusan, ketatausahaan, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan. 2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.					



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	SK.1 Meningkatnya Efektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	865.307.000	Subdit TAJ Subdit Faspim	
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	500.000.000	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	432.896.000	Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	81,50	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	-	Subdit TAJ	
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	38.860.346.000	Subdit TAJ	
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	507.638.000	Subdit TAJ	
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	24,0	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	15.455.892.000	Subdit PKB	
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LIAJ yang akan Dikerjakamkan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LIAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Penundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	37.044.234.000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Faspim Subdit KP Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	6.291.088.000	Subbag Tata Usaha	

Jakarta, 3 Januari 2024

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.Stat	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	14/6 ²⁴	
2.	Diperiksa	Dluha My Praba, M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	14/6 ²⁴	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	14-6-2024	
4.	Disetujui	H. Abdul Karim Akaseh, ST., MM	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	19-6-2024	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	14-6-2024	
2.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	14/6/2024	
3.	Diperiksa	Jekky Hendri, S,Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	14/6/2024	
4.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	19/6/2024	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	14/6/2024	
2.	Diperiksa	Yulie Wulandari, SE	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	14/6/24	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	24-6-2024	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penyusun Bahan Usaha, Kelompok Pengawasan dan Evaluasi	14/6 ²⁴	
2.	Diperiksa	Fitroh, S.ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	14/6 ²⁴	
3.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	14/6 ²⁴	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	19/6 ²⁴	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T.	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	14/6 ²⁴	
2.	Diperiksa	Susiani, A.Md LLAJ, S.T., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	14/6 ²⁴	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	14/6 ²⁴	
4.	Disetujui	Rudy Arya Iskandar, S.T., M.Sc.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	19/6 ²⁴	



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.,

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2024

Pihak Pertama

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24,0
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan

1. Pelayanan transportasi darat
2. Penunjang teknis transportasi darat
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

Anggaran

Rp. 37.828.186.000,00
Rp. 38.178.481.000,00
Rp. 22.877.088.000,00

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433

Jakarta, 24 Juni 2024

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Nomor : 195/DPTJ/VII/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sehubungan dengan adanya Revisi ke-8 DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2024 tanggal 21 Juni 2024 dan perubahan pimpinan unit kerja maka perlu ditetapkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp76.006.667.000,00 dan Program Dukungan Manajemen masih dengan pagu sebesar Rp22.877.088.000,00.

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	Rasio	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	Lokasi	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	13	Lokasi	Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	81,50	%	Subdit TAJ
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	%	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	%	Subdit TAJ
3	SK.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24,0	%	Subdit PKB
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	Nilai	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	Nilai	Subbag Tata Usaha

**TABEL SEMULA MENJADI
 REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Revisi I Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62	0,64	0,70	0,64	0,64	Target masih sama dengan PK Awal
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	108	114	111	111	Target masih sama dengan PK Awal
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	12	25	13	13	Target masih sama dengan PK Awal
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81	94,61	81.50	81,50	81,50	Target masih sama dengan PK Awal
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.7	59,02	53.7	53,75	53,75	Target masih sama dengan PK Awal
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78.6	81,75	83.38	81,75	81,75	Target masih sama dengan PK Awal

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Revisi I Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	24,88	20,0	24,0	24,0	Target masih sama dengan PK Awal
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	89	89	89	Target masih sama dengan PK Awal
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73,44	74	74	74	Target masih sama dengan PK Awal

**LAMPIRAN REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SK. 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan DEFINISI : IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan. Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi. Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte. Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk dilayani prasarana transportasi jalan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN.	Rasio	0,64	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan. FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi DEFINISI: Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	Lokasi	111	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun	Subdit TAJ
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda DEFINISI: Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 serta PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.	Lokasi	13	FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	1.0 Tahun	Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	SK. 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A DEFINISI: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang yang diarahkan oleh Petugas Terminal di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kerwenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui barcode ataupun link survey yang berbeda-beda setiap terminalnya. Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-display melalui poster dan/atau banner ataupun melalui link yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarkan melalui media sosial masing-masing terminal. Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan rating dari 1 sampai 6, dengan rating 6 berarti paling memuaskan dan rating 1 paling tidak memuaskan. Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebagai admin.	%	81,50	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Survei Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)	1.0 Tahun	Subdit TAJ
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A DEFINISI: IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata	%	53,75	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya. Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup: (1) Pelayanan Keselamatan dengan bobot nilai 20%; (2) Pelayanan Keamanan dengan bobot nilai 6%; (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan dengan bobot nilai 18%; (4) Pelayanan Kenyamanan dengan bobot nilai 36%; (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan dengan bobot nilai 18%; (6) Pelayanan Kesenyamanan dengan bobot nilai 2%. Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara online dengan menyebar kuisioner google form ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun google drive yang digunakan untuk membuat form kuesioner.			2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	1.0 Tahun 76.0 Unit	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A DEFINISI : IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi : 1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%; 2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%; 3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%. Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui https://siasati.dephub.go.id/. Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal	%	81,75	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit TAJ

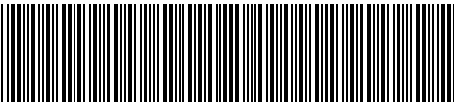
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.					
3	SK. 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DEFINISI: Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB. Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi: - tata cara pemuatan barang; - dimensi kendaraan Angkutan Barang; - tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;	%	24,0	PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR : - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; - Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; - Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; - Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit PKB

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				d. dokumen Angkutan Barang; e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.			dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	1.0 Paket 2.0 Lajur 1.0 Lajur 1.0 Lajur 3.0 Lajur	
4	SK. 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat DEFINISI: Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek Perencanaan; b) Aspek Kepegawaian (SDM); c) Aspek Keuangan; Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	18.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan;	1.0 Tahun	
							9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta;	1.0 Tahun	
							11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ;	1.0 Tahun	
							12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan;	1.0 Tahun	
							13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri;	1.0 Tahun	
							14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi;	1.0 Tahun	
							15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025;	1.0 Tahun	
							16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal	1.0 Tahun	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. <i>Inhouse Consultant</i> Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Kajian 1.0 Kajian 3.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Paket	
5	SK. 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan DEFINISI: 1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian	Nilai	74	TATA USAHA : Layanan Perkantoran.	1.0 Layanan	Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dukungan urusan, ketatausahaan, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan. 2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.					



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 022.03.1.352597/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 08
Tanggal : 21 Juni 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
- Sebesar : Rp. 98.883.755.000 (SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.08 TRANSPORTASI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	98.883.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 98.883.755.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

JAKARTA, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

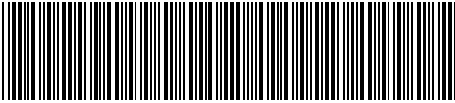
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024

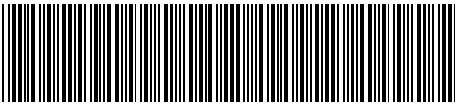


DS:2086-8042-3924-1680

Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	76.006.667.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	37.828.186.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	38.178.481.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	22.877.088.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	22.877.088.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I A. INFORMASI KINERJA

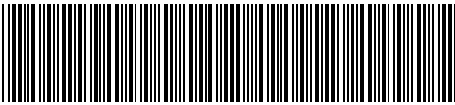


DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Program	:	022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			76.006.667.000
Kegiatan	:	4638	Pelayanan Transportasi Darat			37.828.186.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A			
		2. 01	Rata-rata persentase okupansi penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan			
		3. 02	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A			
		4. 03	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP			
		5. 04	Rata-rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4638.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	7,00	Unit, Paket	406.000.000
Rincian Output	:	01 CAC.028	Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	7.00	Unit	406.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	76,00	Unit, Paket	37.422.186.000
Rincian Output	:	01 CBP.032	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal	76.00	Unit	37.422.186.000
Kegiatan	:	4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			38.178.481.000
	:	1. 01	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat			
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	18,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.071.957.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	18.00	Rekomendasi Kebijakan	16.071.957.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32,00	Laporan, Rekomendasi	13.606.524.000
Rincian Output	:	01 FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32.00	Laporan	13.606.524.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : I A. 2

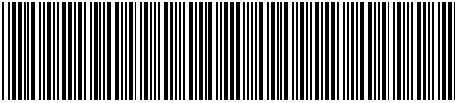
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.500.000.000
Rincian Output		:	01	PBF.209 Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) (PN)	1.00	Kajian	2.500.000.000
		:	02	PBF.210 Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) (PN)	1.00	Kajian	2.500.000.000
		:	03	PBF.211 Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional) (PN)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
Program		:	022.03.WA	Program Dukungan Manajemen			22.877.088.000
Kegiatan		:	4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat			22.877.088.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	22.877.088.000
Rincian Output		:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	22.877.088.000

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I B. SUMBER DANA



DS:2086-8042-3924-1680

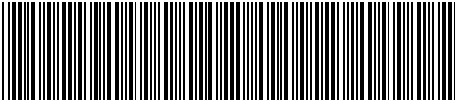
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	98.883.755.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	98.883.755.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

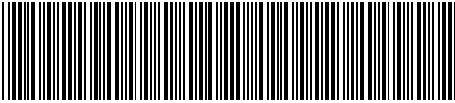


DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	-	85.496.798	13.386.957	-	-	98.883.755	01 . 51	
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	62.619.710	13.386.957	-	-	76.006.667		
4638	Pelayanan Transportasi Darat	-	36.563.186	1.265.000	-	-	37.828.186		
4638.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	406.000	-	-	-	406.000		
01	RM	-	406.000	-	-	-	406.000		
4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	36.157.186	1.265.000	-	-	37.422.186		
01	RM	-	36.157.186	1.265.000	-	-	37.422.186		
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	-	26.056.524	12.121.957	-	-	38.178.481		
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.450.000	9.621.957	-	-	16.071.957		
01	RM	-	6.450.000	9.621.957	-	-	16.071.957		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

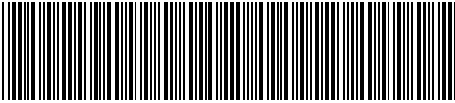
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.606.524	-	-	-	13.606.524	01 . 51	
	01 RM	-	13.606.524	-	-	-	13.606.524	133@	
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.000.000	2.500.000	-	-	8.500.000	01 . 51	
	01 RM	-	6.000.000	2.500.000	-	-	8.500.000	133	
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	-	22.877.088	-	-	-	22.877.088		
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	-	22.877.088	-	-	-	22.877.088		
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	22.877.088	-	-	-	22.877.088	01 . 51	
	01 RM	-	22.877.088	-	-	-	22.877.088	133@	
JUMLAH		-	85.496.798	13.386.957	-	-	98.883.755		

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

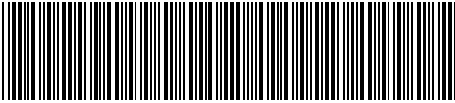
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.779.869	2.724.360	4.299.275	4.873.859	8.897.806	9.444.223	6.357.217	9.562.795	9.266.720	22.192.649	6.806.446	12.678.535	98.883.755
		BELANJA BARANG	1.739.187	2.723.861	3.923.305	4.828.838	8.161.891	8.320.358	4.502.892	7.809.994	7.497.208	19.659.990	4.452.041	11.877.234	85.496.798
		BELANJA MODAL	40.682	500	375.970	45.021	735.915	1.123.865	1.854.325	1.752.802	1.769.512	2.532.659	2.354.405	801.301	13.386.957
		022.03.GA.4638 Pelayanan Transportasi Darat	1.203.500	14.779	977.452	1.331.856	4.274.165	5.424.270	1.734.366	631.699	3.859.726	16.955.570	280.471	1.140.330	37.828.186
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.162.818	14.279	944.411	1.286.835	4.129.684	5.246.319	1.675.739	618.661	3.729.254	16.382.413	270.990	1.101.783	36.563.186
		53 BELANJA MODAL	40.682	500	33.041	45.021	144.482	177.951	58.628	13.038	130.472	573.157	9.481	38.547	1.265.000
		022.03.GA.4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	381.262	1.914.656	2.025.771	775.801	1.659.324	3.115.892	4.496.866	5.137.290	4.266.274	5.083.234	6.352.363	2.969.748	38.178.481
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	381.262	1.914.656	1.682.842	775.801	1.067.891	2.169.978	2.701.168	3.397.526	2.627.234	3.123.733	4.007.439	2.206.995	26.056.524
		53 BELANJA MODAL	0	0	342.928	0	591.433	945.914	1.795.698	1.739.764	1.639.040	1.959.502	2.344.924	762.754	12.121.957
		022.03.WA.4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	195.107	794.926	1.296.052	2.766.203	2.964.317	904.060	125.985	3.793.806	1.140.720	153.844	173.612	8.568.456	22.877.088
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	195.107	794.926	1.296.052	2.766.203	2.964.317	904.060	125.985	3.793.806	1.140.720	153.844	173.612	8.568.456	22.877.088

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
IV A. B L O K I R



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

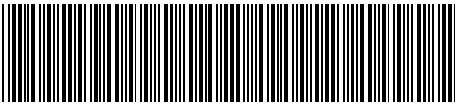
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	022.03.WA	Disposisi: Automatic Adjustment
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.741.482	4670	Program Dukungan Manajemen
	52 Belanja Barang Rp. 5.741.482	4670.EBA	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		Layanan Dukungan Manajemen Internal
4638	Pelayanan Transportasi Darat		521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)
4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 366.528
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)		AA
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000.000		Disposisi: Automatic Adjustment
	Automatic Adjustment		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Disposisi: Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 170.000
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat		AA
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Disposisi: Automatic Adjustment
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		522141 Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 401.400
	AA		AA
	Disposisi: Automatic Adjustment		Disposisi: Automatic Adjustment
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.369		Automatic Adjustment
	Automatic Adjustment		Disposisi: Automatic Adjustment
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000		
	AA		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.337.185		
	AA		

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
IV B. C A T A T A N



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

C-VII-46

Surat Dari	: Direktur Prasarana Transportasi Jalan (Dispo Dirjen Hubdat)
Nomor Surat	: 195/DPTJ/VII/2024
Tanggal Surat	: 02/07/24
Perihal	: Permohonan Tanda Tangan Konsep revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dit. Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	: 05/07/24
Diterima Pukul	: 14 : 20 WIB
No Agenda	: C-VII-46

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
☒	KTU	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SEKRETARIS SATKER
☐		PARA PPK
☐		SESPRI

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☒ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☐ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- TL sesuai ketentuan.
- Pantau progresnya. Th



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta (10110)



LEMBAR DISPOSISI

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat			
Surat Diterima	Nomor Agenda	N.775/DJ/VII/2024	
	Diterima Tanggal	05-Jul-2024	
	Pukul	09:22 WIB	
	Dari	Dir. Prasarana Transportasi Jalan	
	Nomor Surat	195/DPTJ/VII/2024	
	Tanggal	24-Jun-2024	
	Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dit. Prasarana Transportasi Jalan	
DITERUSKAN KEPADA YTH :			
1.		SESDITJEN	
2.		DIR. LALULINTAS JALAN	
3.		DIR. ANGKUTAN JALAN	
4.		DIR. PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	
5.		DIR. SARANA TRANSPORTASI JALAN	
6.		DIR. TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
7.		SPRI	
8.		ADC	
ISI DISPOSISI			
1.	Tindak Lanjuti	1.	Untuk Diketahui
2.	Tanggapan / Saran	2.	Untuk Dipelajari dan Laporkan
3.	Harap Mewakili	3.	Untuk Diselesaikan dan Laporkan
4.	Hadir Bersama Saya	4.	Untuk Dilaksanakan dan Laporkan
5.	Siapkan Bahan	5.	Untuk Dikoordinasikan
6.	Jadwalkan	6.	Untuk Diarsipkan

Catatan:



Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

NOTA DINAS

Nomor 195/DPTJ/VII/2024

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian
Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan
Tanggal : 24 Juni 2024

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.207/38/14/DJPD/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bimbingan Teknis Penyesuaian pada Aplikasi E-Performance, Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Penyusunan Revisi Renaksi Tahun 2024, Persiapan Evaluasi AKIP 2024 atas Implementasi SAKIP 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir disampaikan konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Toni Tauladan, S.Si., M.T. ^u
NIP. 19700910 199703 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

KETUA TIM KELOMPOK SUBSTANSI TATA USAHA DIREKTORAT PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN

C-XII-4

DARI	Direktur Prasarana Transportasi Jalan (Dispo Plt Dirjen Hubdat)
TANGGAL	10/12/2024
NO.DIR	C-XII-30
NO TU	C-XII-4

Perihal	Permohonan Tanda Tangan Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
---------	---

KEPADA :

1	YULIE WULANDARI		11	RESTI APRILIA
2	HERAWATI GINTING		12	HANA LUTFIANA
3	RISKA MAHANANI	✓	13	JUNIO BOY WARDANA
4	ARIFAH ARDENY		14	DWI YANTO
5	ANNISA DEWI R		15	SLAMET HANAFI
6	IYAS SUHERI		16	RAHMAT RAMADHAN
7	QURROTUL A'YUNIN NISA		17	ANDI HAYATUL KHAIR
8	BIMA CAHYO GUMELAR		18	SERUNI FIRDAUS
9	GUSTI AYU MAS AGUSTINE ARIANA		19	SUPRONI
10	MAS ADI SANTOSO		20	

TINDAK LANJUT	✓	LAPORAN
FILE		CEK
PELAJARI		SELESAIKAN
KOORDINASI		BAHAS BERSAMA
SIAPKAN BAHAN		WAKILI
UDK		UMP
HADIRI		

Ajukan sesuai ke Bupren



25 10/12/24

(YULIE WULANDARI, SE)

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN****DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT**C-XII-30**

Surat Dari	: Direktur Prasarana Transportasi Jalan (Dispo Plt Dirjen Hubdat)
Nomor Surat	: 391/DPTJ/XII/2024
Tanggal Surat	: 06/12/24
Perihal	Permohonan Tanda Tangan Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	: 9/12/24
Diterima Pukul	: 13 : 32 WIB
No Agenda	: C-XII-30

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☒	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
☒	KTU	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SEKRETARIS SATKER
☐		PARA PPK
☐		SESPRI / ADC

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☒ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☒ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

u di TL sesuai kelentran
Tko

**a.n. DIREKTUR PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN****Pelaksana Harian**

[Signature] 9 12. 2024
SUSANTY PERTIWI



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta (10110)



LEMBAR DISPOSISI

Yth. PLT Direktur Jenderal Perhubungan Darat			
Surat Diterima	Nomor Agenda	N.1.583/DJ/XI/2024	
	Diterima Tanggal	06-Dec-2024	
	Pukul	10:31 WIB	
	Dari	Dir. Prasarana Transportasi Jalan	
	Nomor Surat	391/DPTJ/XII/2024	
	Tanggal	06-Dec-2024	
	Perihal	Permohonan Tanda Tangan Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	
DITERUSKAN KEPADA YTH :			
1.	SESDITJEN		
2.	DIR. LALULINTAS JALAN		
3.	DIR. ANGKUTAN JALAN		
4.	DIR. PRASARANA TRANSPORTASI JALAN		
5.	DIR. SARANA TRANSPORTASI JALAN		
6.	DIR. TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN		
7.	SPRI		
8.	ADC		
ISI DISPOSISI			
1.	Tindak Lanjuti	1.	Untuk Diketahui
2.	Tanggapan / Saran	2.	Untuk Dipelajari dan Laporkan
3.	Harap Mewakili	3.	Untuk Diselesaikan dan Laporkan
4.	Hadir Bersama Saya	4.	Untuk Dilaksanakan dan Laporkan
5.	Siapkan Bahan	5.	Untuk Dikoordinasikan
6.	Jadwalkan	6.	Untuk Diarsipkan

Catatan:



Ahmad Yani, A.T.D., M.T.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 350613
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX

Email
Homepage

: (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
: ditjenhubdat@dephub.go.id
: <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor : 391/DPTJ/XII/2024

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Hal : Permohonan Tanda Tangan Revisi II Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan
Tanggal : 3 Desember 2024

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : UM.207/91/17/DJPD/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Undangan Cek Posisi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 dan Persiapan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Toni Tauladan, S.Si., M.T.
NIP. 197009101997031002



Kementerian Perhubungan RI
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Revisi II

Perjanjian Kinerja

**Direktorat Prasarana
Transportasi Jalan**

2024





REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T.	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	2/12 ²⁴	
2.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, S.T., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	2/12 ²⁴	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	3/12 ²⁴	
4.	Disetujui	Rudy Arya Iskandar, S.T., M.Sc.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	3/12 ²⁴	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.Stat	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	2/24 12	
2.	Diperiksa	Hariyanto, ST	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	2/24 12	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3/24 12	
4.	Disetujui	Windi Susilawati, ST, MT	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3/24 12	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	2/24 /12	
2.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	3/24 /12	
3.	Diperiksa	Jekky Hendri, S,Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	3/24 /12	
4.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	3/24 /12	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penyusun Bahan Usaha, Kelompok Pengawasan dan Evaluasi	2/24 /12	
2.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	2/12	
3.	Diperiksa	Fitroh, S.ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	3/24 /12	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	3/12 24	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	2/12 ²⁴	
2.	Diperiksa	Yulie Wulandari, SE	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	3/12 ²⁴	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	3/12	



**REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jakarta, 3 Desember 2024
Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

**REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	108
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	96,34
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	62,27
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	82,44
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	23,94
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	91
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan

1. Pelayanan transportasi darat
2. Penunjang teknis transportasi darat
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

Anggaran

Rp. 37.205.203.000,00
Rp. 38.801.464.000,00
Rp. 22.797.088.000,00

Disetujui

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jakarta, 3 Desember 2024

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : 391 / OPTJ /XII / 2024
Tanggal : 3 Desember 2024

Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sehubungan dengan adanya Revisi ke-14 DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2024 tanggal 19 November 2024 dan perubahan salah satu pimpinan unit kerja maka perlu ditetapkan Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp76.006.667.000,00 dan Program Dukungan Manajemen masih dengan dengan pagu sebesar Rp22.797.088.000,00.

Lampiran III Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
 Nomor : 391 / DPTJ / XII / 2024
 Tanggal : 3 Desember 2024

**TABEL SEMULA MENJADI
 REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Revisi I Target 2024	Revisi II Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62	0,64	0,70	0,64	0,64	0,64	Target masih sama dengan PK Awal 2024
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	108	114	111	111	108	Target sesuai dengan realisasi akhir
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	12	25	13	13	13	Target masih sama dengan PK Awal 2024
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81	94,61	81,50	81,50	81,50	96,34	Target sesuai dengan realisasi akhir
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	59,02	53,7	53,75	53,75	62,27	Target sesuai dengan realisasi akhir
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	81,75	83,38	81,75	81,75	82,44	Target sesuai dengan realisasi akhir

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Revisi I Target 2024	Revisi II Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	24,88	20,0	24,0	24,0	23,94	Target sesuai realisasi akhir
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	89	89	89	91	Target sesuai realisasi akhir
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73,44	74	74	74	74	Target masih sama dengan PK Awal 2024

Lampiran II Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
 Nomor : 391 / DPTJ /XII/2024
 Tanggal : 3 Desember 2024

**REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	Rasio	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	108	Lokasi	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	13	Lokasi	Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	96,34	%	Subdit TAJ
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	62,27	%	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	82,44	%	Subdit TAJ
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	23,94	%	Subdit PKB
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	91	Nilai	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	Nilai	Subbag Tata Usaha

LAMPIRAN REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SK. 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio	0,64	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim
			IKK 2	Lokasi	108	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			beroperasi adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.					
			IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda DEFINISI: Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 serta PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.	Lokasi	13	FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: 1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit Faspim
2	SK. 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	96,34	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Survei Kinerja Pelayanan di	1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DEFINISI: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang yang diarahkan oleh Petugas Terminal di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kerwenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui barcode ataupun link survey yang berbeda-beda setiap terminalnya. Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-display melalui poster dan/atau banner ataupun melalui link yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal. Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan rating dari 1 sampai 6, dengan rating 6 berarti paling memuaskan dan rating 1 paling tidak memuaskan. Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebagai admin.			Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)		
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A DEFINISI: IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang	%	62,27	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya. Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup: (1) Pelayanan Keselamatan dengan bobot nilai 20%; (2) Pelayanan Keamanan dengan bobot nilai 6%; (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan dengan bobot nilai 18%; (4) Pelayanan Kenyamanan dengan bobot nilai 36%; (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan dengan bobot nilai 18%; (6) Pelayanan Kesenyamanan dengan bobot nilai 2%. Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara online dengan menyebarkan kuisioner google form ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun google drive yang digunakan untuk membuat form kuisioner.			3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	76.0 Unit	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A DEFINISI : IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi : 1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%; 2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%; 3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%. Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui https://siasati.dephub.go.id/ . Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV.	%	82,44	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.					
3	SK. 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DEFINISI: Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB. Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi: a. tata cara pemuatan barang; b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;	%	23,94	PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR : 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit PKB

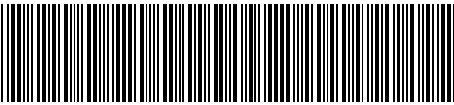
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang; d. dokumen Angkutan Barang; e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.			4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat (Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel, Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Kulwaru, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Losarang, Pemeliharaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel); 7. Penyusunan Assessment Kelayakan UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2024; 8. Standar Pelayanan Minimum UPPKB; 9. Pedoman Teknis Pemasangan dan Konfigurasi Jembatan Timbang Online; 10. Evaluasi dan Pengembangan Alat pada Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;	1.0 Tahun 1.0 Paket 7.0 Unit	
4	SK. 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat DEFINISI: Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek Perencanaan;	Nilai	91	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan	14.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			b) Aspek Kepegawaian (SDM); c) Aspek Keuangan;				Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor;	1.0 Tahun 1.0 Tahun	5. Subbag Tata Usaha
			Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.						
			Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.				5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;	1.0 Tahun	
			Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.				6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	1.0 Tahun	
							7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	1.0 Tahun	
							8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan;	1.0 Tahun	
							9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta;	1.0 Tahun	
							11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ;	1.0 Tahun	
							12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan;	1.0 Tahun	
							13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri;	1.0 Tahun	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi;	1.0 Tahun	
							15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025.	1.0 Tahun	
							16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area;	1.0 Tahun	
							19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait;	1.0 Tahun	
							20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	1.0 Tahun	
							21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	1.0 Kajian	
							22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	1.0 Kajian	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 26. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM. 27. Penyusunan Peta Proses Bisnis Level 2 s.d 3 di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	3.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Paket	
							25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 26. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM. 27. Penyusunan Peta Proses Bisnis Level 2 s.d 3 di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	
5	SK. 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan DEFINISI: 1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan, ketatausahaan, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan. 2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat	Nilai	74	TATA USAHA : Layanan Perkantoran.	1.0 Layanan	Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target Revisi II PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.					
				3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.					



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 022.03.1.352597/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 14
Tanggal : 19 November 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
- Sebesar : Rp. 98.803.755.000 (SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.08 TRANSPORTASI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	98.803.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 98.803.755.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

JAKARTA, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

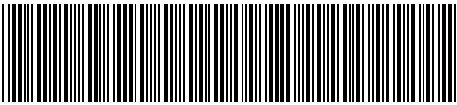
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024



Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	76.006.667.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	37.205.203.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	38.801.464.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	22.797.088.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	22.797.088.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I A. INFORMASI KINERJA

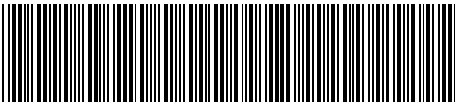


DS:0507-5040-2735-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Program	:	022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			76.006.667.000
Kegiatan	:	4638	Pelayanan Transportasi Darat			37.205.203.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A			
		2. 01	Rata-rata persentase okupansi penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan			
		3. 02	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A			
		4. 03	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP			
		5. 04	Rata-rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4638.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	7,00	Unit, Paket	438.000.000
Rincian Output	:	01 CAC.028	Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	7.00	Unit	438.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	76,00	Unit, Paket	36.767.203.000
Rincian Output	:	01 CBP.032	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal	76.00	Unit	36.767.203.000
Kegiatan	:	4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			38.801.464.000
	:	1. 01	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat			
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	18,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.704.003.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	18.00	Rekomendasi Kebijakan	16.704.003.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32,00	Laporan, Rekomendasi	14.305.638.000
Rincian Output	:	01 FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32.00	Laporan	14.305.638.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0507-5040-2735-5192

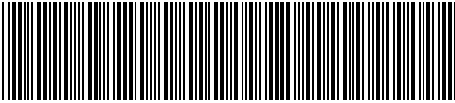
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Klasifikasi Rincian Output	5	:	4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.791.823.000
Rincian Output		:	01	PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) (PN)	1,00	Kajian	2.361.885.000
		:	02	PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) (PN)	1,00	Kajian	2.211.823.000
		:	03	PBF.211	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional) (PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	3.218.115.000
Program		:	022.03.WA	Program Dukungan Manajemen				22.797.088.000
Kegiatan		:	4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat				22.797.088.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	22.797.088.000
Rincian Output		:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	22.797.088.000

JAKARTA, 24 November 2023
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risypudin Nursin, S.I.K.
NIP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I B. SUMBER DANA



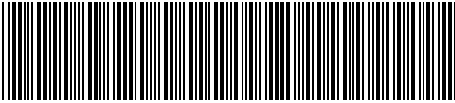
DS:0507-5040-2735-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	98.803.755.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	98.803.755.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
						(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

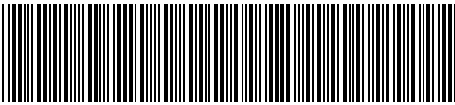


DS:0507-5040-2735-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	-	84.951.156	13.852.599	-	-	98.803.755	01 . 51	
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	62.154.068	13.852.599	-	-	76.006.667		
4638	Pelayanan Transportasi Darat	-	35.940.203	1.265.000	-	-	37.205.203		
4638.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	438.000	-	-	-	438.000		
01	RM	-	438.000	-	-	-	438.000		
4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	35.502.203	1.265.000	-	-	36.767.203		
01	RM	-	35.502.203	1.265.000	-	-	36.767.203		
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	-	26.213.865	12.587.599	-	-	38.801.464		
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.609.744	10.094.259	-	-	16.704.003		
01	RM	-	6.609.744	10.094.259	-	-	16.704.003		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0507-5040-2735-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

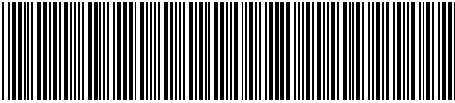
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	14.305.638	-	-	-	14.305.638	01 . 51	
	01 RM	-	14.305.638	-	-	-	14.305.638	133@	
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.298.483	2.493.340	-	-	7.791.823	01 . 51	
	01 RM	-	5.298.483	2.493.340	-	-	7.791.823	133	
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	-	22.797.088	-	-	-	22.797.088	01 . 51	
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	-	22.797.088	-	-	-	22.797.088		
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	22.797.088	-	-	-	22.797.088		
	01 RM	-	22.797.088	-	-	-	22.797.088	133@	
JUMLAH		-	84.951.156	13.852.599	-	-	98.803.755		

JAKARTA, 24 November 2023
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NIP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0507-5040-2735-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

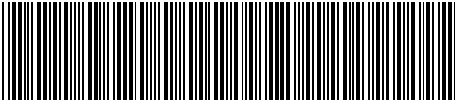
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	398.539	2.915.122	5.122.593	4.812.576	7.431.552	3.131.382	8.586.196	8.831.398	13.251.014	14.753.030	13.928.474	15.641.878	98.803.755
		BELANJA BARANG	398.511	2.872.392	4.797.296	4.736.402	7.090.564	2.367.847	7.311.323	7.211.153	10.713.189	13.264.238	11.544.572	12.643.668	84.951.156
		BELANJA MODAL	28	42.730	325.296	76.174	340.988	763.536	1.274.873	1.620.245	2.537.826	1.488.792	2.383.902	2.998.211	13.852.599
		022.03.GA.4638 Pelayanan Transportasi Darat	777	1.207.087	902.511	1.202.950	3.736.720	66.696	3.495.127	2.203.285	6.021.167	9.088.542	6.617.771	2.662.572	37.205.203
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	751	1.165.556	871.460	1.161.562	3.613.660	64.401	3.374.874	2.127.479	5.813.564	8.775.182	6.411.606	2.560.108	35.940.203
		53 BELANJA MODAL	27	41.531	31.051	41.388	123.059	2.295	120.252	75.805	207.602	313.360	206.166	102.463	1.265.000
		022.03.GA.4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	212.742	983.620	2.824.247	783.691	726.278	2.762.491	3.468.039	4.174.233	5.501.537	3.870.434	5.192.931	8.301.221	38.801.464
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	212.742	982.421	2.530.002	748.905	508.350	2.001.250	2.313.418	2.629.794	3.171.313	2.695.002	3.015.194	5.405.474	26.213.865
		53 BELANJA MODAL	1	1.199	294.245	34.786	217.928	761.241	1.154.621	1.544.439	2.330.223	1.175.432	2.177.737	2.895.747	12.587.599
		022.03.WA.4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	185.019	724.415	1.395.835	2.825.936	2.968.554	302.196	1.623.030	2.453.880	1.728.311	1.794.055	2.117.772	4.678.086	22.797.088
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	185.019	724.415	1.395.835	2.825.936	2.968.554	302.196	1.623.030	2.453.880	1.728.311	1.794.055	2.117.772	4.678.086	22.797.088

JAKARTA, 24 November 2023
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NIP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
IV A. B L O K I R



DS:0507-5040-2735-5192

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

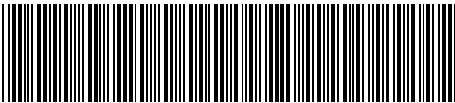
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN		Disposisi: Automatic Adjustment
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.991.834	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 5.991.834		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.701
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
4638	Pelayanan Transportasi Darat	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 169.651
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000.000		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Automatic Adjustment	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	022.03.WA	Program Dukungan Manajemen
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)	4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.000		521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)
	AA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 366.528
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Automatic Adjustment
	521211 Belanja Bahan(RM)	Disposisi: Automatic Adjustment	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.369	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 170.000
	Disposisi: Automatic Adjustment		AA
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	Disposisi: Automatic Adjustment	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000	522141	Belanja Sewa(RM)
	AA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 401.400
	Disposisi: Automatic Adjustment		AA
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi: Automatic Adjustment	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.337.185	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000
			Automatic Adjustment
		Disposisi: Automatic Adjustment	

JAKARTA, 24 November 2023
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NIP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
IV B. C A T A T A N



DS:0507-5040-2735-5192

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 24 November 2023
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NIP. 66110433

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			76,006,667,000	
4638	Pelayanan Transportasi Darat			37,205,203,000	
4638.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat[Base Line]	7.0 Unit, Paket		438,000,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4638.CAC.028	Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	7.0 Unit		438,000,000	
053	Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat			438,000,000	U
A	SUBDIT UPPKB			438,000,000	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya			438,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel	2.0 Unit	40,000,000	80,000,000	
	- Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu	2.0 Lajur	40,000,000	80,000,000	
	- Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru	1.0 lajur	40,000,000	40,000,000	
	- Pemeliharaan Perangkat WDIM di Losarang	1.0 Lajur	40,000,000	40,000,000	
	- Pemeliharaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel	1.0 Unit	198,000,000	198,000,000	
4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat[Base Line]	76.0 Unit, Paket		36,767,203,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4638.CBP.032	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal	76.0 Unit		36,767,203,000	
051	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal			36,767,203,000	U
A	Beutifikasi Terminal Tipe A Ditjen Perhubungan Darat di 76 Lokasi			35,502,203,000	
521211	Belanja Bahan			50,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.133-Jakarta IV) - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Harjamukti Prov. Jawa Barat 1.0 Lok 500,000,000 500,000,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Bangga Mbangun Desa Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 689,382,000 689,382,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Induk Pemalang Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 297,775,000 297,775,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Kebumen Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 516,840,000 516,840,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Pekalongan Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 396,588,000 396,588,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Giri Adipura Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 592,684,000 592,684,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Tingkir Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 445,612,000 445,612,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Tirtonadi Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 599,204,000 599,204,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Bulupitu Banyumas Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 497,029,000 497,029,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Tegal Prov. Jawa Tengah 1.0 Lok 496,987,000 496,987,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Dhaksinaga Prov. DI Yogyakarta 1.0 Lok 493,089,000 493,089,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Pacitan Prov. Jawa Timur 1.0 Lok 344,025,000 344,025,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Banyuwanga Probolinggo Prov. Jawa Timur 1.0 Lok 594,450,000 594,450,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Giwangan Prov. DI Yogyakarta 1.0 Lok 599,700,000 599,700,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Tamanan Prov. Jawa Timur 1.0 Lok 645,798,000 645,798,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Gayatri Prov. Jawa Timur 1.0 Lok 307,800,000 307,800,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Rajekwesi Prov. Jawa Timur 1.0 Lok 858,005,000 858,005,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Indiyang Prov. Jawa Barat 1.0 Lok 250,000,000 250,000,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Batu Ampar Prov. Kalimantan Timur 1.0 Lok 592,092,000 592,092,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Anak Air Prov. Sumbang 1.0 Lok 250,000,000 250,000,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Surodakan Trenggalek Prov. Jawa Timur 1.0 Lok 449,391,000 449,391,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Banjar Prov. Jawa Barat 1.0 Lok 297,884,000 297,884,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Mengwi Prov. Bali 1.0 Lok 571,385,000 571,385,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Terpadu Merak Prov. Banten 1.0 Lok 450,000,000 450,000,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Lebak Prov. Banten 1.0 Lok 1,065,319,000 1,065,319,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Labuan Prov. Banten 1.0 Lok 695,442,000 695,442,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Pakupatan Prov. Banten 1.0 Lok 197,546,000 197,546,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Kertawangunan Prov. Jawa Barat 1.0 Lok 499,770,000 499,770,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal KH. Ahmad Sanusi Prov. Jawa Barat 1.0 Lok 498,693,000 498,693,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal leuwipanjang Prov. Jawa Barat 1.0 Lok 403,031,000 403,031,000 - Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Selo Aji Prov. Jawa Timur 1.0 Lok 500,000,000 500,000,000			35,147,593,000 9	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Entrop Prov. Papua	1.0 Lok	480,544,000	480,544,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Demak Prov. Jawa Tengah	1.0 Lok	250,000,000	250,000,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Tangkoko Prov. Sulawesi Utara	1.0 Lok	500,000,000	500,000,000	*
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Boroko Prov. Sulawesi Utara	1.0 Lok	396,618,000	396,618,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Duingingi Prov. Gorontalo	1.0 Lok	473,860,000	473,860,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Isimu Prov. Gorontalo	1.0 Lok	494,145,000	494,145,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Mambo Prov. Sulawesi Tengah	1.0 Lok	495,544,000	495,544,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Kasintuwu Poso Prov. Sulawesi Tengah	1.0 Lok	496,356,000	496,356,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Tipalayo Prov. Sulawesi Barat	1.0 Lok	500,000,000	500,000,000	*
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Lenteri Sessu Pekkae Prov. Sulawesi Selatan	1.0 Lok	387,912,000	387,912,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Watampone Prov. Sulawesi Selatan	1.0 Lok	391,081,000	391,081,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Samarinda Seberang Prov. Kalimantan Timur	1.0 Lok	669,324,000	669,324,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal WA Gara Prov. Kalimantan Tengah	1.0 Lok	447,754,000	447,754,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Sei Ambawang Prov. Kalimantan Barat	1.0 Lok	450,000,000	450,000,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Mangkang Prov. Jawa Tengah	1.0 Lok	595,404,000	595,404,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Dara Prov. NTB	1.0 Lok	446,100,000	446,100,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Sumer Payung Prov. NTB	1.0 Lok	399,211,000	399,211,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Subang Prov. Jawa Barat	1.0 Lok	500,000,000	500,000,000	*
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Alang Alang Lebar Prov. Sumatera Selatan	1.0 Lok	493,161,000	493,161,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Guntur Melati Prov. Jawa Barat	1.0 Lok	203,294,000	203,294,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Batu Kuning Prov. Sumatera Selatan	1.0 Lok	466,655,000	466,655,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Kayuagung Prov. Sumatera Selatan	1.0 Lok	488,345,000	488,345,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Betung Prov. Sumatera Selatan	1.0 Lok	474,713,000	474,713,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Karya Jaya Prov. Sumatera Selatan	1.0 Lok	478,225,000	478,225,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Rajabasa Prov. Lampung	1.0 Lok	487,079,000	487,079,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Simpang Nangka Prov. Bengkulu	1.0 Lok	400,000,000	400,000,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Muara Bungo Prov. Jambi	1.0 Lok	500,000,000	500,000,000	*
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Bangko Prov. Jambi	1.0 Lok	199,432,000	199,432,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Sri Bulan Prov. Jambi	1.0 Lok	194,458,000	194,458,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Alam Barajo Prov. Jambi	1.0 Lok	800,000,000	800,000,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal BPRS Prov. Riau	1.0 Lok	795,750,000	795,750,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Bangkinang Prov. Riau	1.0 Lok	297,142,000	297,142,000	
-	Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Dumai Prov. Riau	1.0 Lok	397,721,000	397,721,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Kiliran Jao Prov. Sumatera Barat	1.0 Lok	439,257,000	439,257,000	*
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Jati Pariaman Prov. Sumatera Barat	1.0 Lok	488,317,000	488,317,000	
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Simpang Aur Prov. Sumatera Barat	1.0 Lok	486,275,000	486,275,000	
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Bawen Prov. Jawa Tengah	1.0 Lok	564,197,000	564,197,000	
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Pinang Baris Prov. Sumatera Utara	1.0 Lok	500,000,000	500,000,000	
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Sibolga Prov. Sumatera Utara	1.0 Lok	397,584,000	397,584,000	
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Madya Tarutung Prov. Sumatera Utara	1.0 Lok	390,189,000	390,189,000	
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Batoh Prov. Aceh	1.0 Lok	190,349,000	190,349,000	
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Ihoksumawe Prov. Aceh	1.0 Lok	380,425,000	380,425,000	
	- Beutifikasi Terminal Tipe A Terminal Langsa Prov. Aceh	1.0 Lok	665,651,000	665,651,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			304,610,000	
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
B	- Monitoring Kegiatan Beutifikasi Terminal Tipe A	1.0 Tahun	304,610,000	304,610,000	RM
	Pengadaan Fasilitas Pendukung Terminal Tipe A			1,265,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			1,265,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Pengadaan Fasilitas Pendukung Terminal Tipe A Terminal Purworejo Prov. Jawa Tengah	1.0 Lok	747,000,000	747,000,000	
	- Pengadaan Fasilitas Pendukung Terminal Tipe A Terminal Mendolo Wonosobo Prov. Jawa Tengah	1.0 Lok	456,500,000	456,500,000	
	- Pendukung Fasilitas Terminal Tipe A	4.0 Unit	15,375,000	61,500,000	
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			38,801,464,000	
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana[Base Line]	18.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		16,704,003,000	

	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4640.ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	18.0 Rekomendasi Kebijakan		16,704,003,000	
501	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana			16,704,003,000	U
A	SUBDIT TERMINAL ANGKUTAN JALAN			3,216,216,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			594,259,000	9 RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Penyusunan Standar Biaya Pemeliharaan Gedung Terminal Penumpang Tipe A	1.0 Paket	300,000,000	300,000,000	*
	- Penyusunan Standar Biaya Operasional Terminal Penumpang Tipe A	1.0 Paket	294,259,000	294,259,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			52,176,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Pendukung Kegiatan Terminal Tipe A	1.0 Paket	52,176,000	52,176,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan DED Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi Sumbang (Bareh Solok) - Penyusunan DED Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi Riau (Indragiri Hulu) - Penyusunan FS Terminal Penumpang Tipe A Tj. Selor Provinsi Kalimantan Utara	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket	853,957,000 904,095,000 811,729,000	2,569,781,000 853,957,000 904,095,000 811,729,000	RM
B	SUBDIT UPPKB			7,042,780,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Assessment Kelayakan UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2024 - Standar Pelayanan Minimum UPPKB - Pedoman Teknis Pemasangan dan Konfigurasi Jembatan Timbang Online - Evaluasi dan Pengembangan Alat Pada Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket	99,107,000 99,329,000 100,000,000 776,457,000	99,107,000 99,329,000 100,000,000 776,457,000	RM
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Kegiatan Fasilitas Pendukung UPPKB	1.0 Paket	210,521,000	210,521,000	RM
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Masterplan dan DED Fasilitas Penimbangan Kulwaru, Kalitirto dan Taman Martani - Penyusunan Masterplan dan DED Fasilitas Penimbangan Trosobo dan Trowulan - Penyusunan Masterplan dan DED Fasilitas Penimbangan Sedarum dan Singosari - Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Fasilitas Penimbangan Mentawa Baru, Pangkalan Lada dan Kotabaru - Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Fasilitas Penimbangan Datae dan Walenrang	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 3.0 Paket 2.0 Paket	1,413,652,000 978,159,000 994,241,000 473,582,000 475,284,000	5,757,366,000 1,413,652,000 978,159,000 994,241,000 1,420,746,000 950,568,000	RM
C	SUBDIT FASPIM			3,269,338,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Dokumen Evaluasi Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Subdirektorat Kepengusahaan - Penyusunan Dokumen Evaluasi Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan dan Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda - Kajian Tataan Integrasi Moda di Kawasan Perkotaan Aglomerasi - Penyusunan Standar Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket	98,568,000 98,457,000 731,402,000 836,496,000	98,568,000 98,457,000 731,402,000 836,496,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Reviu DED Fasilitas Pendukung Integrasi Antar Moda Stasiun Ketapang - Pelabuhan Ketpang - Penyusunan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Banjarmasin pada koridor 2 - Review DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda BRT Trans Banyumas - Penyusunan DED Fasilitas Pendukung Pelayanan BRT di Koridor 1 (satu) Kota Batam - Penyusunan Feasibility Study (FS) Kebutuhan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Provinsi Jawa Timur	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket	394,716,000 99,501,000 98,346,000 99,443,000 812,409,000	1,504,415,000 394,716,000 99,501,000 98,346,000 99,443,000 812,409,000	RM
D	SUBDIT KEPENGUSAHAAN			3,175,669,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terminal Gayatri dan Terminal Purboyo Provinsi Jawa Timur - Penyusunan Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terminal Kebumen dan Pekalongan - Penyusunan Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) UPPKB Jawa Timur (Mojoagung, Lamongan dan Rambai Gundam)	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket	1,084,811,000 1,048,928,000 1,041,930,000	1,084,811,000 1,048,928,000 1,041,930,000	RM
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	32.0 Laporan, Rekomendasi		14,305,638,000	
4640.FAE.923	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32.0 Laporan		14,305,638,000	
(A)	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat			14,305,638,000	U
	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan			694,874,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Bahan	1.0 Tahun	107,403,000	107,403,000	9 RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	9 RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	557,471,000	557,471,000	RM
(B)	Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan			491,957,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Bahan	1.0 Tahun	14,772,000	14,772,000	9 RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	477,185,000	477,185,000	9 RM
(C)	Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan			387,505,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman: 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			86,380,000	9 RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	86,380,000	86,380,000	*
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			45,180,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	45,180,000	45,180,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			255,945,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	255,945,000	255,945,000	
D	Bimbingan teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan			394,585,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			209,275,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	209,275,000	209,275,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			10,800,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	10,800,000	10,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			16,750,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	16,750,000	16,750,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			157,760,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	157,760,000	157,760,000	
E	Bimbingan teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan			200,346,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			57,100,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	57,100,000	57,100,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			12,200,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	12,200,000	12,200,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			31,206,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	31,206,000	31,206,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			99,840,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	99,840,000	99,840,000	
F	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan			450,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			450,000,000	9 RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	450,000,000	450,000,000	*
G	Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan			304,844,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			62,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	62,000,000	62,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			15,700,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	15,700,000	15,700,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			65,484,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	65,484,000	65,484,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			161,660,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	161,660,000	161,660,000	
H	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor			791,115,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			299,920,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	299,920,000	299,920,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			10,945,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	10,945,000	10,945,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			25,800,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	25,800,000	25,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			128,250,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	128,250,000	128,250,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			326,200,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	326,200,000	326,200,000	
I	Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor			432,687,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			94,800,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	94,800,000	94,800,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			7,800,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	7,800,000	7,800,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			51,700,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	51,700,000	51,700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
 UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			74,447,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	74,447,000	74,447,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			203,940,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	203,940,000	203,940,000	
J	Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor			548,303,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			99,800,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	99,800,000	99,800,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			34,000,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	34,000,000	34,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			399,503,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	399,503,000	399,503,000	
K	Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor			268,069,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			13,600,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	13,600,000	13,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			155,909,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	155,909,000	155,909,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			68,560,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	68,560,000	68,560,000	
L	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor			757,391,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			92,906,000	RM
	- Belanja Barang Operasional	1.0 Tahun	92,906,000	92,906,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			11,790,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	11,790,000	11,790,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			652,695,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	652,695,000	652,695,000	
(M)	Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor			358,280,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			37,594,000	9 RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	37,594,000	37,594,000	*
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			84,125,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	84,125,000	84,125,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			236,561,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	236,561,000	236,561,000	
(N)	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor			282,486,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			66,254,000	RM
	- Belanja Barang Operasional	1.0 Tahun	66,254,000	66,254,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			216,232,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	216,232,000	216,232,000	
(O)	Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua			282,579,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			95,507,000	RM
	- Belanja Barang Operasional	1.0 Tahun	95,507,000	95,507,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			187,072,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	187,072,000	187,072,000	
(P)	Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			330,616,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			17,001,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	17,001,000	17,001,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			67,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	67,000,000	67,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			17,550,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	17,550,000	17,550,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			15,700,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	15,700,000	15,700,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			58,265,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	58,265,000	58,265,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			155,100,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	155,100,000	155,100,000	
(Q)	Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			158,635,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			50,980,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	50,980,000	50,980,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			17,100,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	17,100,000	17,100,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			25,695,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	25,695,000	25,695,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			64,860,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	64,860,000	64,860,000	
(R)	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			205,672,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			41,028,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	41,028,000	41,028,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			18,501,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	18,501,000	18,501,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			146,143,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	146,143,000	146,143,000	
(S)	Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			466,840,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			36,700,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	36,700,000	36,700,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			51,744,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	51,744,000	51,744,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			378,396,000	RM
T	- Perjalanan Dinas Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan	1.0 Tahun	378,396,000	378,396,000 507,588,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			50,000,000	RM
	- Belanja Barang Operasional	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			47,600,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	47,600,000	47,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			409,988,000	RM
U	- Perjalanan Dinas Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan	1.0 Tahun	409,988,000	409,988,000 353,511,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			37,597,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	37,597,000	37,597,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			72,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	72,000,000	72,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			22,960,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	22,960,000	22,960,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			80,243,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	80,243,000	80,243,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			83,092,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	83,092,000	83,092,000	*
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			57,619,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	57,619,000	57,619,000	*
V	Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta			530,200,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			56,940,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	56,940,000	56,940,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.133-Jakarta IV)			474,000	RM
	- Honor Output Kegiatan	1.0 Tahun	474,000	474,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			119,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	119,000,000	119,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			21,274,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	21,274,000	21,274,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			138,790,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	138,790,000	138,790,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			81,690,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	81,690,000	81,690,000	*
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			112,032,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	112,032,000	112,032,000	*
(W)	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ			323,320,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			50,000,000	RM
	- Belanja Barang Operasional	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			53,320,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	53,320,000	53,320,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			220,000,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	220,000,000	220,000,000	
(X)	Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan			513,300,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			24,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	24,000,000	24,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			84,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	84,000,000	84,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			39,200,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	39,200,000	39,200,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			159,361,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	159,361,000	159,361,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			206,739,000	RM
Y	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	206,739,000	206,739,000	
	Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri			1,160,468,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			75,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	75,000,000	75,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			85,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	85,000,000	85,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			75,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	75,000,000	75,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			925,468,000	RM
Z	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	925,468,000	925,468,000	
	Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi			283,341,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			45,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	45,000,000	45,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			36,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	36,000,000	36,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			148,401,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	148,401,000	148,401,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			23,940,000	RM
ZA	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	23,940,000	23,940,000	
	Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025			305,640,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			43,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	43,000,000	43,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			117,060,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	117,060,000	117,060,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			85,580,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	85,580,000	85,580,000	
ZB	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Trasnportasi Jalan			74,440,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			21,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	21,000,000	21,000,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			36,640,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	36,640,000	36,640,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			1,800,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	1,800,000	1,800,000	
ZC	Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			506,200,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			51,200,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	51,200,000	51,200,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			40,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	40,000,000	40,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			385,000,000	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	385,000,000	385,000,000	
ZD	Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area			522,824,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			70,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	70,000,000	70,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			452,824,000	9 RM
ZF	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	452,824,000	452,824,000	*
	Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait			143,151,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			28,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	28,000,000	28,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			11,351,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	11,351,000	11,351,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			43,800,000	RM
ZG	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	43,800,000	43,800,000	
	Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			531,211,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			50,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			25,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	25,000,000	25,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			456,211,000	RM
ZH	- Belanja Jasa Lainnya	1.0 Tahun	456,211,000	456,211,000	
	Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			600,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			600,000,000	RM
ZI	- Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	1.0 Tahun	600,000,000	600,000,000	
	Penyusunan Peta Proses Bisnis Level 2 s.d 3 di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			143,660,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			25,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	25,000,000	25,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			100,000,000	RM
	- Jasa Lainnya	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			18,660,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	18,660,000	18,660,000	*
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana[Base Line]	5.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		7,791,823,000	

	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4640.PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	1.0 Kajian		2,361,885,000	
051	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya)			2,361,885,000	U
A	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)			2,361,885,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			2,361,885,000	RM
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purab	1.0 Paket	1,901,874,000	1,901,874,000	
	Penyusunan Dokumen Andalalin Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Puraba	1.0 Paket	460,011,000	460,011,000	
4640.PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)	1.0 Kajian		2,211,823,000	
501	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing)			2,211,823,000	U
A	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing)			2,211,823,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			2,211,823,000	RM
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Su	1.0 Paket	1,723,596,000	1,723,596,000	
	Penyusunan Dokumen Andalalin Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Sub	1.0 Paket	488,227,000	488,227,000	
4640.PBF.211	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional)	3.0 Rekomendasi Kebijakan		3,218,115,000	
055	Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN			3,218,115,000	U
A	Subdit Faspim			435,897,000	
536111	Belanja Modal Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			435,897,000	RM
	Penyusunan Basics Engineering Design (BED) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Publik di KIPP IKN	1.0 Paket	435,897,000	435,897,000	
B	Subdit KP			2,782,218,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 18

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Pedoman Teknis Standar Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Kawasan IKN	1.0 Paket	724,775,000	724,775,000	RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.133-Jakarta IV) - Peralatan Pendukung Survey Fasilitas Integrasi Moda di Wilayah IKN	1.0 Paket	113,277,000	113,277,000	RM
536111	Belanja Modal Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Feasibility Study (FS) Park and Ride 3 dan Transfer Point di KIPP IKN IC - Penyusunan Basics Engineering Design (BED) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Kota Balikpapan Sebagai Daerah Mitra IKN	1.0 Paket 1.0 Paket	968,531,000 975,635,000	968,531,000 975,635,000	RM
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen			22,797,088,000	
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat			22,797,088,000	
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		22,797,088,000	
4670.EBA.994	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		22,797,088,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			22,797,088,000	U
A	Layanan Perkantoran			5,929,446,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.133-Jakarta IV) - Honorarium Pramubakti Penunjang Petugas Administrasi dan Teknis S1 - Biaya Minum Makanan Untuk Rapat - Pengadaan Air Minum Langganan Surat Kabar Berita Majalah Langganan Bunga Tanaman Hias - Honorarium Pramubakti Penunjang Administrasi dan Teknis SMA - Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi dan PPNNP	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	851,100,000 77,500,000 50,000,000 588,000,000 17,712,000	851,100,000 77,500,000 50,000,000 588,000,000 17,712,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 19

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			614,560,000	9 RM
	- Honorarium Staf Pengelola Keuangan	1.0 Tahun	250,704,000	250,704,000	*
	- Honorarium Penanggung Jawab SAI	1.0 Tahun	3,600,000	3,600,000	
	- Honorarium Koordinator SAI	1.0 Tahun	3,000,000	3,000,000	
	- Honorarium Ketua SAI	1.0 Tahun	2,400,000	2,400,000	
	- Honorarium Anggota SAI	1.0 Tahun	7,200,000	7,200,000	
	- Honorarium Pengurus Penyimpan BMN	1.0 Tahun	3,600,000	3,600,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	1.0 Tahun	30,832,000	30,832,000	*
	- Honorarium PPK	1.0 Tahun	210,112,000	210,112,000	*
	- Honorarium Penguji dan Penandatanganan SPM	1.0 Tahun	35,328,000	35,328,000	*
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	1.0 Tahun	67,784,000	67,784,000	*
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			459,488,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	300,000,000	300,000,000	
	- Belanja Barang Keperluan Satker	1.0 Tahun	159,488,000	159,488,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			34,400,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	1.0 Tahun	14,400,000	14,400,000	
	- Honorarium Pokja	1.0 Tahun	20,000,000	20,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			554,328,000	9 RM
	- Pengadaan Toner dan Tinta Mesin Photocopy dan Printer	1.0 Tahun	159,858,000	159,858,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 Tahun	170,000,000	170,000,000	*
	- Pengadaan Seragam Pegawai Negeri Sipil PNS	1.0 Tahun	54,470,000	54,470,000	
	- Belanja Barang Operasional Pendukung Kegiatan Angkutan Lebaran Angkutan Natal dan Tahun Baru	1.0 Tahun	170,000,000	170,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			630,000,000	RM
	- Alat Tulis Kantor dan Computer Supplies	1.0 Tahun	380,000,000	380,000,000	
	- Pengadaan Barang Cetak	1.0 Tahun	250,000,000	250,000,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			55,000,000	RM
	- Langganan Layanan Internet	1.0 Tahun	20,000,000	20,000,000	
	- Langganan Bunga Tanaman Hias	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000	
	- Langganan PLN dan PAM	1.0 Tahun	20,000,000	20,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			666,400,000	9 RM
	- Sewa Mesin Photocopy 2 Unit	1.0 Tahun	65,000,000	65,000,000	
	- Sewa Gudang Kantor	1.0 Tahun	200,000,000	200,000,000	
	- Sewa Kendaraan Operasional Kantor 5 Unit	1.0 Tahun	401,400,000	401,400,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 20

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 - Biaya STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 - Biaya STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 - Biaya Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Elektronik	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	38,730,000 266,752,000 3,640,000 20,000,000 1,000,000 75,450,000	405,572,000 38,730,000 266,752,000 3,640,000 20,000,000 1,000,000 75,450,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	570,000,000	570,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.0 Tahun	150,000,000	150,000,000	9 RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	150,000,000	150,000,000	* RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	150,000,000	150,000,000	RM
B	<u>Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025</u>			55,386,000	RM
				2,853,112,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	34,000,000	34,000,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Sewa Kendaraan Kegiatan Posko Angkutan Lebaran 2024, Natal dan Tahun Baru 2025	1.0 Paket	100,000,000	100,000,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025	1.0 Paket	2,219,112,000	2,219,112,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Survey dan Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025	1.0 Tahun	500,000,000	500,000,000	RM
C	<u>Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua</u>			13,584,530,000	
	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua	10.0 Lok	1,358,453,000	13,584,530,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 REV 14

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
 UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 ALOKASI Rp. 98,803,755,000

Halaman : 21

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM			430,000,000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			80,000,000	RM
	- Belanja Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	80,000,000	80,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			350,000,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	350,000,000	350,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

JAKARTA PUSAT, 25 November 2024



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
 Pembina Utama Muda (IV/c)



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 350613
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Homepage : <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor :

Yth : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Dari : Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Revisi II Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tanggal : November 2024

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : UM.207/91/17/DJPD/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Undangan Cek Posisi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 dan Persiapan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Revisi II Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Yulie Wulandari
NIP. 19720716 199903 2 002



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	SK.1 Meningkatnya Efektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	865.307.000	Subdit TAJ Subdit Faspm	
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	500.000.000	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	432.896.000	Subdit Faspm
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	81,50	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	-	Subdit TAJ	
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	38.860.346.000	Subdit TAJ	
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	507.638.000	Subdit TAJ	
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	24,0	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Pemasangan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	15.455.892.000	Subdit PKB	
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LIAJ yang akan Dikerjakasakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LIAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Penundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	37.044.234.000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Faspm Subdit KP Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatnya Efektivitas Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	6.291.088.000	Subbag Tata Usaha	

Jakarta, 3 Januari 2024

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	363.307,000	Subdit TAJ Subdit Faspim	
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	450.000,000	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	432.496,000	Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	81,50	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50		Subdit TAJ	
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	38.034.532,000	Subdit TAJ	
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	307.638,000	Subdit TAJ
3	SK.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKD Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	24,0	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pemantauan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pencampuran Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Ketiga; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Ketiga; 6. Pemeliharaan perangkat WDM di Balikpapan; 7. Pemeliharaan perangkat WDM di Kulawi; 8. Pemeliharaan perangkat WDM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Pemasangan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	15.361.375,000	Subdit PKB	
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangr Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LIAJ yang akan dikerjasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyediaan dan Transaksi Kegiatan KPSU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Kerjasama Prasarana LIAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (JAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RIKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPSU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPSU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Batan Suing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prestasi Kelayakan KPSU Transit System dan ITS IKK; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pacu Massa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	36.360.597,000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Faspim Subdit KP Kolempok Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Efisiensi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkaruburan Direktorat Prasarana	Nilai	74	1. Layanan Perkaruboran	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	6.073.446,000	Kolempok Tata Usaha	

Jakarta, 24 Juni 2024

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

TONI TAILADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19760310 199703 1 002



REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB			
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64	Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	387.505.000	Subdit TAJ Subdit Faspm			
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	108	1. Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan.	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1.144.874.000	Subdit TAJ		
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	672.512.000	Subdit Faspm		
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	96,34	Survei Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)	96,34	96,34	96,34	96,34	96,34	96,34	96,34	96,34	96,34	96,34	96,34	-	Subdit TAJ			
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	62,27	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	37.564.004.000	Subdit TAJ		
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	82,44	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	594.931.000	Subdit TAJ		
3	SK.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	23,94	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat (Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel, Pemeliharaan perangkat WDIM di Balongandu, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Kulwaru, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Losarang, Pemeliharaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel); 7. Penyusunan Assessment Kelayakan UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2024; 8. Standar Pelayanan Minimum UPPKB; 9. Pedoman Teknis Pemasangan dan Konfigurasi Jembatan Timbang Online; 10. Evaluasi dan Pengembangan Alat pada Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	16.778.159.000	Subdit PKB	
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	91	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjakasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyediaan dan Transaksi Kegiatan KPB Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelayakan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kurjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Punbaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subreg) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPB Transit System dan ITS BKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 26. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM.	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	35.732.324.000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Faspm Subdit KP Kelompok Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	5.929.446.000	Kelompok Tata Usaha		

Jakarta, 3 Desember 2024

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN JANUARI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1		% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	0,64	100%	865.307.000	100,00%	0,64	45.180.000	100,00%	5,22%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	500.000.000	100,00%	108	-	97,30%	0,00%	TERCAPAI	Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 sam dengan dibandingkan dengan tahun 2023	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	432.896.000	100,00%	12	25.000.000	92,31%	5,78%	TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	%	81,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81,5	81,5	100%	-	100,00%	95,28	-	116,91%	-	TERCAPAI	Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	%	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	53,75	100%	38.860.346.000	100,00%	60,56	-	112,67%	0,00%	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	%	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	81,75	100%	507.638.000	100,00%	82,44	-	100,84%	0,00%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwang; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24	24	100%	15.455.892.000	100,00%	24,90	40.000.000	100,40%	0,26%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WDM dengan Perdirjen Hubdat No PR DKJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1		% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA1	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA1	CAPAIAN ANGGARAN			
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	BKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	89	89	100%	37.044.234.000	100,00%	85	105.335.065	95,51%	0,28%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Perimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	BKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	74	74	100%	6.291.088.000	100,00%	75,15	287.347.278	101,55%	4,57%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-1		% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	(15)	(16)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan		0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	0,64	100%	865.307.000	100,00%	0,64	97.452.095	100,00%	11,26%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	500.000.000	100,00%	108	-	97,30%	0,00%	BELUM TERCAPAI	Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 sam dengan dibandingkan dengan tahun 2023	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	432.896.000	100,00%	12	43.228.500	92,31%	9,99%	BELUM TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81,5	81,5	100%	-	100,00%	95,27	-	116,90%	-	TERCAPAI	Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	53,75	100%	38.860.346.000	100,00%	60,56	1.428.140.000	112,67%	3,68%	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	81,75	100%	507.638.000	100,00%	82,44	150.100.000	100,84%	29,57%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24	24	100%	15.455.892.000	100,00%	24,93	210.970.575	96,13%	1,36%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-1		% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	37.044.234.000	100,00%	85	4.274.571.614	95,51%	11,54%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	6.291.088.000	100,00%	73,44	14.574.556.888	99,24%	231,67%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN MARET TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	REALISASI BULAN-3	% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							Volume (14)	% (15)	% (16)				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	270,854,096	100.00%	31.30%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	-	97.30%	0.00%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	178,734,217	92.31%	41.29%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan; 2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung; 3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda. Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81.5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	-	117.30%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	REALISASI BULAN-3	% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							Volume (14)	% (15)	% (16)				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	2,129,113,367	112.67%	5.48%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81.75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	193,505,740	100.84%	38.12%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimalkan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	343,811,441	92,13%	2.22%	TERCAPAI	Kendala : 1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas; 2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB; 3. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet. Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	REALISASI BULAN-3	% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							Volume	%	%				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Indentifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Penundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transist System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	3,791,789,016	95.51%	10.24%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Realisasi keuangan per 31 Maret 2024 masih dibawah 30%; 2. TL LHE Itjen masih belum mencapai 100% Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	1,786,084,402	97.81%	28.39%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan jumlah pegawai; 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN APRIL TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-4				REALISASI BULAN-4		% CAPAIAN BULAN-4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	0,64	100%	915.307.000	100,00%	0,64	352.595.286	100,00%	38,52%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	450.000.000	100,00%	108	-	97,30%	0,00%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya Jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan Jumlah SDM di lapangan Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tipe dibanding Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	432.896.000	100,00%	12	178.734.217	92,31%	41,29%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan; 2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung; 3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda. Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81,5	81,5	100%	-	100,00%	96,01	-	117,80%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan ekspedisi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan meningkatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM BPTD Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	53,75	100%	38.860.346.000	100,00%	60,56	4.124.151.367	112,67%	10,61%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-4			REALISASI BULAN-4		% CAPAIAN BULAN-4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB			
								TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN						
									volume	%								Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		IKK.3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	81,75	100%	507.638.000	100,00%	82,44	200.345.740	100,84%	39,47%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimalkan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan	
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK.1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/R rehabilitasi/Perbaikan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDM di Balongandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDM di Kulwanu; 8. Pemeliharaan perangkat WDM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Pemasangan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24	24	100%	15.555.892.000	100,00%	23,75	381.883.660	92,13%	2,45%	TERCAPAI	Kendala : 1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas; 2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB; 3. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet. Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR. DRJD.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyapan dan Transaksi Kegiatan KPBu Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepeguasaan; 13. Koordinasi Kolembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Teraipad Penyusunan RAKAL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Batan Subang) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBu Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	36.944.234.000	100,00%	85	6.609.661.604	95,51%	17,89%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Realisasi keuangan per 31 Maret 2024 masih dibawah 30%; 2. TL LHE IJjen masih belum mencapai 100% Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepeguasaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	6.291.088.000	100,00%	72,38	2.233.175.100	97,81%	35,50%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan Jumlah pegawai; 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN MEI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-5				REALISASI BULAN-5		% CAPAIAN BULAN-5		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0.64	0.64	100%	915,307,000	100,00%	0.64	420,807,276	100,00%	45.93%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	111	100%	450,000,000	100,00%	108	-	97.30%	0.00%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya Jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 3 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan	
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	13	100%	432,896,000	100,00%	12	205,765,199	92.31%	47.53%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan; 2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung; 3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda. Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terrealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81.5	81.5	100%	-	100,00%	96.72	-	118.67%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan meningkatkan Saluran Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Digen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan	
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.75	53.75	100%	38,860,346,000	100,00%	60.56	6,977,789,197	112.67%	17.96%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-5				REALISASI BULAN-5		% CAPAIAN BULAN-5		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN						
									volume	%					Volume				Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81.75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81.75	81.75	100%	507,638,000	100,00%	82.44	200,345,740	100.84%	39.47%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimisasikan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan pengirputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATTI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan	
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Pencapaian Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WIDM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WIDM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WIDM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24	24	100%	15,555,892,000	100,00%	23.75	3,410,184,392	92,13%	21.92%	TERCAPAI	Kendala : 1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas; 2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB; 3. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet. Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Pedirjen Hubdat No PR DRUD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Pedirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamaakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBu Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAWIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBu Transit System dan ITS ISN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	36,944,234,000	100,00%	87	7,209,124,340	97.75%	19.51%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Realisasi keuangan per 31 Mei 2024 masih dibawah 30%; 2. TL LHE Itjen masih belum mencapai 100% Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	6,291,088,000	100,00%	72.71	2,549,146,713	98.26%	40.52%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan jumlah pegawai; 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN JUNI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6		% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume (9)	% (10)	volume (11)	% (12)	Volume (13)	Volume (14)	% (15)	% (16)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	0,64	100%	963.307.000	100,00%	0,64	442.515.529	100,00%	45,94%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	450.000.000	100,00%	108	-	97,30%	0,00%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	432.896.000	100,00%	12	205.765.199	92,31%	47,53%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan; 2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung; 3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda. Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasionalis; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81,5	81,5	100%	-	100,00%	96,72	-	118,67%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan meningkatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	53,75	100%	38.234.532.000	100,00%	60,56	7.200.749.197	112,67%	18,83%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6		% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	81,75	100%	507.638.000	100,00%	82,44	200.345.740	100,84%	39,47%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimalkan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balongandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	24	24	100%	15.661.339.000	100,00%	23,50	3.440.839.052	102,08%	21,97%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Kurangnya SOM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas; 2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB; 3. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet. Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Pedirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Pedirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	36.260.597.000	100,00%	87	9.053.169.524	97,75%	24,97%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Realisasi keuangan per 31 Mei 2024 masih dibawah 30%; 2. TL LHE Itjen masih belum mencapai 100% Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	6.373.446.000	100,00%	72,71	2.742.912.353	98,26%	43,04%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan jumlah pegawai tanpa diimbangi dengan penambahan prasarana perkantoran (laptop/PC, meja/kursi); 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN JULI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7		% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKX 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0.64	0.64	100%	1,049,356,000	100.00%	0.64	552,272,502	100.00%	52.62%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKX 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	519,139,000	100.00%	108	-	97.30%	0.00%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melibatkan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKX 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	268,359,000	100.00%	12	230,767,193	92.31%	85.99%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan; 2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung; 3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda. Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPJT.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKX 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81.5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81.5	81.5	100%	-	100.00%	95.95	-	117.73%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan meningkatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM 3KP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKX 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uj Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53.75	53.75	100%	554,957,000	100.00%	60.56	10,143,502,388	112.67%	1827.80%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7		% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN						
									volume	%					Volume				Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		IKK.3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81.75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancangan Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81.75	100%	486,926,000	100,00%	82.44	200,345,740	100.84%	41.15%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimalkan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Dikot Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan		
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK.1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Pencapaian Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDM di Balongandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDM di Kulawi; 8. Pemeliharaan perangkat WDM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penebaran ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24	24	100%	16,619,349,000	100,00%	23.50	4,924,873,960	102,08%	29.63%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas; 2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB; 3. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet. Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WDM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WDM dengan Pedirgin Hubdat No PR DRJ 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancangan Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Pedirgin SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLA yang akan Dikerjakamkan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPB Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLA; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Rendra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subang) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPB Transit System dan ITS IKK; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	22,120,098,000	100,00%	87	11,825,320,384	97.75%	53.46%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Realisasi keuangan per 31 Juli 2024 masih dibawah 35%; 2. TL UHE Ijen masih belum mencapai 100% Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	7,197,588,000	100,00%	72.37	2,961,575,401	97.80%	41.15%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan jumlah pegawai tanpa dibagi dengan penambahan prasarana perkantoran (laptop/PC, meja/furni); 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume (9)	% (10)	volume (11)	% (12)	Volume (13)	Volume (14)	% (15)	% (16)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	0,64	100%	963.307.000	100,00%	0,64	552.272.502	100,00%	57,33%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	450.000.000	100,00%	108	-	97,30%	0,00%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	432.896.000	100,00%	12	230.767.193	92,31%	53,31%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan; 2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung; 3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda. Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81,5	81,5	100%	-	100,00%	95,70	117,42%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan	
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	53,75	100%	38.234.532.000	100,00%	60,56	10.143.502.388	112,67%	26,53%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAKIN KINERJA	CAPAIAKIN ANGGARAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%	(17)	(18)	(19)		
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	81,75	100%	507.638.000	100,00%	82,44	200.345.740	100,84%	39,47%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimalsasikan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan	
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Bolonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Peneeraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24	24	100%	15.661.339.000	100,00%	23,70	4.924.873.960	101,25%	31,45%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas; 2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB; 3. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet. Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjakamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyilapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	36.260.597.000	100,00%	87	11.825.320.384	97,75%	32,61%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Realisasi keuangan per 31 Agustus 2024 masih dibawah 35%; 2. TL LHE Itjen masih belum mencapai 100% Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	6.373.446.000	100,00%	72,37	2.961.575.401	97,80%	46,47%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan jumlah pegawai tanpa diimbangi dengan penambahan prasarana perkantoran (laptop/PC, meja/kursi); 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0.64	0.64	100%	1,085,761,000	100,00%	0.64	805,840,040	100.00%	74.22%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	450,000,000	100,00%	108	-	97.30%	0.00%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	432,896,000	100,00%	13	230,767,193	100.00%	53.31%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81.5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81.5	81.5	100%	-	100,00%	96.17	-	118.00%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM BP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53.75	53.75	100%	38,167,908,000	100,00%	60.56	19,451,944,300	112.67%	50.96%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81.75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81.75	81.75	100%	593,279,000	100,00%	62.44	254,205,700	100.84%	42.70%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimalsasikan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan utang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24	24	100%	15,688,971,000	100,00%	23.71	9,123,306,606	101,21%	58.15%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WDM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WDM dengan Perdirjen Hubdat No PR.08/DU.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK/736; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Mengoptimalkan dan pemertaan jaringan internet untuk UPPKB;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLA) yang akan Dikerjakamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyipan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLA); 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	36,423,494,000	100,00%	87	19,760,645,714	97.75%	54.25%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Realisasi keuangan per 30 September 2024 masih dibawah 60%; 2. TL LHE Ijen masih belum mencapai 100% Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penila penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	6,039,446,000	100,00%	72.37	3,568,212,313	97.80%	59.08%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan jumlah pegawai tanpa dimbangi dengan penambahan prasarana perkantoran (laptop/PC, meja/kursi); 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN OKTOBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-10				REALISASI BULAN-10		% CAPAIAN BULAN-10		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	100%	1.082.379.000	100,00%	0,64	886.177.206	100,00%	81,87%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	450.000.000	100,00%	108	-	97,30%	-	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	627.589.000	100,00%	13	560.830.482	100,00%	89,36%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81,5	81,5	100%	-	100,00%	96,28	-	118,13%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Masal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	53,75	100%	37.564.004.000	100,00%	60,56	23.977.443.820	112,67%	63,83%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-10				REALISASI BULAN-10		% CAPAIAN BULAN-10		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		BKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	81,75	100%	594.931.000	100,00%	82,44	594.930.700	100,84%	100,00%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimisasikan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan	
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	BKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat (Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel, Pemeliharaan perangkat WDIM di Balongandu, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Kulwaru, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Losarang, Pemeliharaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel); 7. Penyusunan Assessment Kelayakan UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2024; 8. Standar Pelayanan Minimum UPPKB; 9. Pedoman Teknis Pemasangan dan Konfigurasi Jembatan Timbang Online; 10. Evaluasi dan Pengembangan Alat pada Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	24	24	100%	16.779.723.000	100,00%	23,92	11.249.529.863	100,33%	67,04%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Pengoptimalan dan pemerataan jaringan internet untuk UPPKB; 9. Melakukan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) UPPKB Tahun 2024.	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	BKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 26. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	35.595.683.000	100,00%	89	22.176.485.910	100,00%	62,30%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Melakukan percepatan penyerapan anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan prognosa yang telah direncanakan; 3. Melakukan TL LHE Ijten periode 2022 s.d 2024 sesuai dengan data dukung yang direkomendasikan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	BKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	6.189.446.000	100,00%	72,71	4.033.310.416	98,26%	65,16%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan jumlah pegawai tanpa diimbangi dengan penambahan prasarana perkantoran (laptop/PC, meja/kursi); 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN DESEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-12				REALISASI BULAN-12		% CAPAIAN BULAN-12		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.64	Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0.64	0.64	100%	387,505,000	100,00%	0.64	374,124,470	100,00%	96.55%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	108	1. Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	108	108	100%	1,144,874,000	100,00%	108	649,445,730	100,00%	56.73%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A. 4. Mengoptimalkan SDM yang ada pada terminal sesuai dengan kondisi ideal masing-masing terminal. 5. Melakukan optimalisasi anggaran operasional berdasarkan kondisi ideal sesuai ketersediaan jumlah SDM di lapangan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	672,512,000	100,00%	13	652,395,408	100,00%	97.01%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	96.34	Survei Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	96.34	96.34	100%	-	100,00%	96.34	-	100,00%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan meningkatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	62.27	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	62.27	62.27	100%	37,564,004,000	100,00%	62.27	34,071,795,689	100,00%	90.70%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-12				REALISASI BULAN-12		% CAPAIAN BULAN-12		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	82.44	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	82.44	82.44	100%	594,531,000	100,00%	82.44	594,930,700	100.00%	100.00%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimisasikan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percapatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SASASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	23.94	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat (Pemeliharaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel, Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Kulwaru, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Losarang, Pemeliharaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel); 7. Penyusunan Assessment Kelayakan UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2024; 8. Standar Pelayanan Minimum UPPKB; 9. Pedoman Teknis Pemasangan dan Konfigurasi Jembatan Timbang Online; 10. Evaluasi dan Pengembangan Alat pada Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	23.94	23.94	100%	16,778,159,000	100,00%	23.94	16,747,470,241	100.00%	99.82%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outbok UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Pendirian Hubdat No PR DRUD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.735; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Pengoptimalan dan pemerataan jaringan internet untuk UPPKB; 9. Melakukan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) UPPKB Tahun 2024.	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	91	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBu Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepenguasaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subang) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBu Transit System dan ITS IKK; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 26. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	91	91	100%	35,732,324,000	100,00%	91	34,806,409,250	100.00%	97.41%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilaian penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Melakukan percapatan penyerapan anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan prognosis yang telah direncanakan; 3. Melakukan TL LHE Itjen periode 2022 s.d 2024 sesuai dengan data dukung yang direkomendasikan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepenguasaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	5,929,446,000	100,00%	74	4,911,905,778	100.00%	82.84%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Adanya penambahan prasarana perkantoran (laptop/PC, meja/kursi) pada saat terdapat penambahan pegawai baru; 2. Meningkatkan kecepatan internet; 3. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor;	Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024

BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-11				REALISASI BULAN-11		% CAPAIAN BULAN-11		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.64	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan.	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0.64	0.64	100%	1,082,379,000	100,00%	0.64	886,177,206	100.00%	81.87%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	111	100%	450,000,000	100,00%	108	-	97.30%	-	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A. 2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan. 3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan. Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	13	13	100%	627,589,000	100,00%	13	560,830,482	100.00%	89.36%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81.5	Survei Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81.5	81.5	100%	-	100,00%	96.59	-	118.52%	-	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM KP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.75	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53.75	53.75	100%	37,564,004,000	100,00%	60.56	23,977,443,820	112.67%	63.83%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat. 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-11				REALISASI BULAN-11		% CAPAIAN BULAN-11		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81.75	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81.75	81.75	100%	594,931,000	100.00%	62.44	594,930,700	100.84%	100.00%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan mengoptimisasikan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat (Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel, Pemeliharaan perangkat WDM di Balongandu, Pemeliharaan Perangkat WDM di Kulwan, Pemeliharaan Perangkat WDM di Losarang, Pemeliharaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel); 7. Penyusunan Assessment Kelayakan UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2024; 8. Standar Pelayanan Minimum UPPKB; 9. Pedoman Teknis Pemasangan dan Konfigurasi Jembatan Timbang Online; 10. Evaluasi dan Pengembangan Alat pada Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24	24	100%	16,779,723,000	100.00%	23.92	11,249,529,863	100.33%	67.04%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WDM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WDM dengan Pedirjen Hubdat No PR DRD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Pedirjen SK.736; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Pengoptimalan dan pemerataan jaringan internet untuk UPPKB; 9. Melakukan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) UPPKB Tahun 2024.	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana (LJA) yang akan Dikerjakamkan; 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyipaan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana (LJA); 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 25. Investor Gathering Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 26. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	89	100%	35,595,683,000	100.00%	89	22,176,485,910	100.00%	62.30%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Melakukan percepatan penyerapan anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan prognosis yang telah direncanakan; 3. Melakukan TL LHE Itjen periode 2022 s.d 2024 sesuai dengan data dukung yang direkomendasikan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	1. Layanan Perkantoran	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	74	100%	6,189,446,000	100.00%	72.71	4,033,310,416	98.26%	65.16%	BELUM TERCAPAI	Kendala : 1. Adanya penambahan jumlah pegawai tanpa diimbangi dengan penambahan prasarana perkantoran (laptop/PC, meja/kursi); 2. Terbatasnya kecepatan internet; Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

**IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan
per 31 Desember 2024**

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS					
				PRASARANA TRANSPORTASI JALAN					
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba				Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba (TA. 2022)	1	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang						
	3	3	KSPN Borobudur	1. Terminal Purworejo 2. Terminal Tidar		1			1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	3. Terminal Pandaan Pasuruan 4. Terminal Banyuwangga - Kota Probolinggo		1			1
	5	5	KSPN Mandalika	5. Terminal Mandalika - Kota Mataram		1	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2021)	1	1
	6	6	KSPN Lab Bajo				12. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Lab Bajo (tahun 2022)	1	1
	7	7	KSPN Likupang	6. Terminal Liwas 7. Terminal Malalayang		1			1
	8	8	KSPN Wakatobi						
	9	9	KSPN Morotai						
	10	10	KSPN Raja Ampat						
9 Kawasan Industri	11	1	KI Sei Mangkei						
	12	2	KI Galang Batang						
	13	3	KI Bintan Aerospace						
	14	4	KI Sadai						
	15	5	KI Ketapang						
	16	6	KI Surya Borneo						
	17	7	KI Palu	8. Terminal Mamboro, Kota Palu		1			1
	18	8	KI Teluk Weda						
	19	9	KI Teluk Bintuni						

**IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan
per 31 Desember 2024**

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS					
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN					
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang					
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe	9. Terminal Paya Ilang, Kota Lhokseumawe	1			1
	22	3	KPBPB Batam Bintang Karimun					
	23	4	KEK Tanjung Lesung	10. Terminal Labuan, Kab. Pandeglang	1	13. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Tanjung Lesung (dilaksanakan tahun 2024)	1	1
	24	5	KEK Mandalika*					
	25	6	KEK MBTK	11. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda	1. TBI Entikong - Prov. Kalbar	1		1
	26	7	KEK Bitung	12. Terminal Tangkoko, Kota Bitung	1			1
	27	8	KEK Morotai					
	28	1	Banda Aceh	13. Terminal Batoh, Kota Banda Aceh	1			1
	29	2	Mebidangrov (Medan dsk)	14. Termial Amplas, Kota Medan 15. Terminal Pinang Baris, Kota Medan	1			1
	30	3	Padang dsk	16. Terminal Anak Air, Kota Padang	1			1
	31	4	Pekanbaru	17. Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru	1	Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)	1	1
	32	5	Dumai	18. Terminal Dumai, Kota Dumai	1			1
	33	6	Batam					
	34	7	Jambi	19. Terminal Alam Barajo, Kota Jambi	1			1
	35	8	Pelembang dsk	20. Terminal Alang-alang Lebar, Kota Palembang, 21. Terminal Karya Jaya, Kota Palembang	1			1
	36	9	Bengkulu	22. Terminal Air Sebakul	1			1
	37	10	Pangkal Pinang					
	38	11	Bandar Lampung	23. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung	1			1
	39	12	Jabodetabek	24. Terminal Kampung Rambutan, Kota Jakarta Timur 25. Terminal Kalideres, Kota Jakarta Barat 26. Terminal Baranangsiang, Kota Bogor 27. Terminal Jatijajar, Kota Depok 28. Terminal Induk Bekasi, Kota Bekasi 29. Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan 30. Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang	1			1
	40	13	Serang	31. Terminal Pakupatan, Kota Serang	1			1

**IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan
per 31 Desember 2024**

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS						
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN						
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)	
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	41	14	Cilegon	32. Terminal Merak, Kab. Cilegon		1		1	
	42	15	Bandung Raya	33. Terminal Cicaheum, Kota Bandung 34. Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung		1		1	
	43	16	Cirebon	35. Terminal Harjamukti, Kota Cirebon		1		1	
	44	17	Surakarta	36. Terminal Tirtanadi, Kota Solo		1		1	
	45	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	37. Terminal Mangkang, Kota Semarang 38. Terminal Bawen, Kab. Semarang 39. Terminal Tingkir, Kota Salatiga		1		1	
	46	19	Cilacap	40. Terminal Bangga Mbangun Desa		1		1	
	47	20	Yogyakarta	41. Terminal Giwangan		1		1	
	48	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	42. Terminal Osowilangun, Kota Surabaya 43. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo		1		1	
	49	22	Malang	44. Terminal Arjosari, Kota Malang		1		1	
	50	23	Sarbagita	45. Terminal Mengwi, Kab. Badung		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Perkotaan Skema Buy The Service di Denpasar (dukungan G20 TA. 2022)	1	1
	51	24	Mataram Raya	Terminal Mandalika - Kota Mataram		1		1	
	52	25	Kupang	46.Terminal Bimoku	2. TBI Motamasin - Prov. NTT, 3. TBI Wini - Prov. NTT	1		1	
	53	26	Pontianak						
	54	27	Palangkaraya	47. Terminal W.A Gara		1		1	
	55	28	Banjarmasin dsk	48. Gambut Barakat		1		1	
	56	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	49. Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan 50. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda		1		1	
	57	30	Tarakan						
	58	31	Gorontalo	51. Terminal Isimu, Kab. Gorontalo 52. Terminal Duingingi, Kota Gorontalo		1		1	
	59	32	Manado	Terminal Liwas Terminal Malalayang		1		1	
	60	33	Bitung	Terminal Tangkoko		1		1	
	61	34	Palu	Terminal Mamboro		1		1	
	62	35	Maminasata (Makassar dsk)	53. Terminal Daya, Kota Makasar		1		1	
	63	36	Kendari	54. Terminal Puuwatu, Kota Kendari		1		1	
	64	37	Ambon						
	65	38	Ternate						
	66	39	Sorong						
	67	40	Timika						

**IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan
per 31 Desember 2024**

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS				
				PRASARANA TRANSPORTASI JALAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM
	68	41	Jayapura	55. Terminal Entrop, Kota Jayapura		1		1
	69	42	Merauke					

42

6

44

*untuk lokasi yang tidak ada nomor = 1 terminal melayani 2 kawasan

$$\text{Realisasi (Rasio)} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s. d tahun}(n)(10 \text{ DPP, } 9 \text{ KI, } 8 \text{ KEK, } 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, } 9 \text{ KI, } 8 \text{ KEK, } 42 \text{ PKN) yang ditetapkan}}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad \text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{44 \text{ wilayah (irisan simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,64$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,64}{0,64} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Kawasan yang telayani Terminal	Jumlah KSN yg terlayani Terminal Tipe A / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	42
Rasio Kawasan yang terlayani terminal		0.61
Jumlah Kawasan yang telayani Faspim	Jumlah KSN yg terlayani Faspim / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	6
Rasio Kawasan yang terlayani Faspim		0.09
Jumlah Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan)	Jumlah KSN terlayani Simpul Prasarana Transportasi Jalan / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	44
Rasio Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan)		0.64

PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2024[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERSENTASE PENYEDIAAN FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA S.D 31 DESEMBER 2024

Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020)
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020)
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020)
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020)
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021 dan untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP Tahun 2022)
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di KSPN Danau Toba (TA. 2022)
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di KSPN Borobudur (TA. 2022)
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Lab Bajo (TA. 2022)
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Perkotaan Skema Buy The Service di Denpasar (dukungan G20 TA. 2022)
13. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Tanjung Lesung (Tahun 2024)

IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A 2024

SATUAN KERJA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
Gayatri	99.91	98.50				98.77	97.12	100.00	99.25	99.12	98.08	99.25
Sei Ambawang	94.52	95.21	91.94	91.14	93.65	99.87	94.65	94.83		93.46	95.70	94.70
Selo Aji	96.20	97.56				95.74	98.40	96.70	94.74	95.92	98.55	97.33
Isimu	85.03	86.06			85.00	88.88	95.15	85.00	85.00	96.79	96.46	85.00
Kiliran Jao												
Tamanan	98.96	99.23		100.00	100.00	99.34	99.66	97.91	99.69	98.44	98.33	99.49
Tanjung Pinggir						97.86	100.00	100.00	100.00			100.00
Madya Tarutung		90.68				89.85	89.80	91.55		90.20	98.57	89.38
Dhaksinarga	93.42	93.96		95.73	99.21	98.13	97.44	99.11	96.16	100.00	97.22	100.00
Batu Ampar	97.93	85.94					94.75	100.00		100.00		
Tingkir	97.16	96.44	97.79	96.38	98.19	96.25	96.81	96.11	97.67	96.61	97.08	96.59
Bareh Solok			100.00	95.64	92.38	94.95	89.44	92.28	95.15	93.73	93.52	94.62
Arjosari	93.47	93.93				95.87	91.20	97.77	94.38	87.79	89.63	93.40
Purboyo	99.86	95.94				99.20	100.00	98.26	98.82	98.70	98.94	99.22
Bayuangga	98.71	99.27		99.77	100.00	98.88	93.52	91.94	96.86	100.00	99.18	100.00
Kasintuwu	95.44	98.44	100.00	85.00	100.00	96.23	95.21	94.45				
Rajekwesi	89.90	89.54		90.44	88.66	92.94	88.02	90.88	89.41	89.93	89.47	90.16
Pandaan	94.07	93.29		100.00	100.00	96.83	89.34	94.39	92.73	85.60	97.77	96.48
Samarinda Sebrang	88.24	96.25		80.31			100.00	100.00				
Simpang Periuk	99.53	99.28		97.19		99.53	99.53	100.00				
Bangko	100.00	97.38				97.50	100.00	90.25	94.75			96.63
Arya Wiraraja	99.12	99.86				98.57	98.97	98.72	97.98	98.04	98.60	97.22
Boroko							84.06					
Subang	97.47	97.27	99.25		100.00	97.08	95.31	98.21	97.39	98.49	96.96	97.07
Sumer Payung		85.00										
Mangkang	96.91	96.47	95.88	96.16		95.34	95.31	95.69	93.89	94.69	94.56	94.58
Giri Adipura	96.37	98.22			97.66	98.62	98.43	98.91	100.00	99.29	98.02	95.74
Sarolangun	100.00					96.81	100.00	96.63	94.75	99.06	98.50	94.75
Alang-alang lebar	88.15	87.97				87.00	85.00	85.47				
Pacitan	93.69	92.82				91.70	95.18	95.94	92.33	93.20	95.76	96.64
Kembang Putih	88.14	95.20				95.22	98.31	96.02	89.96	97.19	94.44	92.50
Mamboro												
Amplas		100.00	85.00	99.06	95.00	96.85	96.96	95.30	99.13	98.70	96.28	97.20
Purabaya	96.30	96.62		96.01	98.05	97.46	97.21	95.65	95.44	95.14	94.32	95.42
Kertonegoro	100.00	97.55		100.00	100.00	97.70	98.14	98.81	98.04	98.17	97.49	97.54
Watampone												
Cikampek												
Betung		73.25				89.69	91.56	70.00				
Pinang Baris	97.19	89.44		100.00		94.54	94.68	93.77	96.16	98.80	96.68	97.98
Pasuruan												
Bangkinang	98.88	92.02					97.00	100.00				
Patria	98.04	97.75	96.25	98.47	94.69	97.65	97.91	97.94	98.27	98.75	97.68	98.74
Mengwi	95.84	96.97	94.14	100.00	99.30	97.33	95.44	94.61		94.46	95.93	96.68
Gambut Barakat	98.36	98.27		97.66	100.00	97.18	98.03	97.35	97.98	97.43	96.84	96.50
Tawang Alun	95.05	95.73		97.80	99.50	98.77	96.38	97.83	100.00	97.93	98.94	99.16
W.A Gara												
Mandalika	100.00	86.88				95.03	91.03	82.84				
Harjamukti	99.41	98.43		98.24	100.00	99.10	98.82	96.73	97.42	96.90	96.99	96.01
Dara												
Ir. Soekarno Klaten	99.08	97.35		91.38		97.47	96.12	96.69	96.67	95.57	96.76	97.17
Simpang Aur		90.25	91.75	100.00	88.38	95.63	93.71	97.80	100.00	99.89	99.14	98.56
Giwangan	94.63	94.58	96.02	93.50	93.28	94.51	95.43	94.95	96.10	95.73	96.10	95.16
Cepu	93.89	94.45				96.73	97.16	97.90	95.50	97.29	96.49	96.66
Guntur Melati	97.66	98.98		97.73	99.78	99.08	99.30	98.81	99.14	99.45	99.50	98.56
Tegal	95.54	97.18		94.78	91.56	96.33	95.96	94.26	96.14	95.95	96.74	96.74
Satpe TTA Sukabumi	96.51	98.24		100.00		98.06	97.01	95.20		96.98	96.29	92.55
Kuningan	94.09	94.39		93.51	94.69	99.73	96.72	97.75	94.74	96.01	96.37	96.26
Puwatu	95.38	88.60	89.88	85.00	90.34	94.73	95.26	95.69				
Indihiang	94.21	94.31	100.00			100.00	97.43	97.19				
Alam Barajo	93.70	99.25		83.31		100.00		99.06	96.63			95.13
Betan Subing												
Simbuang							97.75					
Satpei TTA Leuwi Panjang	95.59	97.24	100.00		99.25	97.06	99.69	97.09		96.16	97.24	96.84
Kayuagung	96.94	99.30		100.00	100.00	97.75	97.06	94.79				
Surodakan	98.59	99.94				100.00	100.00	99.35	100.00	99.86	98.33	99.17
Liwas												
Simpang Nangka	91.75	91.97				94.36	93.75	94.83	100.00	93.88	92.41	97.29
Kiliran Jao				99.53	99.25	99.93	99.28	97.85	93.59	97.58	95.47	94.63
Induk Lumpue												
Jati Kudus	96.74	96.22	100.00	99.69	100.00	98.22	98.29	97.62	96.96	97.23	96.59	94.43

Lebak	92.08	95.50				90.81		90.72		98.65	98.26	98.34
Ciakar	95.01	97.23		97.35	92.73	97.36	96.85	97.42		94.48	94.21	92.93
Tidar	94.63	94.41	100.00	96.49	96.94	95.83	95.77	95.80	99.69	95.13	93.37	96.06
Batu Kuning	98.88	99.35		99.00		99.14	98.47	98.44				
Pakupatan	97.52	98.41		95.50	99.53	98.46	97.81	98.76			98.55	98.55
Tangkoko	99.63	100.00	91.75	98.62	99.87	99.18	99.25	99.29			98.94	99.06
Labuan	97.95	99.16					97.55	98.20	99.06	95.70	98.11	99.45
Arya Wiraraja				100.00								
Payung Sekaki		99.88		96.11		97.16	95.38					
Tipalayo							89.88	100.00				
Bawen	93.05	94.03				98.09	94.38	95.50	92.41	95.69	95.69	96.00
Induk Pemalang	94.70	95.73	100.00	95.69		98.98	95.13	96.79	97.98	97.58	97.05	96.23
Bobot Sari	97.82	97.16	80.69	97.00	100.00	97.08	96.75	96.87	91.14	98.26	94.93	97.77
Karya Jaya	93.25	98.13		85.00	84.06	89.48	84.69	85.23				
Kebumen	96.13	93.53	100.00	95.78	100.00	95.55	98.25	96.63	96.11	93.10	91.98	98.27
Sibolga		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00		100.00	
Lahat	63.44	100.00				100.00	100.00	100.00				
Purwokerto	89.83	92.46				94.93						
Purworejo	94.28	93.26		98.36	98.66	97.12	97.26	95.59		96.72	97.70	97.39
Bangga Bangun Desa	94.64	96.11		100.00	97.66	96.55	98.42	95.26	94.35	95.07	96.20	93.39
Pekalongan										87.44		94.41
TTM												
Tirtonadi	95.67	95.33	92.85	100.00	98.43	98.20	96.38	96.78	97.45	96.96	96.68	97.17
Dumai		85.00										
Botoh												
Rajabasa	91.31	93.06				99.90	96.13		85.00		93.44	93.91
Kayu Agung												
Merak								94.83				
Banjar	95.27	97.42					94.84	97.92	97.44	96.44	92.19	95.98
Muara Bungo	97.19	85.00						88.88	94.19			95.13
Giawangan												
Mendolo	96.76	94.76	98.31	90.00		96.57	92.90	94.59	94.53	94.32	94.30	94.92
Wa Gara												
Dungingi	90.00	91.34			85.27	96.79	100.00	97.26	99.75	96.67	93.00	100.00
Latenri Sessu Pakkae												
Baroko												
Anak Air						96.77	96.22	96.20	96.47	96.83	96.05	96.66
Jati Pariaman						95.66	95.59	94.26	97.12	96.37	97.13	96.56
TOTAL	95.28	95.27	95.60	96.01	96.72	96.72	95.95	95.70	96.17	96.23	96.59	96.34

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2024**

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI												
		TARGET SESUAI RENSTRA 2024	TARGET SESUAI PK 2024	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Desember 2024	
4368 Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat																
SK 02 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat																
IKK 2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Nilai	53,75	62,27	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	62,27
1 Terminal Langsa	Nilai	71	76	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	76
2 Terminal Lhokseumawe	Nilai	25	60	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	60
3 Terminal Meulaboh	Nilai	46	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41
4 Terminal Batah	Nilai	43	83	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	83
5 Terminal Paya Ilang	Nilai	34	65	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	65
6 Terminal Tanjung Pinggir	Nilai	38	77	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	77
7 Terminal Madya Tarutung	Nilai	31	30	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	30
8 Terminal Sibolga	Nilai	17	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	14
9 Terminal Padang Bulan	Nilai															
10 Terminal Amplas	Nilai	46	89	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	89
11 Terminal Pinang Baris	Nilai	21	39	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	39
12 Terminal Anak Air	Nilai	40	58	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	58
13 Terminal Kiliran Jao	Nilai	33	47	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	47
14 Terminal Bareh Solok	Nilai	37	26	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	26
15 Terminal Simpang Aur	Nilai	33	26	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	26
16 Terminal Jati Pariaman	Nilai	43	62	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	62
17 Terminal Bangkinang	Nilai	59	71	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	71
18 Terminal Payung Sekaki	Nilai	40	54	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	54
19 Terminal Dumai	Nilai	70	42	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	42
20 Terminal Gerbangsari	Nilai															
21 Terminal Alam Barajo	Nilai	21	73	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	73
22 Terminal Muara Bungo	Nilai	60	85	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	85
23 Terminal Pulau Tujuh Bangko	Nilai	43	84	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	84
24 Terminal Sribulan	Nilai	57	80	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	80
25 Terminal Alang-Alang Lebar	Nilai	57	69	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	69
26 Terminal Kayuagung	Nilai	35	52	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	52
27 Terminal Batu Kuning	Nilai	50	19	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	19
28 Terminal Betung	Nilai		30	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	30
29 Terminal Karya Jaya	Nilai	71	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47
30 Terminal Simpang PeriuK	Nilai	26	36	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	36
31 Terminal Batay	Nilai	12	13	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	13
32 Terminal Simpang Nangka	Nilai	40	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
33 Terminal Air Sebakul	Nilai															
34 Terminal Rajabasa	Nilai	36	63	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	63
35 Terminal Betan Subing	Nilai															
36 Terminal Pakupatan	Nilai	57	67	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	67
37 Terminal Labuan	Nilai	29	50	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	50
38 Terminal Mandala Lebak	Nilai	83	76	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	76
39 Terminal Merak	Nilai	72	60	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	60
40 Terminal KH. Ahmad Sanusi	Nilai	61	44	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	44
41 Terminal Ciakar	Nilai	49	50	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	50
42 Terminal Guntur Melati Garut	Nilai	46	91	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91
43 Terminal Harjamukti	Nilai	72	94	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	94
44 Terminal Indhiang	Nilai	56	77	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	77
45 Terminal Kertawangunan	Nilai	59	48	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	48
46 Terminal Subang	Nilai	96	98	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	98
47 Terminal Banjar	Nilai	90	91	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	91
48 Terminal Cikampek	Nilai	60	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
49 Terminal Cicaheum	Nilai															
50 Terminal Leuwipanjang	Nilai	44	90	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	90
51 Terminal Purwarejo	Nilai	50	63	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	63
52 Terminal Cepu	Nilai	46	94	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	94

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI											
		TARGET SESUAI RENSTRA 2024	TARGET SESUAI PK 2024	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Desember 2024
53 Terminal Bangga Mbangun Desa	Nilai	46	75	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	75
54 Terminal Giri Adipura	Nilai	75	76	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	76
55 Terminal Ir. Soekarno	Nilai	64	83	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	83
56 Terminal Kebumen	Nilai	41	86	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	86
57 Terminal Mangkang	Nilai	53	74	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	74
58 Terminal Pekalongan	Nilai	70	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71
59 Terminal Induk Pemalang	Nilai	45	52	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	52
60 Terminal Bulupitu Purwokerto	Nilai	38	83	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	83
61 Terminal Mendolo	Nilai	64	75	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	75
62 Terminal Bawen	Nilai	47	65	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	65
63 Terminal Tidar	Nilai	83	80	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	80
64 Terminal Tingkir	Nilai	26	74	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	74
65 Terminal Tirtanadi	Nilai	100	100	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	100
66 Terminal Jati	Nilai	76	63	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	63
67 Terminal Bobot Sari	Nilai	75	22	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	22
68 Terminal Demak	Nilai														
69 Terminal Tegal	Nilai	52	68	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	68
70 Terminal Giwangan	Nilai	63	73	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	73
71 Terminal Dhaksinarga	Nilai	58	66	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	66
72 Terminal Arjosari	Nilai	86	33	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	33
73 Terminal Arya Wiraraja	Nilai	49	37	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	37
74 Terminal Bangkalan	Nilai														
75 Terminal Banyuwangga	Nilai	73	73	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	73
76 Terminal Gayatri	Nilai	66	79	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	79
77 Terminal Kertonegoro	Nilai	50	71	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	71
78 Terminal Pacitan	Nilai	47	65	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	65
79 Terminal Patria	Nilai	47	100	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	100
80 Terminal Purboyo	Nilai	54	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	80
81 Terminal Selo Aji	Nilai	82	69	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	69
82 Terminal Tamanan	Nilai	50	84	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	84
83 Terminal Tawangalun	Nilai	82	85	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	85
84 Terminal Surodakan	Nilai	54	92	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	92
85 Terminal Rajekwesi	Nilai	87	64	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	64
86 Terminal Pandaan Pasuruan	Nilai	78	43	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	43
87 Terminal Kambang Putih	Nilai	55	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51
88 Terminal Sri Tanjung	Nilai														
89 Terminal Oswilangun	Nilai														
90 Terminal Purabaya	Nilai		83	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	83
91 Terminal Mengwi	Nilai	54	89	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	89
92 Terminal Mandalika	Nilai	61	90	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90
93 Terminal Sumer Payung	Nilai	70	79	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	79
94 Terminal Dara	Nilai	45	41	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	41
95 Terminal Kefamenanu	Nilai		19	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	19
96 Terminal Bimoku	Nilai		72	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	72
97 Terminal Sei Ambawang	Nilai	78	89	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	89
98 Terminal Singkawang	Nilai														
99 Terminal W.A. Gara	Nilai	54	97	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	97
100 Terminal Gambut Barakat	Nilai	76	70	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	70
101 Terminal Batu Ampar	Nilai	37	70	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	70
102 Terminal Samarinda Seberang	Nilai	34	97	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	97
103 Terminal Induk Lumpue	Nilai	26	51	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	51
104 Terminal Latenri Sessu Pekkae	Nilai	32	24	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	24
105 Terminal Petta Pongawal	Nilai	73	22	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	22
106 Terminal Daya	Nilai														
107 Terminal Sangka Palopo	Nilai														
108 Terminal Simbuang	Nilai	54	67	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	67
109 Terminal Tipalayo	Nilai	63	29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29
110 Terminal Kasintuwu	Nilai	23	42	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	42
111 Terminal Mamboro	Nilai	37	60	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	60

[illegible]

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2024**

[illegible]

**Capaian Kinerja IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal
Perhubungan Darat Tahun 2024**

Bulan	Masuk UPPKB	Melanggar	Tidak Melanggar	Presentase Pelanggaran
Januari	201,608	50,252	151,356	24.93%
Februari	183,262	47,445	135,817	25.89%
Maret	210,305	49,954	160,358	23.75%
April	96,843	23,768	73,075	24.54%
Mei	201,464	49,431	152,033	24.54%
Juni	196,140	46,093	150,047	23.50%
Juli	196,140	46,093	150,047	23.50%
Agustus	251,870	59,696	192,174	23.70%
September	225,074	53,362	171,712	23.71%
Oktober	225,074	53,362	171,712	23.71%
November	238,109	57,177	180,932	24.01%
Desember	161,976	38,770	123,206	23.94%
Total	2,387,865	575,403	1,812,469	24.10%

**Laporan Pengawasan
Desember 2024**

-
https://drive.google.com/drive/folders/185_RJpQW39Gz6iCz4rtKKI5BUfXQc8bD?hl=id

Realisasi IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat periode Desember 2024

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
1	SAKIP	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	5
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	5
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	5
B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
2	Kompetensi	14	14
3	Kinerja	11	11
4	Disiplin	1,5	1,5
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	8
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥ 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	10
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	4
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
				91

**Realisasi IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
periode Januari s.d Desember 2024**

NO	URAIAN	BOBOT	HASIL PERHITUNGAN	NILAI	BULAN											
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
	1 Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10%	70.0	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00
	2 Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	77.5	6.20	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	6.20	6.20
	3 Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	80.0	5.60	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	5.60	5.60
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	71.6	17.91	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.88	17.91
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%														
	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	107.69	21.54	22.09	21.35	21.35	21.35	21.78	21.78	21.54	21.54	21.78	21.78	21.78	21.54
	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	59.34	8.90	9.42	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	8.90	8.90	9.00	9.00	9.00	8.90
	3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	45.68	6.85	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.85
TOTAL NILAI				74.00	73.44	72.38	72.38	72.38	72.71	72.71	72.37	72.37	72.71	72.71	75.38	74.00

LAMPIRAN LKIP TAHUN 2024
TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

1. Lampiran 1_KM_109_TAHUN_2019 ttg Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A;
- 1a. PM_102_TAHUN_2018 ttg Penyelenggaraan Terminal Barang
2. Lampiran 2_KP 75 Tahun 2016 ttg Penlok Terminal Entikong
3. Lampiran 3_KM_44_TAHUN_2019 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum Nanga Badau
4. Lampiran 4_KM_45_TAHUN_2019 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum Aruk
5. Lampiran 5_KM_139_Tahun_2021 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum NTT & Papua (Motaain, Motamasin, Wini, Skouw)
6. Lampiran 6_Perpres Nomor 18 Tahun 2020 ttg RPJMN 2020 – 2024
7. Lampiran 7_Perpres Nomor 109 Tahun 2020 ttg Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
8. Lampiran 8_PM 80 Tahun 2020 ttg Renstra Kemenhub 2020-2024
9. PP_no._79_tahun_2013 ttg Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. PM_40_Tahun_2015 ttg Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang
11. PM_18_TAHUN_2021 ttg Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan PKB
12. PM_67_tahun_2021_Organisasi _ Tata Kerja Kemenhub_Pasal 158 _ 159_dan bagan hal 365
13. PM 17 TAHUN 2022 ttg Tata Kerja Kemenhub
14. KEPDIRJEN NO.KP-DRJD 9151 TAHUN 2022 ttg Pedoman Teknis Sistem Informasi Manajemen Terminal AJ

Dapat di download melalui link <https://intip.in/LampiranDasarHukumLKIP2023>